

**KETERKAITAN PENDEKATAN *SYSTEM OF CITIES*
DAN FENOMENA KOTA BESAR-KOTA KECIL
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Perkotaan**

DELIANA

0906596651



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM KAJIAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN
JAKARTA
DESEMBER 2010**

ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Deliana

NPM : 0906596651

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Deliana
NPM : 0906596651
Program Studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
Judul Tesis : Keterkaitan Pendekatan *System of Cities* dan
Fenomena Kota Besar – Kota Kecil di Provinsi
Sulawesi Selatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Perkotaan pada Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ir. R. Jachrizal Sumabrata M.Sc (Eng) , Ph.D.

Penguji : DR. Ir. Ruchyat Deni Dj, M.Eng.

Penguji : Dra. Widyawati, MSP.

Penguji : Ir. Budiono Subambang, MPM.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Desember 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasihnya yang begitu melimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih Tuhan. Saya selalu yakin bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Penulisan tesis ini saya jalani dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains Perkotaan pada Program Studi Kajian Pengembangan Perkotaan Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Berbagai pihak telah banyak memberikan dorongan, bantuan serta masukan dalam penyusunan tesis sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. R. Jachrizal Sumabrata M.Sc (Eng)., Ph.D. selaku pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, dorongan semangat, dan tantangan sehingga saya terpacu untuk segera menyelesaikan penelitian;
2. Ibu Dra. Widyawati, MSP. Walaupun beliau adalah penguji, namun bagaimanapun, beliau juga adalah pembimbing saya. Terima kasih atas bimbingan, masukan, tanggapan, dan dorongan semangatnya;
3. Bapak DR. Rudy P. Tambunan, MS. selaku ketua jurusan Kajian Pengembangan Perkotaan, terima kasih atas masukan-masukannya demi hasil yang lebih baik;
4. Bapak DR. Ir. Ruchyat Deni Dj, M.Eng. selaku penguji, terima kasih atas segala masukannya;
5. Bapak Ir. Budiono Subambang, MPM. selaku penguji, terima kasih atas segala saran, kritik, dan masukannya;
6. Para dosen pada Program Kajian Pengembangan Perkotaan, terutama yang telah menyempatkan waktunya untuk membaca, memberikan saran, masukan, komentar, dan tanggapannya demi penyempurnaan tesis ini baik saat sidang proposal maupun dalam waktu yang lainnya. Terima kasih telah merelakan waktunya untuk saya ganggu. Terima kasih pada Prof. Ir. Gunawan Tjahjono, M. Arch, Ph.D., Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamsyah M.S., Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D, Ir. Azrar Hadi, Ph.D., Siti Oemijati Djajanegara, SE, MA, Ph.D., Dr. Yophie Septiady, ST., Msi., dr. Alex Papilaya, DTPH., dan Hendricus Andy Simarmata, ST., MSi.;
7. Dinas Permukiman, Prasarana, dan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Ibu Yurnita Hadrawi atas semua data dan informasi yang diberikan;
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Bpk.. Suswanto dan Ibu Suwarni atas semua data dan informasi yang diberikan;

9. Ibu Anna Gurning, Ibu Enny Kusumastuti, dan Bapak Ruddin Lumban Gaol dari Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri yang telah sering menugaskan saya ke Provinsi Sulawesi Selatan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Mbak Esti, Mas Tara, Mbak Irene, yang telah rajin mengingatkan jadwal, memberikan informasi, dan menyebarkan semua email undangan, dll.;
11. Rekan-rekan di Ditjen Penataan Ruang Wilayah II Kementerian PU, yang telah memberikan kelonggaran waktu sehingga saya dapat menyesuaikan waktu dengan kuliah dan pengerjaan tesis;
12. Rekan-rekan kuliah. P. Rahmat, Adipati, Nauval, Mbak Sandra, Dameria, Murni, Mas Rio, Mas Agus, Lita, Agie, P. Widodo, Bu Rukmini, Sylva, Alexandra, Mas Yanuar, Mas Agus Taruna, Mbak Priska, Mas Abdul Syakir, Mas Agung, Mas Fajar, Mas Andre, Mas Tatang, dll yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas seluruh saran, masukan, dan tanggapannya. Saya pasti akan selalu ingat masa-masa ini. Juga maaf saya jika ada hal yang secara tidak sengaja menyinggung teman-teman sekalian;
13. Yang paling utama adalah suami dan anak-anak. Tanpa mereka, semuanya ini tidak akan ada dan tidak akan memiliki makna. Terima kasih. Juga seluruh keluarga besar yang telah mendukung saya.

Pada akhirnya, saya berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian pengembangan perkotaan dan para pembaca.

Jakarta, Desember 2010

Deliana

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deliana
NPM : 0906596651
Program Studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Keterkaitan Pendekatan *System of Cities* dan Fenomena Kota Besar – Kota Kecil
di Provinsi Sulawesi Selatan**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 17 Desember 2010

Yang menyatakan

(Deliana)

ABSTRAK

Nama : Deliana
Program Studi : Kajian Pengembangan Perkotaan
Judul : Keterkaitan Pendekatan *System of Cities* dan Fenomena Kota Besar – Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan

Primacy suatu kota maupun kawasan perkotaan tidak hanya disebabkan oleh satu sebab (*monocausal*), tetapi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pemicu Kota Makassar sebagai kota *primate* selain faktor sejarah, juga kenyataan masih tetap berlakunya “*The Law of the Primate City*”. Kota *primate* tidak hanya terjadi dalam skala nasional namun juga dalam skala regional/provinsi. Kota Makassar merupakan kota *primate* tidak hanya dari sisi dominasi jumlah penduduk tapi juga dari sisi pengaruh Kota Makassar terhadap kota-kota lainnya dan terhadap wilayah *hinterlandnya*. Hasil kajian dari sejarah perkembangan kota-kota di Sulawesi Selatan mendukung kenyataan bahwa Makassar sejak dahulu merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah Sulawesi Selatan.

Dalam sistem perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan terlihat bahwa kota yang memiliki hirarki tinggi tampak mengerucut di sekitar Kota Makassar. Kecenderungan tersebut mengindikasikan terjadinya konurbasi pada kawasan Kota Makassar dan sekitarnya yang dikenal dengan Kawasan Mamminasata. Kota Makassar tidak dapat berdiri sendiri namun telah menjadi satu kesatuan dari sisi aktivitas ekonominya dengan kota-kota di sekitarnya, yaitu Kota Maros (Kabupaten Maros), Kota Sungguminasa (Kabupaten Gowa), dan Kota Takalar (Kabupaten Takalar).

Hasil pengukuran dan penilaian dengan menggunakan koefisien korelasi tunggal menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang mantap antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil.

Kata Kunci : *System of Cities*, indeks *primacy*, *primate city*, *rank size rule*, kota besar dan kota kecil, rencana struktur ruang, indikasi program utama, Sulawesi Selatan

ABSTRACT

Name : Deliana
Study Program : Urban Development Studies
Title : *Linkage Between System of Cities and Big Cities - Small Towns Phenomenon in Sulawesi Selatan Province*

Primacy of a city or urban areas not only due to one reason (monocausal), but by several factors. Trigger factors of Makassar as a primate city in addition to historical factors, is the fact still remains the existence of "The Law of the Primate City". Primate city does not happen only in national scale but also in regional/provincial scale. Makassar as a primate city not only by domination of population but also by the influence of Makassar to other cities and to hinterland area. Study from development town history of South Sulawesi supports fact that since the first, Makassar still become growth center for the region of South Sulawesi.

In system of cities of South Sulawesi province, cities that have a high hierarchy looks pursued around Makassar. The trend indicates occurrence of conurbations in Makassar city and surrounding region, known as Mamminasata. Makassar City can not stand alone but has become an integral part of the economic activity with neighboring towns, such as Maros, Sungguminasa (Gowa), and Takalar.

Results of measurement and assesment using a single correlation coefficient showed that there was an established relationship between system of cities and the phenomenon of big cities and small towns.

Key words : System of Cities, index of primacy, primate city, rank size rule, big city and small town, urban spatial structure planning, primary program, South Sulawesi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI TEKNIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Keterbatasan Penelitian	11
1.6 Kerangka Pemikiran	12
1.7 Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Perspektif Geografi Perkotaan	17
2.1.1 Faktor Ekonomi	19
2.1.2 Faktor Teknologi	19
2.1.3 Faktor Demografi	20
2.1.4 Faktor Politik	20
2.1.5 Faktor Sosial	20
2.1.6 Faktor Budaya	21
2.1.7 Faktor Lingkungan	21
2.2 Perspektif Geografi Ekonomi	21
2.3 Karakteristik Globalisasi	23
2.4 Karakteristik Perkotaan	24
2.4.1 <i>Urban as an Entity</i>	25
2.4.2 <i>Urban as a Quality</i>	25

2.4.3	<i>The Place of Space</i>	26
2.5	Teori <i>System of Cities</i>	26
2.5.1	Teori Sistem	26
2.5.2	System of Cities./Sistem Perkotaan	29
2.5.3	Teori Struktur Ruang Perkotaan	32
2.6	Teori <i>Primacy</i>	33
2.7	Teori <i>Rank Size Rule</i>	34
2.8	Teori Pusat Pertumbuhan	36
2.9	Hipotesis	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1	Disain Penelitian	39
3.2	Pemilihan Lokasi Penelitian	41
3.3	Unit Analisis	42
3.4	Data dan Sumber Data	42
3.5	Populasi	45
3.6	Metode Pengumpulan Data	45
3.7	Penetapan Indikator dan Variabel	46
3.7.1	Indikator dan Variabel <i>Primacy</i> dan <i>Rank Size Rule</i>	46
3.7.2	Indikator dan Variabel Karakteristik Kota	47
3.7.3	Indikator dan Variabel Keterkaitan Sistem Perkotaan dan Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil Kota	50
3.8	Metode Pengukuran dan Penilaian	50
3.8.1	Pengukuran dan Penilaian Indeks <i>Primacy</i>	50
3.8.2	Pengukuran dan Penilaian Sistem Perkotaan	51
3.8.3	Pengukuran dan Penilaian Korelasi Sistem Perkotaan dan Indeks <i>Primacy</i>	54
3.9	Definisi Operasional	56
BAB IV	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	57
4.1	Gambaran Wilayah Sulawesi Selatan	57
4.2	Kondisi Sosial dan Kependudukan	62
4.2.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	62
4.2.2	Kepadatan dan Distribusi Penduduk	65
4.2.3	Komposisi Penduduk	67
4.2.4	Kondisi Sosial Budaya	68

	Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten/Kota	
5.2.3	Analisis Indeks <i>Primacy</i> Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Dalam dan Lintas Kabupaten/Kota ...	103
5.3	Analisis <i>Rank size rule</i> di Provinsi Sulawesi Selatan	106
5.4	Analisis Faktor Pemicu <i>Primacy</i> di Provinsi Sulawesi Selatan ...	109
	5.4.1 Faktor Politik	110
	5.4.2 Faktor Ekonomi	112
	5.4.3 Faktor Kelengkapan Sarana dan Prasarana	113
	5.4.3 Faktor Sejarah	115
5.5	Analisis Dampak <i>Primacy</i> pada Masyarakat	115
5.6	Analisis Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan	117
5.7	Sistem Perkotaan Berdasarkan Perda Provinsi Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan	127
	5.7.1 Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Perda Provinsi Nomor 44 Tahun 2001	127
	5.7.2 Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Perda Provinsi Nomor 9 Tahun 2009	128
	5.7.3 Persandingan Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Perda Provinsi No. 44 Tahun 2001 dan Perda Provinsi No. 9 Tahun 2009	130
5.8	Analisis Hubungan Sistem Perkotaan dan Indikasi Program Utama dalam RTRW	133
5.9	Keterkaitan Sistem Perkotaan dengan Fenomena Kota Besar – Kota Kecil	135
BAB VI	KESIMPULAN	131
6.1	Kesimpulan	137
	6.1.1 Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	137
	6.1.2 Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan	138
	6.1.3 Keterkaitan <i>System of Cities</i> dan Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan	140
6.2	Implikasi Penelitian	141
LAMPIRAN 1	TABEL DATA	142
LAMPIRAN 2	<i>Scoring</i> Masing-masing Variabel Sistem Perkotaan di Provinsi	162

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Data, Sumber Data, dan Kegunaan	43
Tabel 3.2	Variabel Pendukung <i>Primacy</i> dan <i>Rank Size Rule</i> yang Digunakan dalam Penelitian	47
Tabel 3.3	Variabel Pendukung Karakteristik Kota yang Digunakan dalam Penelitian	49
Tabel 3.4	Variabel Pendukung Keterkaitan Sistem Perkotaan dan Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil yang Digunakan dalam Penelitian	50
Tabel 3.5	Deskripsi Nilai Koefisien Korelasi	55
Tabel 4.1	Nama Ibukota, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010	58
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009	63
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan	64
Tabel 4.4	Kepadatan dan Distribusi Penduduk di Sulawesi Selatan Tahun 2009 ...	65
Tabel 4.5	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008	67
Tabel 4.6	PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2008 (Rp. Juta)	70
Tabel 4.7	PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2004-2008 (Rp. Juta)	70
Tabel 4.8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008 (%)	72
Tabel 5.1	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	98
Tabel 5.2	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Indonesia 1995-2005	99
Tabel 5.3	Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Dalam Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan	100
Tabel 5.4	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten/Kota	101
Tabel 5.5	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam dan Lintas Kabupaten/Kota	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	14
Gambar 2.1	Faktor Pemicu dan Proses Geografi Perkotaan	18
Gambar 2.2	Kerangka Teori	38
Gambar 4.1	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan	60
Gambar 4.2	Persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008	71
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008	72
Gambar 5.1	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota	98
Gambar 5.2	Indeks <i>Primacy</i> Rata-rata 6 Kota Terbesar di Indonesia 1995-2005	99
Gambar 5.3	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten/Kota	102
Gambar 5.4	Indeks <i>Primacy</i> 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam dan Lintas Kabupaten/Kota	104
Gambar 5.5	Hubungan Jarak ke Kabupaten dan Nilai Skor Total	111
Gambar 5.6	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009	113
Gambar 5.7	Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tanpa Mamminasata .	122
Gambar 5.8	Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Mamminasata	126

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota-kota di Indonesia umumnya memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan kota tersebut. Menurut Werner Rutz, 1987, kota-kota besar dan kecil yang ada di Indonesia memiliki akar sejarah tersendiri. Tempat-tempat ini secara umum dibagi dalam empat strata utama dalam formasi perkotaan, yakni pendirian kota-kota baru, masyarakat agrikultural – yang kemudian berkembang menjadi pusat dominasi asli yang baru, pusat-pusat perdagangan, dan pusat-pusat administratif. Kedua strata yang terakhir membentuk tempat yang dahulunya pedesaan. Werner Rutz, 1987, juga mengatakan, prasyarat paling penting untuk formasi awal pembentukan kota sudah ada di nusantara sebelum periode Hindu. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya institusionalisasi pemerintahan yang diatur oleh seorang penguasa. Pada saat itu ada dua jenis tipe masyarakat perkotaan yang sedang berkembang yakni, masyarakat yang memiliki dominasi pekerjaan berdagang di pelabuhan dan pusat dominasi kegiatan pada kekuasaan lokal (pedalaman).

Werner Rutz dalam bukunya *Cities and Towns in Indonesia: Their development, current positions, and functions* (1987), telah memulai studi yang menggambarkan secara komprehensif tentang kota-kota di Indonesia, meliputi gambaran tentang sejarah, luas wilayah, penduduk, urbanisasi, distribusi spasial, dan karakteristik lokasi. Rutz juga memberikan gambaran tentang fungsi dan tipe fungsional kota-kota di Indonesia, posisi kota-kota tersebut dalam hirarki central places, serta wilayah pengaruh dan hinterlandnya.

Werner Rutz mengulas Indonesia tidak hanya dari sisi distribusi penduduk, urbanisasi, dan struktur ekonominya, tetapi juga mengenai sejarah pengembangan central places dan bercerita tentang cara perkembangannya, lokasi awal perkembangan, dan penyebab terjadinya perkembangan maupun sebaliknya ke dalam bentuk/kondisi sekarang. Studi yang dilakukan oleh Rutz terdiri dari analisis secara detail termasuk di dalamnya mengenai kota-kota kecil di bawah level provinsi, hingga level kota kecamatan dengan penyediaan informasi konfigurasi pedesaan-perkotaan dan pola pertumbuhannya di masa yang akan datang.

Dengan latar belakang keilmuan sebagai seorang ahli geografi, penelitian yang beliau lakukan pun berdasarkan bidang keahliannya dengan metode-metode fungsional yang dipakai oleh para pakar geografi-ekonomi dan ahli geografi-wilayah aliran Jerman. Metode yang digunakan oleh Werner Rutz adalah teori yang diperkenalkan oleh rekannya, Walter Christaller, yaitu Teori *Central Places*.

Dalam perjalanannya, setelah penelitian selesai dilakukan, beberapa pakar mengemukakan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teori *Central Places*. Kelemahannya antara lain, teori ini tidak dapat diterapkan di semua bentuk permukiman/kota, tidak mempertimbangkan faktor sejarah, mengasumsikan bahwa keadaan penduduk homogen, dan tidak mempertimbangkan faktor kebutuhan individu. Teori ini menjadi semakin sulit diterapkan manakala teknologi transportasi sudah demikian maju. Walaupun nampaknya begitu banyak kelemahan pada teori *Central Place*, tidak berarti bahwa teori ini tidak memberikan sumbangan yang berarti untuk memahami pola dan keteraturan keruangan serta hirarkhi pusat pelayanan, baik barang maupun jasa. Teori tersebut telah membantu kita untuk memahami secara komprehensif fungsi dan tipe fungsional kota-kota di Indonesia pada masa itu.

Pada bagian akhir bukunya, Rutz juga merekomendasikan agar studinya tersebut menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut tentang sistem perkotaan di Indonesia. Rutz juga berharap agar bukunya dapat menjadi studi pendahuluan di bidang penelitian kota. Selain itu, penelitian Werner Rutz dilakukan antara tahun 1977-1984 sehingga tentunya data-data yang digunakan pun telah jauh berbeda dengan kondisi sekarang.

Ahli geografi lain, Michael Pacione, pakar di bidang geografi perkotaan, dalam bukunya yang berjudul "*Urban Geography : a Global Perspective*" mengungkapkan bahwa walaupun setiap kota memiliki karakter individu, namun memiliki pula kesamaan umum yang sebenarnya dapat digolongkan. Misalnya, seluruh kota terdiri dari area permukiman, jalur transportasi, area komersial, dan gedung-gedung public. Dalam belahan dunia yang berbeda, sejarah proses evolusi perkotaan mengikuti lintasan yang kemungkinan sama. Kota juga mengalami banyak permasalahan yang sama dalam tingkatan yang berbeda, seperti masalah perumahan, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, kemacetan lalu lintas, dan polusi lingkungan. Pada dasarnya, karakter lingkungan perkotaan dunia merupakan hasil interaksi antara lingkungan, ekonomi, teknologi, sosial, demografi,

budaya dan kekuatan politik yang bekerja pada skala geografi yang berbeda mulai dari skala global menuju ke arah lokal. (Pacione, 2001 : 3).

Kota pada dasarnya merupakan pusat kegiatan dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Peranan kota sebagai pusat kegiatan dalam suatu wilayah – nasional maupun lokal telah banyak ditunjukkan dalam berbagai literatur Barat yang pada intinya menyimpulkan bahwa kota berperan sebagai pusat industri manufaktur, atau sebagai pusat kegiatan pelayanan. Dalam lingkup wilayah yang lebih luas, setiap kota mempunyai fungsi baik fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk, sedangkan fungsi khusus kota adalah dominasi kegiatan fungsional di suatu kota yang dicirikan oleh kegiatan ekonomi kota tersebut yang mempunyai peran dalam lingkup wilayah yang lebih luas¹.

Umumnya, perkembangan kota-kota di Asia Tenggara banyak dibentuk berdasarkan warisan sejarah masa sebelumnya. Dalam kajian tentang masalah perkotaan, beberapa aspek penting yang memainkan peranan penting adalah keadaan demografi, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Aspek-aspek itu penting untuk dipahami, karena adanya faktor yang saling kait mengkait (Nas, 1979: 56-57). Menurut dinamika sejarahnya, kota-kota terlahir sebagai akibat pusat-pusat politik tradisional seperti pusat-pusat istana kerajaan, pusat-pusat perkembangan perdagangan seperti di daerah pegunungan, demikian pula di pelabuhan atau wilayah pesisir pantai. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran pusat-pusat perdagangan dari pegunungan ke pantai. Perpindahan itu seringkali terjadi karena dinamika politik yang terjadi di pedalaman sebagai akibat perkembangan politik di tingkat internal yang menyebabkan keinginan untuk memisahkan diri, maupun serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya.

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan suatu kota adalah keterkaitannya dengan kota-kota lain, baik dalam maupun luar negeri, serta keterkaitan dengan *hinterland*-nya atau daerah pedesaan sekitarnya. Sering keterkaitan terwujud sebagai suatu bentuk sistem kota-kota yang akan terjadi apabila dipandang dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak. Keterkaitan dapat melalui pergerakan barang,

¹ Kustiwan, Iwan. (2009). Bahan Kuliah Perencanaan Kota. Jakarta: Pusat Layanan Pustaka, Fisip Universitas Terbuka.

jasa, bahan, manusia, uang, kredit, dan investasi serta memegang peranan penting dalam pembentukan pola dan struktur sistem perkotaan dalam merangsang perkembangan kota.²

Pembangunan wilayah secara nasional diharapkan berlangsung di wilayah perkotaan dan perdesaan di seluruh Nusantara. Pembangunan perkotaan dan perdesaan ini saling terkait membentuk suatu sistem pembangunan wilayah nasional yang sinergis. Namun hal ini belum sepenuhnya terjadi di Indonesia karena peran kota-kota sebagai “motor penggerak” (*engine of development*) belum berjalan dengan baik, terutama kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Tidak optimalnya kota-kota untuk berfungsi sebagai “mesin pendorong” pengembangan wilayah sekitarnya karena kurang optimalnya fungsi eksternal kota. Kegagalan tersebut telah menyebabkan terjadinya “*backwash effect*” daripada “*trickling down effect*” sehingga kota (terutama kota metro dan kota besar) cenderung menjadi “gurita” yang menyedot sumberdaya yang ada di sekitarnya dan wilayah perdesaan. Kota-kota tersebut membesar secara fisik dan sosial ekonomi, sedangkan kota-kota kecil dan sedang serta perdesaan mengalami kondisi stagnan atau kemunduran. Implikasi terhadap kota-kota kecil dan sedang adalah semakin tidak menariknya kota-kota ini dari pandangan investor dan pengembangan ekonomi bahkan terjadinya efek “pengeringan” (Situmorang, Budi dalam Soegijoko, 2005: 51).

Di samping itu pembangunan kota-kota yang hirarkis juga belum sepenuhnya terwujud sehingga belum dapat memberikan pelayanan yang efektif dan optimal bagi wilayah pengaruhnya. Keterkaitan antar kota-kota dan antar kota-desa yang berlangsung saat ini tidak semuanya saling mendukung dan sinergis. Masih banyak di antaranya yang berdiri sendiri. Akibat nyata dari kesemua hal itu adalah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah (Napitupulu, Gita Chandrika dalam Soegijoko, 2005: 1).

Sistem kota-kota terbentuk karena adanya keterkaitan antara satu kota dengan kota yang lain, baik secara spasial maupun fungsional. Suatu kota mempunyai potensi untuk membentuk suatu sistem dengan kota-kota lain karena tersedianya infrastruktur, faktor lokasi, dan penduduk. Dalam sistem kota-kota, terdapat banyak kota yang saling berkaitan secara fungsional, yang antara lain digambarkan oleh orientasi pemasaran geografis. Keterkaitan antar kota dalam suatu sistem kota-kota terjadi karena terdapat

² Soegijoko, Budhy Tjahjati Sugijanto. (2005). Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21. Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI.

kota sebagai pusat koleksi/distribusi komoditas dan kota sebagai node yang ukurannya berbeda-beda tergantung jumlah penduduk, fungsi dan hierarkinya³.

Hingga saat ini penelitian yang dilakukan terhadap sistem perkotaan di Indonesia belum banyak dilakukan. Berdasarkan data yang saya temukan, penelitian tentang sistem perkotaan di Indonesia, antara lain dilakukan oleh:

- a. NUDS (*National Urban Development Strategies*) I, yaitu tahun 1981-1985;
- b. NUDS (*National Urban Development Strategies*) II, yaitu tahun 2001;
- c. Pemerintah Indonesia, dalam rangka penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) melalui PP No. 47 Tahun 1997 dan digantikan dengan PP No. 26 Tahun 2008.

Di pihak lain, para perencana, khususnya yang berkecimpung di bidang penataan ruang di Indonesia, dari awal telah diajarkan bahwa dalam menyusun sebuah rencana tata ruang, terutama pada bagian rencana struktur ruang, selalu dimulai dengan penyusunan sistem perkotaan, yang di dalamnya berisikan tentang penelaahan sistem kota-kota. Misalnya dalam penyusunan suatu rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, selalu diawali dengan penetapan sistem perkotaan yang ada di wilayah tersebut. Mengacu pada PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, mencakup Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Sebelum adanya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, seluruh manajemen pengembangan wilayah diatur sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat sehingga Pemerintah Pusat melalui kebijakan fiskalnya dapat mengatur kota-kota yang akan dikembangkan (dipromosikan) sesuai dengan fungsinya (PKN, PKW, dan PKL). Seiring dengan berjalannya waktu, walau kewenangan Pusat sangat kuat waktu itu, tetap tidak berhasil untuk mewujudkan sistem kota-kota seperti yang direncanakan karena matra sektoral (selaras dengan peraturan perundang-undangan sektor masing-masing) lebih kuat dibandingkan dengan matra spasial. Akibatnya terjadi kecenderungan bahwa sektor-sektor utama bagi pengembangan wilayah bukannya menyebar, tetapi mengerucut, membentuk kutub. Kota-kota besar semakin membesar dan menguat (*primacy*),

³ Kustiwan, Iwan. (2009). Bahan Kuliah Perencanaan Kota. Jakarta: Pusat Layanan Pustaka, Fisip Universitas Terbuka.

perbedaan antar wilayah terus melebar, dan urbanisasi di kota-kota besar tak dapat dibendung.

Kecenderungan tersebut tidak dapat dilepaskan dari catatan sejarah perencanaan kota dan sejarah perkembangan kota-kota di Indonesia. Sejak kemerdekaan, kota-kota besar di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat karena faktor migrasi maupun tingkat kelahiran. Pada masa setelah kemerdekaan telah dibuat Rencana Lima Tahun Pertama (1956-1960) maupun pembentukan Komite Perencanaan Nasional yang telah menyusun Rencana Pembangunan Delapan Tahun (1961-1968). Namun, kedua rencana tersebut dinilai sangat ambisius karena tidak mempertimbangkan daya dukung ekonomi. Masalah yang dihadapi oleh kota-kota di Indonesia pada masa itu adalah tingkat inflasi yang tinggi. Perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari unjuk kekuatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya masih lemah di bawah pemerintahan Presiden Soekarno dengan simbol *New Emerging Forces of the World* (Winarso, 1999).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, perencanaan pembangunan mulai dilakukan dengan lebih terencana, memiliki dasar hukum lebih kuat, dan dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Namun, kebijakan mengenai kota-kota masih belum menjadi fokus. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola pembangunan perkotaan di Indonesia pada masa ini adalah bantuan luar negeri, yang diberikan baik oleh lembaga donor multilateral maupun lembaga bilateral. Pada era 1970-an ketika Repelita I dimulai, fokus utama bantuan luar negeri lebih pada pembangunan fisik, berupa program perbaikan kampung (*Kampung Improvement Program*), penyediaan prasarana kota, dan peningkatan kualitas permukiman kota.

Pada tahun 1980, *National Urban Development Strategy* berhasil dirumuskan. Melalui NUDS, mulai dicoba untuk mengintegrasikan rencana pengembangan dan perencanaan fisik menjadi bagian dari program IUIDP (*Integrated Urban Infrastructure Development Program*). IUIDP dapat dikatakan berhasil dalam mengintegrasikan investasi publik dan meningkatkan produktivitas kota serta mengarahkan investasi swasta.

Penataan ruang yang lebih tegas mengarahkan perencanaan pada berbagai tingkatan dan menciptakan integrasi ruang antartingkatan mulai diperkenalkan pada tahun 1992, dengan lahirnya UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini memang masih sangat kental dengan kebijakan *top-down*, Namun, lahirnya UU tersebut sangat

mempengaruhi praktek perencanaan di Indonesia berikutnya. Lahirnya PP No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, tidak banyak berpengaruh terhadap pendekatan perencanaan yang lebih partisipatif karena perencanaan belum mampu mengikutsertakan masyarakat ke dalam bentuk partisipasi yang lebih nyata. Peran serta masyarakat masih terbatas pada tataran informasi dan konsultasi.

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami peristiwa krisis ekonomi yang sangat berat, disertai dengan perubahan politik yang sangat besar di tahun 1998. Kota-kota mengalami masalah berat terkait terhentinya kegiatan investasi dan buruknya kondisi perekonomian. Pada masa ini, kota-kota besar tidak dapat mengatasi kecenderungan dalam penurunan kualitas kota-kota di Indonesia. Gaya perencanaan yang cenderung *top-down* dengan menempatkan kota-kota utama/kota-kota besar sebagai motor penggerak ekonomi dapat dikatakan tidak berhasil. Pendekatan perencanaan spasial yang dilakukan secara *top-down* telah mengalami kegagalan dan kemudian diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dalam menyusun UU Penataan Ruang yang baru (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). UU Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan tahun 1999 yang kemudian direvisi di dalam UU No. 32 Tahun 2004, memberikan ketegasan tentang kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi. UU NO. 32 Tahun 2004 memungkinkan pengelolaan kota yang dilakukan bersama antardaerah otonom.

Semangat dari UU No. 26 Tahun 2007 diharapkan memberikan peluang bagi pendekatan-pendekatan yang berbeda dari hanya sekedar pendekatan perencanaan *top-down*. Pendekatan didasarkan atas potensi dan kendala yang dihadapi oleh kota-kota, baik itu fisik, ekonomi, dan budaya. Disini, perencanaan spasial menjadi bersifat strategis, ketimbang memperkuat hubungan 'tradisional' kota dengan wilayah sekitarnya sebagai hubungan pusat – pinggiran (Winarso, 1999).

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan arus perkembangan baru, yaitu semakin gencarnya peranan swasta, khususnya iklim investasi, membuat *primacy* kota-kota besar semakin tinggi. Peran serta swasta jika dikelola dengan baik dapat menjadi mitra dan dapat saling mendukung dengan pemerintah daerah. Namun, terdapat kecenderungan pihak swasta untuk berinvestasi pada kota-kota yang telah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan membuat jurang perbedaan kota besar dan kota kecil semakin lebar. Terhadap semakin lebarnya perbedaan antara

kota besar dan kota kecil ini, para perencana berusaha menawarkan solusi berupa penciptaan kota-kota menengah dengan teori "*Rank size rule*".

Jika berbicara tentang kota dalam dimensi ekonomi, akan berbeda dengan kota dalam dimensi administratif. Kota dalam dimensi ekonomi memberikan konsekuensi batas-batas kota yang dilihat dari aktivitas ekonomi yang ada dan tidak lagi dari batas administrasi pemerintah. Dapat saja terjadi beberapa kota yang berdekatan, dalam dimensi ekonomi merupakan satu kesatuan. Penggunaan dimensi ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi yang digunakan sebagai batas wilayah suatu kota memberikan konsekuensi tersendiri mengenai bentuk struktur distribusi aktivitas ekonomi antarkota tersebut. Permasalahan tentang ukuran distribusi aktivitas ekonomi perkotaan telah menjadi bahan observasi dari para peneliti, hingga muncul rumusan dari Zipf (1949) yang menyimpulkan bahwa ukuran distribusi aktivitas ekonomi suatu kota akan mengikuti distribusi Pareto, sekaligus memiliki bentuk parameter tertentu (Hukum Zipf). Hukum Zipf inilah yang menjadi dasar *Rank size rule*, yaitu sebuah aturan yang digunakan untuk melihat proporsi distribusi aktivitas ekonomi perkotaan.

Dalam penelitian ini saya mencoba mengkaji pendekatan yang selama ini menjadi pola standar yang digunakan oleh para perencana dalam menyusun suatu bentuk rencana tata ruang wilayah. Mengkaji kondisi eksisting sistem perkotaan yang ada di wilayah penelitian dan membandingkannya dengan yang telah dirumuskan dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Mengkaji fenomena *primacy* kota dan semakin lebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil. Juga mengkaji hubungan antara sistem perkotaan dan tingkat *primacy* di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian dilakukan dengan mengambil wilayah penelitian Provinsi Sulawesi Selatan dan unit analisis kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa alasan pemilihan Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian, antara lain karena Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah memiliki dan menetapkan sistem perkotaan yang baru dalam Perdanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dapat dibandingkan dengan sistem perkotaan yang lama yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebelumnya, yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kondisi eksisting sistem perkotaan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selain itu Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota yang besar. Terdapat 24 Kabupaten/Kota, terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota yang berada di dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian mengambil wilayah dengan jumlah Kabupaten/Kota yang relatif besar dengan tujuan agar dapat melihat dan mengkaji ulang sistem perkotaan yang ada dengan lebih jelas. Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstalasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, khususnya di bidang Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata, Provinsi Sulawesi Selatan letaknya juga strategis, yaitu berada di tengah-tengah Indonesia. Penelitian akan memfokuskan pada penelaahan terhadap sistem perkotaan dalam penyusunan suatu rencana tata ruang wilayah terkait dengan fenomena kota besar dan kota kecil.

1.2. Masalah Penelitian

Terkait dinamika perkembangan ekonomi saat ini dan dengan semakin terbukanya arus iklim investasi swasta, perkembangan kota tidak lagi terlalu ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Sekarang pihak swasta dapat menanamkan modalnya di mana saja yang ia mau tidak terikat dengan sistem perkotaan terutama dengan semakin berkembangnya sistem transportasi sebagai salah satu faktor pendukung. Namun tetap harus diakui bahwa peran pemerintah masih menjadi “motor penggerak” pembangunan dan sebagai alat untuk mendorong peran swasta yang lebih besar.

Hingga saat ini, pendekatan perencanaan penataan ruang yang umumnya dilakukan di Indonesia khususnya dalam penyusunan rencana struktur ruang, menggunakan pendekatan sistem perkotaan yang mengacu pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Namun seiring dengan berjalannya waktu, yang menjadi permasalahan adalah sistem perkotaan jika dalam konteks rencana, tidak dapat diciptakan karena banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan kota yang berada di luar wewenang pemerintah, misalnya pengaruh globalisasi, iklim investasi, kecenderungan konsentrasi infrastruktur, dan keuntungan geografi.

Terdapat kecenderungan pihak swasta untuk berinvestasi pada kota-kota yang telah memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Semakin gencarnya peranan swasta untuk berinvestasi, dengan menempatkannya pada kota-kota yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap, membuat *primacy* kota-kota besar semakin tinggi. dan membuat jurang perbedaan kota besar dan kota kecil semakin lebar. Terhadap semakin lebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil ini, para perencana berusaha menawarkan solusi berupa penciptaan kota-kota menengah dengan teori "*Rank size rule*".

Selain itu, sistem perkotaan di Indonesia, khususnya seperti yang tercantum dalam suatu rencana tata ruang wilayah diikuti dengan penetapan indikasi program utama yang mengikutinya. Umumnya program utama lima tahunan yang disusun ditempatkan pada kota-kota yang terdapat dalam sistem perkotaan tersebut sehingga menyebabkan *primacy* kota yang semakin tinggi dan perbedaan antara kota besar – kota kecil semakin lebar. Akibatnya, yang menjadi permasalahan adalah terjadi kecenderungan bahwa sektor-sektor utama bagi pengembangan wilayah bukannya menyebar, tetapi mengerucut, membentuk kutub. Kota-kota besar semakin membesar dan menguat (*primacy*), perbedaan antar wilayah terus melebar, dan urbanisasi di kota-kota besar tak dapat dibendung.

Penelitian ini bertolak dari pertanyaan penelitian, yaitu :

- a. Bagaimana kondisi eksisting sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan?
- b. Apakah pendekatan sistem perkotaan dalam penyusunan suatu rencana tata ruang memiliki kaitan dengan tingkat *primacy* kota dan lebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pertanyaan penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem perkotaan eksisting yang ada di wilayah penelitian;
2. Untuk menguji *Rank size rule* dan mengkaji keberadaan fenomena *primacy* di wilayah penelitian.
3. Untuk mengkaji hubungan antara sistem perkotaan dengan semakin lebarnya perbedaan kota besar dan kota kecil.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian bermanfaat:

1. Memberikan masukan bagi kajian pengembangan perkotaan khususnya mengenai sistem perkotaan sebagai pendekatan dalam melakukan perencanaan pembangunan wilayah;
2. Memberikan gambaran sistem perkotaan eksisting yang ada di wilayah penelitian;
3. Sebagai bahan masukan bagi para perencana yang terlibat langsung dalam penataan ruang maupun bagi para pengambil keputusan terkait dengan penggunaan sistem perkotaan sebagai basis pengambilan kebijakan pembangunan;
4. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat maupun investor yang akan menanamkan modalnya di lokasi penelitian;
5. Landasan bagi penelitian selanjutnya tentang sistem perkotaan maupun tentang dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang muncul akibat *primacy* yang terjadi di wilayah penelitian.

1.5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang saya lakukan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Keterbatasan waktu

Penelitian saya lakukan dalam waktu 6 bulan saja sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian tentang dampak sosial secara mendalam yang muncul akibat *primacy* yang terjadi di wilayah penelitian. Namun penelitian ini bermanfaat sebagai landasan penelitian selanjutnya.

2. Keterbatasan data

Data dan informasi tentang sejarah perkembangan sebagian kota-kota di wilayah penelitian relatif sedikit sehingga saya hanya dapat menganalisisnya berdasarkan data yang saya peroleh. Data yang saya gunakan berasal dari situs-situs resmi masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Keterbatasan unit analisis

Unit analisis yang saya gunakan untuk menelaah sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah kecamatan dengan pertimbangan ketersediaan data. Harus

diakui bahwa dalam satu kecamatan pun pasti ada bagian wilayahnya yang masih merupakan perdesaan. Namun karena ketersediaan data, maka unit analisis yang digunakan adalah kecamatan. Unit analisis tidak menggunakan Kabupaten karena banyaknya kawasan perdesaan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan beragamnya luas wilayah masing-masing kabupaten. Akan lebih baik lagi jika unit analisis yang digunakan menggunakan batas fisik atau batas fungsi. Jika demikian, kota yang sebenarnya dapat lebih kecil dari batas administrasi karena ada bagian kota yang masih memiliki ciri pertanian tetapi dapat pula melampaui batas administrasi karena telah menyatu sebagai kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang saya lakukan berawal dari ketertarikan saya pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Werner Rutz (1987). Rutz yang merupakan seorang ahli geografi dan bukan warga negara Indonesia, telah melakukan penelitian yang sangat mendalam dan komprehensif tentang Indonesia. Beliau memberikan gambaran tentang kota-kota yang ada di Indonesia, tentang sejarah, kondisi demografi, urbanisasi, karakteristik lokasi, distribusi spasial, dll. Rutz membuat gambaran tentang fungsi dan tipe fungsional kota-kota di Indonesia. Pada bagian akhir bukunya, Rutz juga merekomendasikan agar studinya tersebut menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut tentang sistem perkotaan di Indonesia.

Karena topik utama penelitian saya adalah tentang *System of Cities*, maka saya mencoba memahaminya melalui teori-teori yang terkait dengan sistem kota-kota, antara lain teori sistem, teori *system of cities*, dan teori struktur ruang perkotaan. Untuk melihat konteks kekinian dalam melihat fenomena kota besar dan kota kecil, saya mencoba menganalisisnya dengan pengaruh yang melanda saat ini, antara lain pengaruh globalisasi, teori urban change, dan perspektif geografi ekonomi.

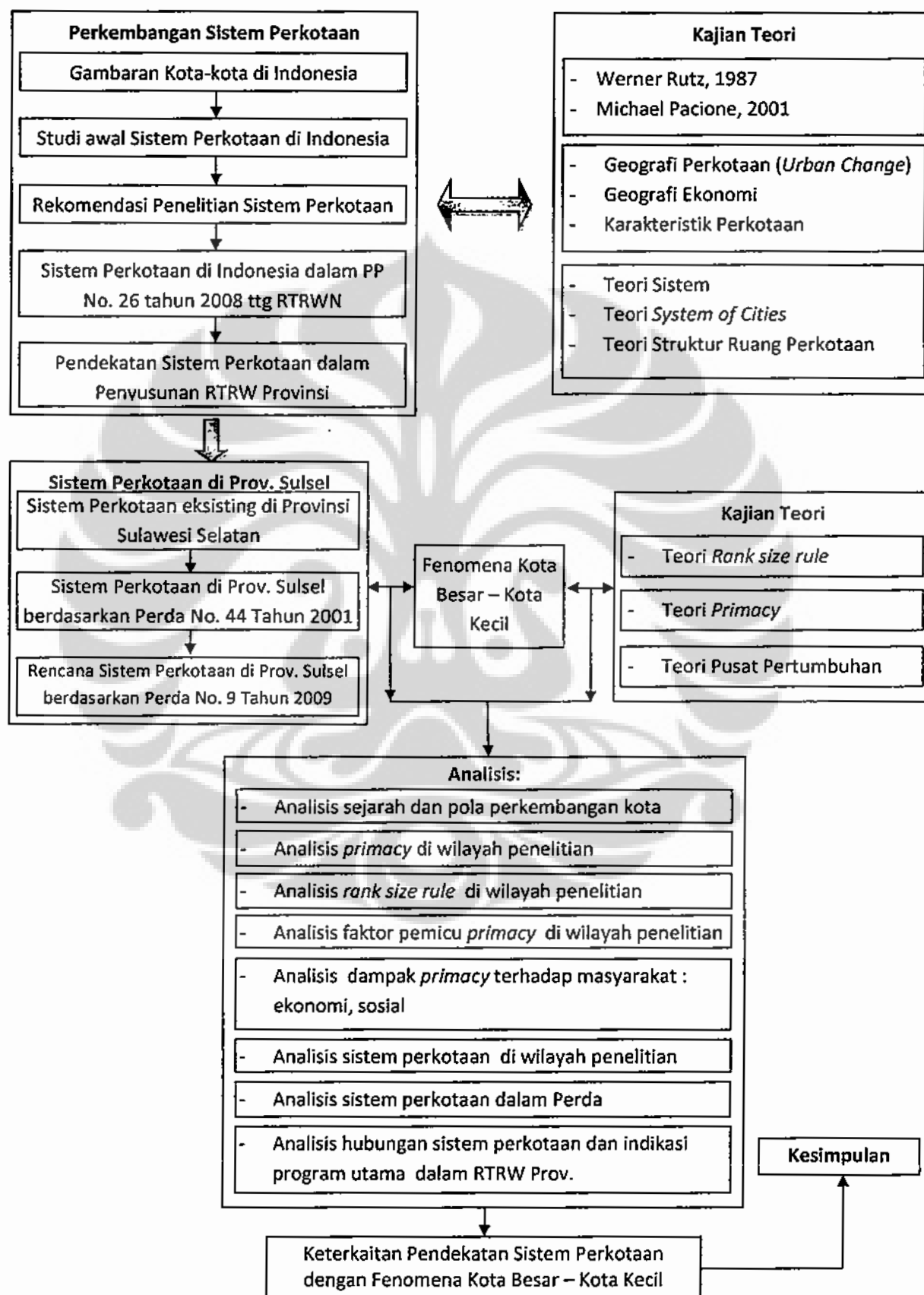
Untuk memahami sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan, saya mencoba mengkaji rencana sistem perkotaan yang tercantum pada Perda No. 44 tahun 2001 dan Perda yang menggantikannya, yaitu Perda No. 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan serta membandingkannya dengan kondisi eksisting sistem perkotaan yang ada di wilayah penelitian. Sebelum mengkaji kondisi eksisting sistem perkotaan di wilayah penelitian, saya melakukan analisis primacy dan analisis *rank size*

rule di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini untuk melihat fenomena kota besar dengan *primate city* nya dan kota kecil.

Dengan mengkaji sistem perkotaan eksisting yang ada di wilayah penelitian, serta mengujinya dengan menggunakan teori-teori yang terkait, analisis yang saya lakukan meliputi analisis pola perkembangan kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, antara lain dilihat dari sisi sejarah perkembangannya, analisis kondisi eksisting sistem perkotaan, analisis hubungan sistem perkotaan dan indikasi program utama dalam RTRW Provinsi, analisis *primacy*, dan analisis dampaknya terhadap masyarakat dari sisi ekonomi dan sosial.

Saya juga akan mencoba mengkaji fenomena yang terjadi pada kota besar dan kota kecil dengan menggunakan *rank size rule* yang diyakini menjawab fenomena kota besar – kota kecil dengan antara lain mencoba menciptakan kota menengah. Dengan melakukan tahapan analisis, diharapkan menuju pada kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian/masalah penelitian. Penelitian ini pada akhirnya mencoba untuk mengetahui keterkaitan antara sistem perkotaan dengan tingginya tingkat *primacy* kota dan semakin lebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam tesis ini terdiri dari enam bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian dan masalah penelitian yang akan diangkat dalam penulisan tesis. Selanjutnya secara berurutan, pada bagian pendahuluan ini berisi pertanyaan penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keterbatasan penelitian, dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab II Kajian Pustaka

Berisi konsep-konsep dan teori-teori yang digunakan dan relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Pada bagian akhir dari bab juga dijelaskan tentang kerangka teori yang akan dipergunakan dalam penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi penjelasan tentang metodologi penelitian yang saya gunakan mulai dari disain penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, unit analisis, sumber data, populasi, dan metode pengumpulan data yang dilakukan, serta sistematika penulisan.

Bab IV Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Berisi gambaran wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, mulai dari kondisi fisik, sosial dan kependudukan, budaya, serta kondisi perekonomian. Ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman tentang lokasi studi secara lebih mendalam.

Bab V Pembahasan

Berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian saya. Sesuai dengan kerangka pemikiran, analisis dan pembahasan yang akan dilakukan meliputi analisis *primacy* di wilayah penelitian, analisis *rank size rule*, dan analisis dampak *primacy* terhadap masyarakat dari sudut ekonomi dan sosial. Pada bagian pembahasan ini juga saya akan membahas dan menganalisis sistem perkotaan

Universitas Indonesia

eksisting di Provinsi Sulawesi Selatan, menganalisis sistem perkotaan yang tercantum dalam Perda Provinsi tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, serta membahas tentang hubungan sistem perkotaan dengan indikasi program utama lima tahunan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan. Pada akhir pembahasan diulas pula tentang keterkaitan antara pendekatan sistem perkotaan dengan fenomena kota besar – kota kecil.

Bab VI Kesimpulan

Merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perspektif Geografi Perkotaan

Michael Pacione, ahli di bidang geografi perkotaan, dalam bukunya yang berjudul "*Urban Geography : a Global Perspective*" (2001), mengungkapkan bahwa geografi perkotaan berusaha menjelaskan distribusi kota-kota serta kesamaan dan perbedaan *sosio-spatial* yang ada di antara dan di dalam kota-kota tersebut. Jika seluruh kota adalah unik, maka tugas tersebut tidak mungkin dilakukan. Menurutnya, walaupun setiap kota memiliki karakter individu, namun memiliki pula gambaran umum yang sebenarnya dapat digolongkan. Misalnya, seluruh kota terdiri dari area permukiman, jalur transportasi, area komersial, dan gedung-gedung publik (Pacione, 2001 : 3).

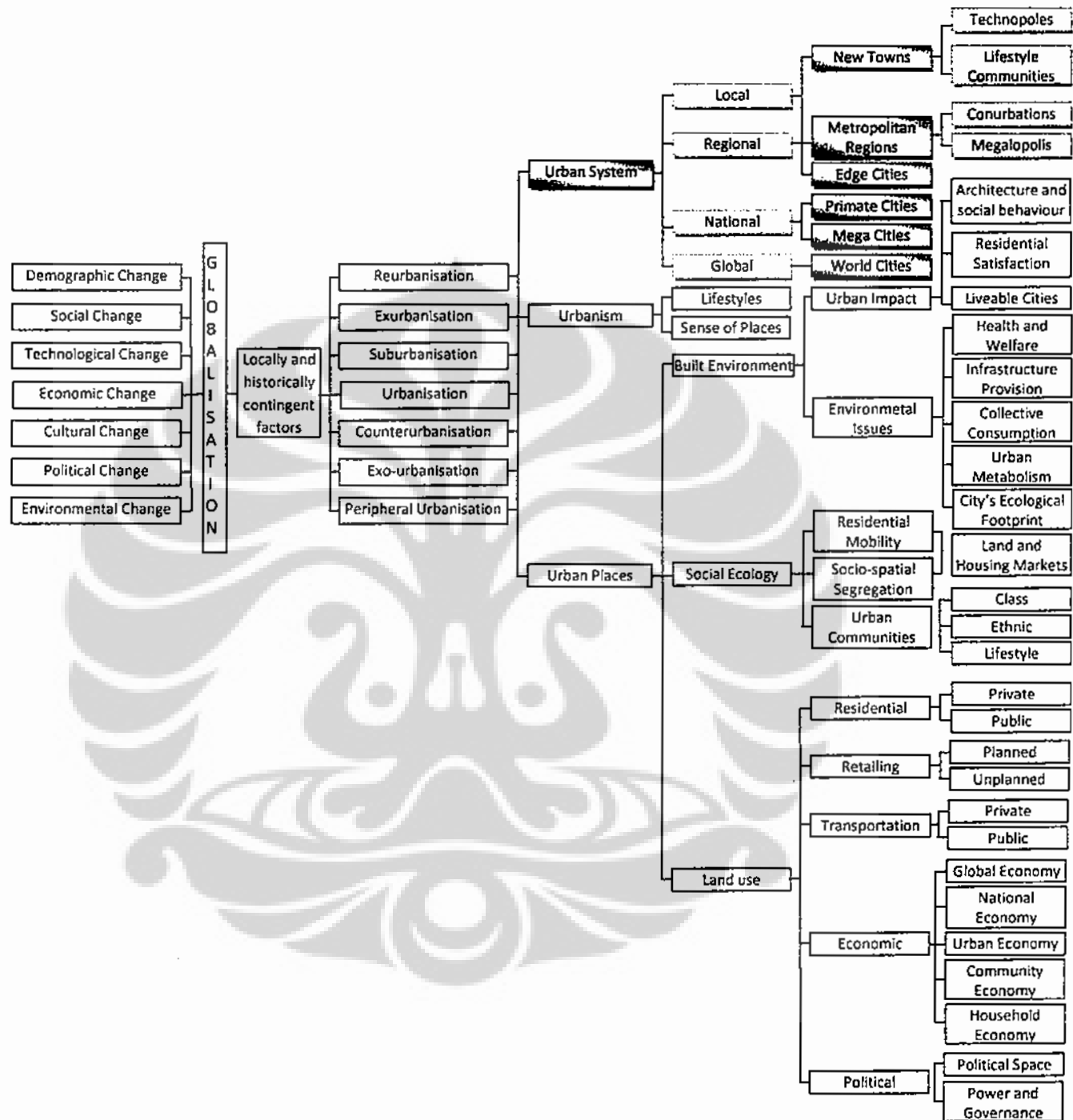
Dalam belahan dunia yang berbeda, sejarah proses evolusi perkotaan mengikuti lintasan yang kemungkinan sama. Kota juga mengalami banyak permasalahan yang sama dalam tingkatan yang berbeda, seperti masalah perumahan, ekonomi, kemiskinan, kesehatan, sosial, kemacetan lalu lintas, dan polusi lingkungan. Pada dasarnya, karakter lingkungan perkotaan dunia merupakan hasil interaksi antara lingkungan, ekonomi, teknologi, sosial, demografi, budaya dan kekuatan politik yang bekerja pada skala geografi yang berbeda mulai dari skala global menuju ke arah lokal. (Pacione, 2001 : 3).

Dalam bukunya tersebut, Pacione juga mengungkapkan bahwa hasil dari proses globalisasi dan perubahan perkotaan berkaitan dengan:

- Perubahan dalam sistem perkotaan pada skala lokal, regional, nasional, dan global
- Penyebaran *urbanism*
- Perubahan pada konstruksi *sosio-spatial* dari lokasi perkotaan

Diagram berikut akan memperlihatkan faktor-faktor pemicu utama dan proses perubahan geografi perkotaan, juga tentang hasil dari masing-masing proses. Penelitian yang saya lakukan terkait dengan sistem perkotaan dalam skala regional, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 2.1
Faktor Pemicu dan Proses Geografi Perkotaan



Sumber: Pacione, Michael. (2001). *Urban Geography : A Global Perspective*. New York: Routledge.

Terdapat tujuh faktor pemicu perubahan perkotaan yang diungkapkan oleh Pacione, yaitu faktor ekonomi, teknologi, demografi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan.

2.1.1 Faktor Ekonomi

Menurut Pacione, faktor ekonomi merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam perubahan perkotaan. Semenjak kemunculannya pada abad ke 16, ekonomi kapitalis telah melalui 3 fase utama. Fase pertama mulai dari akhir abad ke 16 hingga akhir abad ke 19 merupakan era *competitive capitalism* yang ditandai dengan kompetisi pasar bebas. Pada akhir abad ke 19, skala bisnis meningkat, terjadi ekspansi pasar menjadi nasional dan internasional, pasar tenaga kerja menjadi lebih terorganisasi, dan intervensi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi sebagai respon terhadap kebutuhan peraturan.

Pada fase kedua, yaitu pada awal dekade abad 20, dinamisme sistem ekonomi diperluas melalui filosofi "*fordism*". Filosofi ekonomi ini dibangun dengan prinsip produksi massal dengan menggunakan teknik perakitan dan "*scientific management*" yang dikenal dengan "*taylorism*", bersama dengan konsumsi massal dan teknik pemasaran yang lebih tinggi.

Fase ketiga, merupakan fase kapitalisme yang dibangun dalam periode setelah Perang Dunia II. Ketika pasar massal menjadi jenuh dan keuntungan dari produksi massal menurun, banyak perusahaan kembali melayani pasar yang lebih spesifik. Di samping produksi yang terstandarisasi, spesialisasi membutuhkan sistem produksi yang fleksibel. Fase kapitalisme ini mengacu pada "*advanced capitalism or disorganised capitalism*".

Transisi menuju kapitalisme lanjutan didukung dengan peningkatan globalisasi ekonomi. Perusahaan transnasional sering berjalan di luar pengawasan pemerintah atau perserikatan buruh. Evolusi ekonomi kapitalis merupakan dasar yang signifikan untuk perubahan geografi sejak setiap fase kapitalisme mencakup perubahan dalam jenis produksi, cara produksi, dan tempat produksi.

2.1.2 Faktor Teknologi

Perubahan teknologi sejalan dengan perubahan ekonomi, mempengaruhi pola pertumbuhan dan perubahan perkotaan. Inovasi pada bidang telekomunikasi telah berdampak pada struktur dan fungsi ekonomi global. Ini terlihat dari tempat produksi

yang terpisah secara geografi dari lokasi *research and development* (R&D) dan lokasi manajemen operasi untuk level yang lebih tinggi.

Perubahan teknologi yang secara langsung mempengaruhi bentuk perkotaan juga terjadi pada tingkat lokal. Contoh yang paling terlihat, antara lain dalam teknologi transportasi yang mendorong suburbanisasi.

2.1.3 Faktor Demografi

Perubahan demografi mempengaruhi secara langsung urbanisasi dan perubahan perkotaan. Pergerakan penduduk ke dalam dan keluar kota membentuk ukuran kota, konfigurasi dan komposisi sosial kota. Pada negara-negara dunia ketiga, harapan peningkatan standar hidup membuat banyaknya migrasi masuk ke kota. Bersamaan dengan itu, penduduk perkotaan di Barat, merealisasikan "kehidupan yang baik" melalui proses suburbanisasi dan exurbanisasi.

Kondisi lingkungan perkotaan juga mempengaruhi struktur demografi kota dengan mempengaruhi keseimbangan antara angka kelahiran dan kematian. Perubahan geografi ini berhubungan dengan faktor pemicu lainnya seperti pertumbuhan atau penurunan ekonomi dan perubahan politik. Misalnya, pertumbuhan penduduk di negara dunia ketiga dapat mendorong usaha politik untuk mencegah migrasi dalam suatu negara untuk mengendalikan "overurbanisation".

2.1.4 Faktor Politik

Kota-kota menggambarkan ideologi politik masyarakatnya. Dampak perkotaan dari perubahan politik diperlihatkan misalnya pada kasus Eropa Timur dan Uni Soviet. Perubahan dalam ideologi politik dan modifikasi kebijakan ekonomi dan perkotaan, memiliki dampak utama pada pembangunan kota. Di pihak lain, keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak menyediakan paket insentif finansial untuk menarik investasi masuk.

2.1.5 Faktor Sosial

Perubahan sosial dalam skala makro dapat memiliki dampak yang signifikan pada karakter kota-kota. Contohnya, perilaku sosial terhadap aborsi atau penggunaan metoda pengendalian kelahiran dapat mempengaruhi komposisi demografi masyarakat dan

kotanya. Perilaku etnik atau gaya hidup kaum minoritas dapat mempengaruhi gelombang migrasi antar negara atau antar kota, juga pada pola segregasi permukiman dalam kota tersebut. Ini merupakan bukti pada kecenderungan peningkatan suburbanisasi. Faktor sosial yang turut mempengaruhi adalah sikap masyarakat terhadap kelompok minoritas lainnya.

2.1.6 Faktor Budaya

Salah satu contoh faktor perubahan budaya yang cukup signifikan pada masyarakat di belahan Barat dunia setelah Perang Dunia II, yaitu pada akhir dekade 1970-an adalah kebangkitan "*materialism*". Terlihat dari konsumsi berlebihan pada mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Pada skala perkotaan ini tergambar pada keberadaan disainer pakaian, toko-toko, dan lainnya. Juga terlihat dari peningkatan jurang perbedaan antara kaya dan miskin.

2.1.7 Faktor Lingkungan

Dampak perubahan lingkungan pada pola urbanisasi dan perubahan perkotaan terlihat pada sejumlah skala geografi. Pada skala dunia, antara lain issue global warming karena efek rumah kaca membutuhkan konstruksi pertahanan wilayah pantai untuk melindungi kota-kota seperti Bangkok, Jakarta, Venice, dan London dari bahaya genangan air.

Pada skala lokal fenomena alam seperti gempa bumi dan longsor dapat memaksa penduduk memindahkan lokasi permukimannya.

2.2 Perspektif Geografi Ekonomi

Geografi ekonomi merupakan cabang geografi manusia yang bidang kajiannya berupa struktur keruangan aktivitas ekonomi. Titik berat kajiannya pada aspek keruangan struktur ekonomi masyarakat, termasuk bidang pertanian, industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, jasa, dan sebagainya. Geografi ekonomi mencakup geografi pertanian, geografi industri, geografi perdagangan, geografi transportasi dan komunikasi.

Menurut Laporan Tahunan Bank Dunia 2009: Menata Ulang Geografi Ekonomi (*World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography*), Bank Dunia dengan menggunakan perspektif geografi ekonominya menggarisbawahi tentang berbagai ketimpangan yang terjadi di dunia melalui sudut pandang 3D, yaitu dari sudut pandang

konsentrasi kegiatan ekonomi, kepadatan kegiatan ekonomi (density), aspek biaya transportasi (distance), dan faktor integrasi ekonomi, penyekatan (division) lintas daerah dan lintas negara. Ketiga faktor "D" tersebut diharapkan dapat mengubah tatanan ekonomi ruang untuk mengatasi persoalan ketimpangan, baik pada skala lokal maupun regional, termasuk regional lintas negara.

Dalam laporan pembangunan dunia diungkapkan bahwa di beberapa lokasi, semua berjalan dengan baik karena lokasi-lokasi tersebut memiliki perubahan menuju kemajuan dalam tiga dimensi geografi ekonomi (Bank Dunia, 2009 : xxii):

- Kepadatan yang lebih tinggi, seperti yang dijumpai dalam pertumbuhan kota-kota
- Jarak yang lebih dekat, para pekerja dan para pebisnis bermigrasi mendekati kepadatan
- Penyekatan yang lebih sedikit, negara-negara mempertipis perbatasan ekonomi negara mereka dan memasuki dunia untuk memperoleh keuntungan dari skala produksi dan spesialisasi.

Bank dunia melalui laporannya menyampaikan pesan bahwa saat ini terjadi pertumbuhan yang tidak merata dan pembangunan inklusif. Pertumbuhan ekonomi akan menjadi tidak seimbang. Dengan menyebarkan kegiatan-kegiatan ekonomi, artinya mengekang kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Namun pembangunan masih tetap dapat bersifat inklusif, dalam arti bahwa yang berada jauh dari peluang ekonomi tetap dapat diuntungkan oleh bertumbuhnya konsentrasi kekayaan di lokasi-lokasi yang jumlahnya tidak banyak. Caranya adalah dengan melalui integrasi ekonomi (Bank Dunia, 2009 : xxiii).

Analisis dan arah rekomendasi kebijakan Bank Dunia ini terlihat agak berbeda dengan kebijakan yang diambil banyak negara, termasuk Indonesia. Bank Dunia mengatakan bahwa persoalan disparitas pada level antardaerah, misalnya, tidak dapat diatasi hanya dengan menyebarkan kegiatan ekonomi ke semua daerah. Menurut laporan Bank Dunia, pemerataan kegiatan ekonomi di semua daerah atau lokasi justru menghambat upaya mengurangi kemiskinan itu sendiri. Sebaliknya, di belahan dunia lain, banyak negara justru menempuh kebijakan pemerataan kegiatan ekonomi ke berbagai wilayah yang dihuni sekitar satu miliar penduduk miskin seluruh dunia. Berdasarkan perjalanan perkembangan kota-kota dunia yang sudah lebih dahulu mengalami perkembangan yang

panjang, ketimpangan antar wilayah memang akan terjadi sampai mencapai titik tertentu, untuk kemudian ketimpangan tersebut akan menurun.

Isu geografi ekonomi dalam laporan tersebut banyak terinspirasi dari konsep Paul Krugman, peraih Nobel Ekonomi 2008, terutama tentang "Geografi Ekonomi Baru" (*New Economic Geography*) dan "Teori Perdagangan Baru" (*New Trade Theory*). Konsep "*New Economic Geography*" yang dilontarkan Krugman mengindikasikan bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi atau aglomerasi bagaimanapun memerlukan kegiatan produksi dengan skala ekonomis (*economies of scale*) tertentu yang tidak dapat diciptakan di semua daerah atau lokasi begitu saja.

Bagi Bank Dunia, mendorong aglomerasi adalah mendekatkan penduduk ke kota-kota pusat kegiatan ekonomi yang sedang tumbuh melalui migrasi dan urbanisasi. Kecenderungan semakin pendeknya jarak tempuh, terutama penduduk negara-negara maju, ke pusat kegiatan ekonomi memberikan indikasi bahwa faktor biaya transportasi masih tetap menjadi hal yang tidak boleh diremehkan. Pandangan ini seolah meruntuhkan mitos bahwa faktor jarak dapat *obselete*.

2.3 Karakteristik Globalisasi

Menurut Pacione (2001), globalisasi merupakan kata yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah proses kompleks yang dapat meningkatkan keterhubungan kehidupan sosial dalam dunia (post) modern. Konsep globalisasi mengacu pada kesadaran dunia sebagai satu kesatuan. Globalisasi terjadi dalam 3 bentuk: (Pacione, 2001: 8), yaitu globalisasi ekonomi, politik, dan budaya.

Secara signifikan, terdapat hubungan antara global dan lokal. Ketika global memiliki kekuatan untuk mengubah kota, kota-kota mengubah konteks global ke dalam konteks lokal. Dalam hubungan global-lokal, tekanan global memiliki kekuatan lebih besar dan menyebar lebih ekstensif. Kekuatan lokal terlihat relatif lebih lemah dan pengaruhnya secara geografis terbatas. Namun tindakan-tindakan lokal juga memiliki konsekuensi global, misalnya kegiatan eksploitasi pekerja anak di satu lokasi.

Karakteristik utama globalisasi: (Pacione, 2001: 9)

- a. Globalisasi bukan fenomena baru. Proses globalisasi telah berjalan sepanjang sejarah manusia, tetapi tingkat perkembangan dan efeknya mengalami percepatan sejak periode 'awal modern', yaitu akhir abad ke 16. Terutama dalam beberapa dekade terakhir bersamaan dengan transisi menuju *postmodernity*;
- b. Globalisasi meliputi:
 - Intensifikasi hubungan sosial dunia luas melalui penekanan ruang-waktu dunia;
 - Transformasi lokal mencakup perluasan identitas lokal seperti halnya konteks lokal dari dunia secara keseluruhan;
- c. Dalam hubungan global-lokal, kekuatan global umumnya lebih kuat dan kontrolnya lebih luas secara spasial. Kekuatan lokal terlihat lebih lemah dan terbatas dampaknya secara geografis, meskipun beberapa tindakan lokal dapat memiliki konsekuensi global;
- d. Globalisasi terjadi di kota, ketika kekuatan global ada untuk mengubah kota, kota berubah dan mengisi globalisasi dengan konteks lokal;
- e. Kekuatan global dimediasi dengan kekuatan muatan lokal;
- f. Sejumlah pemicu berasal dari globalisasi tapi kekuatan dominan umumnya karena ekonomi;
- g. Globalisasi mengurangi pengaruh batas negara dan batas politik. Pada saat yang sama, negara mengorganisasikan infrastruktur hukum dan keuangan yang memungkinkan kapitalisme berjalan secara global;
- h. Globalisasi berjalan secara menerus, melewati lembaga, masyarakat, dan tempat tertentu. Ini merupakan bukti pada skala global dalam kesenjangan antara peningkatan yang pesat dan pada skala perkotaan melalui polarisasi dalam kota-kota;
- i. Di pihak lain, kekuatan global terkadang muncul, terjadi penolakan, atau terkadang dieksploitasi pada level yang lebih rendah;
- j. Pergerakan modal berkurang pada beberapa tempat tertentu, meskipun dapat pula menguatkan identitas lokal dengan melakukan respon yang dilakukan oleh pihak lokal;
- k. Lokasi para pihak yang memerintahkan, mengawasi, dan membiayai ekonomi global mendefinisikan kota global.

2.3. Karakteristik Perkotaan

Untuk mendefinisikan 'urban' (perkotaan), menurut Pacione (2001), akan sangat berguna jika kita membedakan antara perkotaan sebagai kesatuan (*urban as an entity*) dan

perkotaan dari sisi kualitasnya (*urban as a quality*). Ini akan membantu untuk memahami kehidupan perkotaan dan memperkaya pendekatan kita terhadap studi tentang kota-kota.

2.3.1. *Urban as an Entity*

Ada empat metode utama untuk mengidentifikasi '*urban place*', yaitu:

a. *Population Size*

Tiap negara memiliki ambang batas minimal penduduk untuk disebut sebagai perkotaan yang berbeda tergantung pada konteks sosialnya.

b. *Economic Base*

Pada beberapa negara, jumlah penduduk dikombinasikan dengan kriteria ini untuk mendefinisikan '*urban place*'. Di India misalnya, sebuah permukiman harus memiliki > 75% orang dewasa yang bekerja di luar perkotaan untuk disebut sebagai perkotaan.

c. *Administrative Criteria*

Mayoritas kota di dunia didefinisikan menurut kriteria administratif dan hukum.

d. *Functional Definition*

Membagi kota menurut fungsi wilayah perkotaannya yang merefleksikan pengaruh perkotaan yang sebenarnya.

2.3.2. *Urban as a Quality*

Berlainan dengan definisi kota sebagai kesatuan fisik (*urban as an entity*), konsep *urban as a quality*, lebih berkaitan dengan arti '*urban places*' dan pengaruh atmosfer perkotaan (*urban milieu*) pada gaya hidup masyarakat. Meskipun kota ada sebagai objek fisik, tapi secara jelas juga disediakan oleh para penghuninya. Untuk itu sangat beralasan untuk memikirkan kota yang memiliki baik struktur fisik objektif dan struktur subjektif. Dalam menginterpretasikan kembali arti '*urban*' (perkotaan), Harvey dan Castells dalam Pacione (2001) menyimpulkan bahwa ketika *urbanism* sebagai *a way of life* memiliki struktur dan karakter yang berbeda, itu ada dalam kerangka yang lebih besar yang dibuat dengan kekuatan kapitalisme. Ini artinya gaya hidup perkotaan dapat menyebar di luar batas fisik suatu kota.

2.3.3. *The Place of Space*

Dalam mendefinisikan ulang 'urban' di luar arti empirik dan untuk menjelaskan arti kehidupan perkotaan, baik Harvey maupun Castell (dalam Pacione, 2001), menolak 'spatial fetishism' dan menekankan pada kebutuhan untuk menguji aturan 'urban places' dan masyarakat kapitalis. Bagaimanapun, tetap penting untuk mempertimbangkan kekuatan 'space'. Space lebih dari sebagai medium tempat proses sosial, ekonomi, dan politik berjalan. Dimensi ruang seperti ukuran, kepadatan, jarak, arah, batas wilayah, dan lokasi, memiliki pengaruh kuat pada pembangunan perkotaan dan pada interaksi manusia. Jarak dan arah memiliki efek langsung pada jaringan sosial, perjalanan ke tempat kerja, dan akses fisik ke fasilitas-fasilitas. Konsep teritorialitas berkontribusi pada formasi sub wilayah dalam kota, biasanya dipisahkan pada etnik dan garis kelas. Pemisahan ruang dengan batas pemerintahan lokal memiliki implikasi pada komponen sosial dan kualitas hidup pemukim.

2.4 *Teori System of Cities*

2.4.1 *Teori Sistem*

a. *Definisi Sistem*

Konsep sistem sebenarnya diambil oleh ilmu sosial dari ilmu pasti, secara khusus dari fisika yang berhubungan dengan materi, energi, gerak, dan kekuatan. Semua konsep ini lebih diarahkan pada suatu pengukuran yang pasti dan mengikuti aturan-aturan tertentu. Ada yang mendefinisikan sistem dalam konteks pasti dan dalam persamaan matematis yang menjelaskan hubungan tertentu antara beberapa variabel. Namun konsep ini sangat sedikit diadopsi oleh para ahli di bidang sosial karena variabel-variabelnya sangat kompleks dan sering sangat multidimensional.¹

Menurut *The Oxford English Dictionary* sistem didefinisikan sebagai *a complex whole, a set of connected things or parts, a department of knowledge or belief considered as an organised whole.*²

¹ Muslim Tampubolon & Pasaman Silaban, Penerapan dan Pendekatan Teori Sistem : Studi Kasus Universitas HKBP Nomsen, Universitas Sumatera Utara, 2004

² Chadwick, George, *A Systems View of Planning : Towards A Theory of The Urban and Regional Planning Process*, Pergamon Press, New York, 1971.

A system is an organized or complex whole: an assemblage or combination of things or parts forming a complex or unitary whole. (Johnson et. all, p.5,1973). Selanjutnya menurut Ludwig Von Bertalanffy, "Systems are complexes of elements standing in interaction. A system is a complex of interacting elements. Systems are complexes of elements in interactions, to which certain laws can be applied". (Disarikan oleh Winardi, Pengantar Teori Sistem dan Analisis Sistem, hal.129, 1980).

Sedangkan menurut Chadwick, sistem didefinisikan sebagai berikut : *A system is a set of objects together with relationships between the objects and between their attributes. (Chadwick,, 1971:36).*

Dari berbagai definisi di atas dapat dikatakan bahwa suatu sistem adalah kombinasi yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama, yaitu antara objek-objek, atribut, dan dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh (Whole).

b. Karakteristik Sistem

Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai :³

1. Komponen (*components*)

Terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, dimana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan.

2. Batas sistem (*boundary*)

Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup (*scope*) dari sistem tersebut.

³ Muslim Tampubolon & Pasaman Silaban, Penerapan dan Pendekatan Teori Sistem : Studi Kasus Universitas HKBP Nomensen, Universitas Sumatera Utara, 2004

3. Lingkungan luar sistem (*environments*)

Adalah apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara, sebaliknya lingkungan yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan, kalau tidak ingin terganggu kelangsungan hidup sistem.

4. Penghubung (*interface*)

Merupakan media penghubung antar subsistem, yang memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran (*output*) dari satu subsistem akan menjadi masukan (*input*) untuk subsistem lainnya melalui penghubung disamping sebagai penghubung untuk mengintegrasikan subsistem-subsistem menjadi satu kesatuan.

5. Masukan (*input*)

Adalah komponen masukan yang dapat berupa data atau informasi. Masukan *maintenance* adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi, sedangkan masukan sinyal adalah energi yang diproses untuk mendapatkan keluaran. Sebagai contoh di dalam sistem komputer, program adalah *maintenance input* yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.

6. Keluaran (*output*)

Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain. Misalnya untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil sisa pembuangan, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

7. Pengolah (*process*)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan

berupa bahan baku dan bahan-bahan lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data-data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen.

8. Sasaran (*objectives*) atau tujuan (*goal*)

Suatu sistem pasti mempunyai tujuan (*goal*) atau sasaran (*objective*). Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan bersila bila mengenai sasaran atau tujuannya.

2.4.2 *System of Cities* / Sistem Perkotaan

Kota pada dasarnya merupakan pusat kegiatan dalam lingkup wilayah yang lebih luas. Peranan kota sebagai pusat kegiatan dalam suatu wilayah – nasional maupun lokal telah banyak ditunjukkan dalam berbagai literatur Barat yang pada intinya menyimpulkan bahwa kota berperan sebagai pusat industri manufaktur, atau sebagai pusat kegiatan pelayanan.

Pada tingkat nasional, kota-kota merupakan bagian dari sistem kompleks dari lokasi-lokasi perkotaan yang saling berhubungan dan merupakan elemen kunci dalam organisasi ekonomi, sosial, dan politik pada wilayah dan negara. Ketergantungan antara kota-kota membuatnya penting untuk melihat negara sebagai sebuah sistem lokasi-lokasi perkotaan dibandingkan dengan serangkaian permukiman yang berdiri sendiri. Konsep sistem perkotaan mengacu pada serangkaian kota yang saling terkait dalam arti perubahan dalam penduduk, vitalitas ekonomi, pekerjaan, atau pembagian jasa yang dialami oleh satu kota akan memiliki dampak terhadap kota yang lain.

Sistem kota-kota terbentuk karena adanya keterkaitan antara satu kota dengan kota yang lain, baik secara spasial maupun fungsional. Suatu kota mempunyai potensi untuk membentuk suatu sistem dengan kota-kota lain karena tersedianya infrastruktur, faktor lokasi, dan penduduk. Dalam sistem kota-kota, terdapat banyak kota yang saling berkaitan secara fungsional, yang antara lain digambarkan oleh orientasi pemasaran geografis. Keterkaitan antar kota dalam suatu sistem kota-kota terjadi karena terdapat kota sebagai pusat koleksi/distribusi komoditas dan kota sebagai node yang ukurannya

berbeda-beda tergantung jumlah penduduk, fungsi dan hierarkinya. Peran penting yang diemban oleh interaksi atau keterkaitan antar kota adalah : (1) mewujudkan integrasi spasial, karena manusia dan kegiatannya terpisah-pisah dalam ruang, sehingga interaksi ini penting untuk mengkaitkannya; (2) memungkinkan adanya diferensiasi dan spesialisasi dalam Sistem perkotaan; (3) sebagai wahana untuk pengorganisasian kegiatan dalam ruang; dan (4) memfasilitasi serta menyalurkan perubahan-perubahan dari satu simpul ke simpul lainnya dalam sistem (Soegijoko, 2005: 22).

Sistem kota-kota dapat mempunyai cakupan global membentuk suatu *global urban system* atau *international urban system*. Sistem kota-kota ini juga dapat memiliki cakupan nasional atau subnasional, membentuk sistem kota-kota/perkotaan nasional atau subnasional. Di Indonesia, sistem perkotaan dapat dalam lingkup satu pulau atau provinsi merupakan suatu sistem subnasional. Bila cakupannya adalah kabupaten, maka dikenal sebagai sistem perkotaan lokal. Pada tingkat yang lebih rendah, terkadang meliputi kawasan sekitar kota (*functional urban areas*) dan terdapat hubungan atau keterkaitan di dalamnya yang tercermin dalam kegiatan aliran.

Aliran-aliran atau *flows* dapat berupa penyebaran inovasi; pergerakan penduduk berupa perjalanan, atau berupa migrasi; aliran modal baik berupa asset yang *tangible* (mesin, peralatan), yang tidak *tangible* (sertifikat, surat berharga lainnya), dan aliran modal berupa sumberdaya manusia; serta aliran informasi. Aliran barang dan manusia dapat melalui jaringan perhubungan udara, laut, dan darat.

Permukiman ada karena beberapa aktivitas tertentu dapat berjalan lebih efisien jika tercluster secara bersama jika dibandingkan dengan jika terpencar. Penelaahan terhadap peta memperlihatkan pola permukiman pada bagian wilayah biasanya terpisah ke dalam tiga elemen komponen yang merefleksikan yang menggambarkan perbedaan fungsi perkotaan:

- a. Sebuah pola linier terdiri dari pusat transportasi menampilkan pelayanan '*break of bulk*' atau '*break in transportation*';
- b. Sebuah pola *cluster* terdiri dari tempat-tempat yang menampilkan aktivitas spesial seperti pertambangan; dan

- c. Sebuah pola seragam terdiri dari tempat-tempat yang fungsi utamanya adalah untuk menyediakan serangkaian barang dan jasa untuk areal sekitarnya dan membutuhkan akses kepada penduduk yang menggunakan barang atau jasanya.

Perkembangan sistem perkotaan sangat dipengaruhi oleh kekuatan pasar. Sehingga kemampuan kota untuk berkembang akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kota tersebut dalam memproduksi barang dan pelayanan perkotaan. Kota dengan kemampuan menarik penduduk yang besar akan memiliki perkembangan yang lebih cepat daripada kota lainnya (Firman, 2000). Kota-kota merupakan simpul-simpul dalam jaringan sistem perkotaan, sedangkan jaringan infrastruktur merupakan jejaringnya (*network*). Konsep sistem perkotaan, sistem kota-kota, atau sistem permukiman marak dan berkembang pada dekade 1960-an sampai dengan 1970-an dimulai dengan teori Walter Christaller dengan *Central place Theory* diikuti dengan *Growth Pole Theory* nya Perroux. Konsep-konsep ini merupakan dasar dari konsep tentang peranan kota dalam pembangunan nasional di dekade 1970-an.

Di Indonesia, *National Urban Development Strategies* (NUDS, 1985) telah mengidentifikasi empat fungsi dasar kota/perkotaan, yaitu : *Hinterland Services*, *Interregional communication*, *Goods processing (manufacturing)*, dan *Residential subcenters*. Strategi NUDS basisnya adalah Sistem Kota-Kota melalui hirarkinya, yang terdiri dari : *National Development Center* (NDC), *Inter-regional Development Center* (IRDC), *Regional Development Center* (RDC), dan *Local Development Center* (LDC). Sedangkan berdasarkan fungsinya dalam sistem perkotaan seperti diarahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, kota-kota di Indonesia terdiri dari: Pusat Kegiatan Nasional (PKN); Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Secara nasional, berdasarkan RTRWN, pengembangan sistem permukiman perkotaan nasional diindikasikan dengan mengembangkan sistem pusat permukiman perkotaan yang dikenal dengan kota Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang saling terkait secara hirarki. Dengan sistem pusat permukiman perkotaan ini dikembangkan sistem jaringan transportasi dan sistem jaringan infrastruktur wilayah lainnya sehingga membentuk struktur ruang wilayah nasional yang efisien.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

2.4.3 Teori Struktur Ruang Perkotaan

Yang menjadi fokus dalam struktur ruang perkotaan adalah unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota atau kawasan perkotaan, yang terdiri dari pusat kegiatan/pelayanan, kawasan fungsional perkotaan, dan jaringan jalan. Kota merupakan suatu sistem yang kompleks karena struktur dan pola ruang kota merupakan suatu produk sekaligus proses dari perkembangan kota yang berlangsung lama, baik direncanakan maupun tidak.

Secara konseptual, unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota telah dikemukakan oleh banyak pakar. Menurut Doxiadis, perkotaan atau permukiman kota merupakan totalitas lingkungan yang terbentuk oleh 5 unsur, yakni Alam (Nature), Individu manusia (Antropos), Masyarakat (Society), Ruang kehidupan (Shells), dan Jaringan (Network)⁴. Dalam perspektif yang berbeda, menurut Patrick Geddes, karakteristik permukiman sebagai suatu kawasan memiliki unsur: Place (tempat tinggal); Work (tempat kerja); Folk (tempat bermasyarakat). Kus Hadinoto (1970-an) mengadaptasinya menjadi 5 unsur pokok, yaitu : Wisma, tempat tinggal (perumahan); Karya: tempat bekerja (kegiatan usaha); Marga, jaringan pergerakan, jalan; Suka, tempat rekreasi/hiburan; dan Penyempurna, prasarana – sarana.

Kevin Lynch mengungkapkan pula bahwa unsur pembentuk struktur tata ruang kota dapat pula dipahami secara persepsional yang menyatakan sifat suatu objek fisik yang menyebabkan kemungkinan besar membuat citra (image) yang kuat pada setiap orang.

⁴ Doxiadis, Constantinos A. (1968), *Ekistics : An Introduction to the Science of Human Settlements*, London: Anchor Press.

Kevin Lynch menggambarkan bahwa ada lima unsur dalam gambaran mengenai kota: Path, Edge, District, Node, dan Landmark.

Teori-teori yang melandasi struktur ruang kota yang paling dikenal adalah Teori Konsentris (*Concentric Zone Theory*), Teori Sektor (*Sector Theory*) dan Teori Pusat Berganda (*Multiple Nuclei Theory*). Ketiga teori tersebut mengkaji bahwa setiap kota memiliki pusat kota dan biasanya dinamakan Daerah Pusat Kegiatan (DPK) atau *Central Business District (CBD)*. Namun, masing-masing teori menyatakan pengertian yang berlainan mengenai DPK tersebut.

Kota merupakan sistem spasial yang dapat dipandang sebagai wujud struktural dan pola ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang bercirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan-pertanian. Sebagai wujud struktur ruang, kota terdiri dari susunan unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural yang berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang kota.

Selain pusat-pusat pelayanan kegiatan perkotaan dan kawasan fungsional perkotaan, unsur pembentuk struktur ruang kota adalah sistem prasarana dan sarana sebagai kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Secara spesifik prasarana perkotaan yang paling berpengaruh terhadap struktur ruang kota adalah prasarana transportasi, yakni jaringan jalan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan struktur ruang perkotaan mengacu pada Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.5 Teori *Primacy*

Jefferson (1939), mengatakan bahwa sebuah kota utama dalam suatu negara besarnya selalu tidak proporsional. Sebuah kota dikatakan sebagai kota *primate* jika paling tidak, minimal 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kota terbesar berikutnya dan umumnya lebih dari 2 kalinya. Ahli geografi Mark Jefferson mengembangkan hukum *primate city* untuk menjelaskan fenomena kota-kota besar yang menggambarkan proporsi besar dari penduduk seperti aktivitas ekonominya.

Menurut Mark Jefferson, di dunia ini berlaku Hukum Ibukota, bahwa kota terbesar merupakan kota terunggul, tidak hanya dalam ukuran tetapi juga dalam pengaruhnya. Kota *primate* ini sering terjadi, tetapi tidak selalu, merupakan ibukota negara. Jefferson mengatakan berlakunya "*The Law of the Primate City*". Di seluruh dunia, kota *primate* biasanya merupakan ibukota, tempat berkumpulnya barang-barang terbaik, talenta terbesar, dan pekerja terampil, serta pusat-pusat budaya nasional, kebanggaan dan pengaruh.

Namun, manfaat aglomerasi penduduk tersebut juga mengakibatkan biaya yang harus ditanggung dari *urban primacy*, misalnya para pekerja yang harus tinggal dalam permukiman yang padat, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, dan kemungkinan terkena penyakit yang lebih tinggi.

Galiani (2008) mengatakan bahwa banyak kota *primate* terutama di negara-negara berkembang, terlalu besar dan tidak efisien serta disebabkan oleh favoritisme politik. Galiani juga mengungkapkan bahwa *urban primacy* tidak hanya disebabkan oleh ekonomi, tapi juga oleh faktor demografi dan faktor geografi. Sebagai contoh, PDB per kapita dan total populasi meningkatkan *primacy*.

Primate city terkait dengan penilaian *primacy ratio* suatu kota dengan kota lainnya. *Primacy ratio* menunjukkan rasio antara kota pertama dengan kota kedua di suatu negara yang merefleksikan derajat dominasi populasi dari kota/pusat perkotaan terbesar. *Primacy ratio* dikatakan tinggi berarti menunjukkan bahwa kota tersebut unggul/kota utama dan memiliki keunggulan baik dalam populasi, sosial, ekonomi, maupun politik dalam negara tersebut.

Penghitungan indeks *primacy* dilakukan dengan menggunakan rumus bahwa indeks *primacy* merupakan hasil pembagian antara jumlah penduduk perkotaan dari suatu kota dengan jumlah total penduduk perkotaan pada enam kota terbesar di wilayah tersebut.

2.6 Teori Rank Size Rule

Jika dilihat dari cakupan wilayahnya, sistem kota-kota dapat memiliki cakupan nasional maupun subnasional, membentuk sistem kota-kota/perkotaan nasional atau subnasional (provinsi, kabupaten). Terkait dengan hal tersebut, sistem kota-kota memiliki keteraturan antara peringkat dan ukuran kota, yang dikenal sebagai *rank size rule*. Terdapat

perbedaan antara fenomena *rank size rule* dengan fenomena *primate city* yang terjadi terutama di negara-negara berkembang.

Jika berbicara tentang kota dalam dimensi ekonomi, akan berbeda dengan kota dalam dimensi administratif. Kota dalam dimensi ekonomi memberikan konsekuensi batas-batas kota yang dilihat dari aktivitas ekonomi yang ada dan tidak lagi dari batas administrasi pemerintah. Dapat saja terjadi beberapa kota yang berdekatan, dalam dimensi ekonomi merupakan satu kesatuan. Penggunaan dimensi ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi yang digunakan sebagai batas wilayah suatu kota memberikan konsekuensi tersendiri mengenai bentuk struktur distribusi aktivitas ekonomi antarkota tersebut. Permasalahan tentang ukuran distribusi aktivitas ekonomi perkotaan telah menjadi bahan observasi dari para peneliti, hingga muncul rumusan dari Zipf (1949) yang menyimpulkan bahwa ukuran distribusi aktivitas ekonomi suatu kota akan mengikuti distribusi Pareto, sekaligus memiliki bentuk parameter tertentu (Hukum Zipf). Hukum Zipf inilah yang menjadi dasar *Rank size rule*, yaitu sebuah aturan yang digunakan untuk melihat proporsi distribusi aktivitas ekonomi perkotaan.

Inti gagasan dari *Rank size rule* yaitu secara rata-rata, jumlah penduduk atau tingkat populasi yang ada di suatu kota, jika dikalikan dengan peringkat kota tersebut dalam hirarki aktivitas ekonomi perkotaan di suatu Negara adalah sama dengan jumlah populasi yang ada di kota terbesar. Artinya, jika kita mengalikan jumlah penduduk yang ada di kota Pare-pare (misalnya) dengan peringkatnya dalam hirarki aktivitas ekonomi perkotaan di Indonesia, akan sama dengan jumlah penduduk di Kota Jakarta yang merupakan kota terbesar di Indonesia.

Rank size rule bermula dari rumusan karya Zipf (1949) yang menyatakan bahwa ukuran distribusi aktivitas ekonomi dari suatu kota akan mengikuti distribusi Pareto, sekaligus juga memiliki bentuk parameter tertentu (dikenal sebagai Hukum Zipf). Hukum Zipf ini yang menjadi dasar dari *Rank size rule*, sebuah aturan yang jamak digunakan jika ingin melihat proporsi distribusi aktivitas ekonomi perkotaan.

Jika dituliskan dalam rumus matematis, maka secara garis besar inti gagasan *Rank size rule* adalah:

Rank = Peringkat kota berdasarkan jumlah penduduk (terbanyak = 1, dst)

C = Konstanta

N = Jumlah penduduk

Mengacu pada teori yang dikemukakan sebelumnya, bahwa *Rank size rule* ini merupakan aturan yang digunakan untuk menganalisa proporsi distribusi dari aktivitas ekonomi perkotaan.

2.7 Teori Pusat Pertumbuhan

Dikenal pula dengan teori kutub pertumbuhan (*growth pole* atau *pole de croissance*). Teori ini pertama kali dilontarkan oleh Francois Perroux, seorang ahli ekonomi Perancis. Beliau mengemukakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi di semua wilayah tetapi terbatas hanya pada beberapa tempat tertentu dengan variabel yang berbeda-beda intensitasnya.

Mengikuti pendapat dari Perroux tersebut, Hisrichman mengemukakan pula bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat ekonomi dalam wilayah suatu Negara, atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point* atau *growth pole*). Konsep pusat pertumbuhan telah dipakai oleh banyak Negara. Di Perancis, konsep ini mendapat perhatian yang lebih besar jika dibandingkan dengan Negara-negara lainnya.

Menurut Perroux, terdapat elemen yang sangat menentukan dalam konsep pusat pertumbuhan, yaitu pengaruh yang tidak dapat dihindari dari suatu unit ekonomi terhadap unit-unit ekonomi lainnya. Pengaruh tersebut semata adalah dominasi ekonomi yang terlepas dari pengaruh tata ruang geografis dan dimensi tata ruang (*geographic space and space dimension*). Perusahaan-perusahaan yang menguasai dominasi ekonomi tersebut pada umumnya adalah industri besar yang mempunyai kedudukan oligopolistic dan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kegiatan para konsumennya.

Pandangan Perroux mengenai proses pertumbuhan konsisten dengan teori tata ruang ekonomi (*economic space theory*), dengan industri pendorong (*propulsive industries* atau *industries motrice*) dianggap sebagai titik awal dan merupakan elemen esensial untuk pembangunan selanjutnya. Perroux lebih menekankan pada aspek pemusatan pertumbuhan (Adisasmitha, 2005:61).

Pada tahun 1950-an, muncul teori-teori yang menyatakan pentingnya peranan pusat-pusat pertumbuhan/pembangunan, antara lain: (Adisasmita, 2005:65)

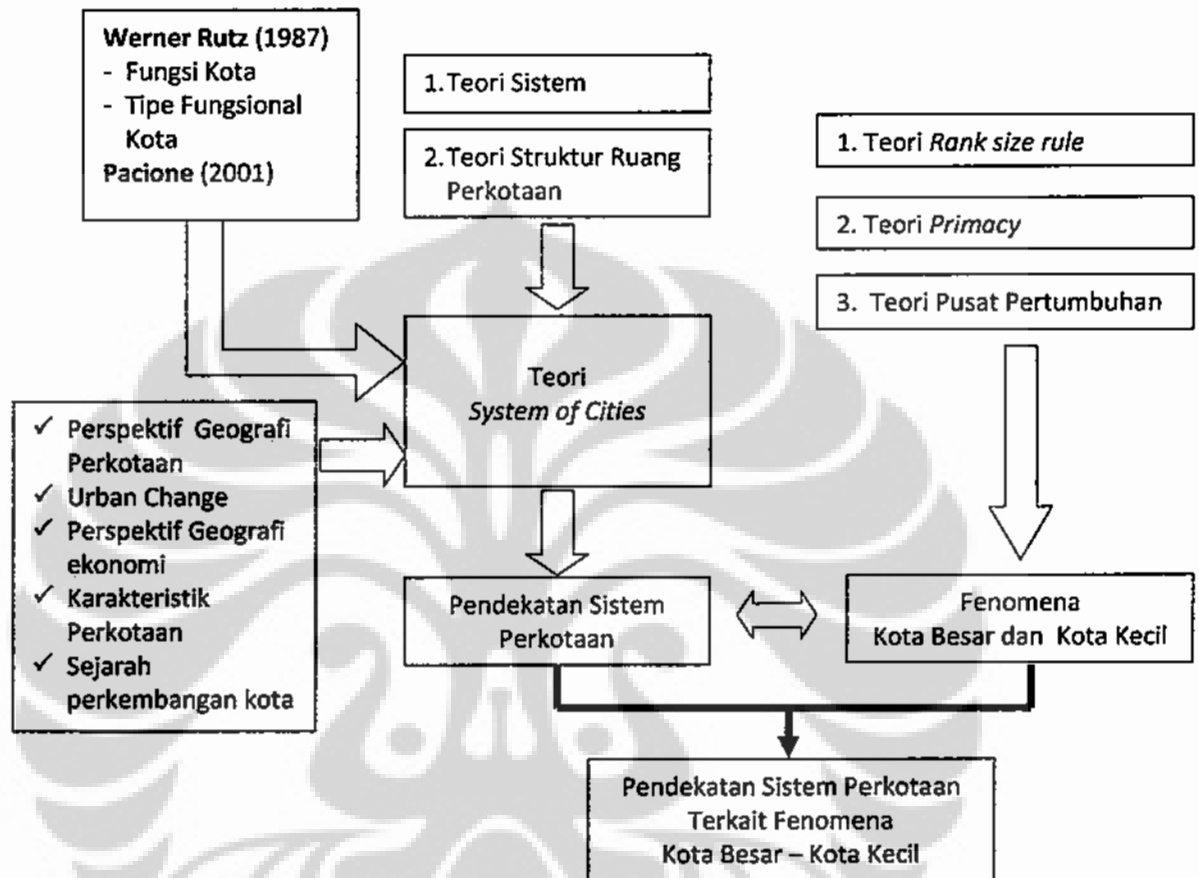
- a. Teori kutub pertumbuhan (*growth pole theory*) yang diperkenalkan oleh Francois Perroux;
- b. Teori kutub pertumbuhan yang terlokalisasi (*localized development pole theory*) yang dilontarkan oleh Boudeville;
- c. Teori titik pertumbuhan (*growth point theory*) yang dikemukakan oleh Albert Hirschman.

Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama dan lokomotif pertumbuhan yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunan dan dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruhnya. Dalam hubungan dengan penyebaran dampak pertumbuhan ke wilayah pengaruh di sekitarnya, Albert Hirschman memperkenalkan istilah *trickling down effect* (dampak tetesan ke bawah).

Pengalaman selama ini, teori kutub pertumbuhan dianggap gagal karena tidak berhasil membuktikan terjadinya dampak *trickling down effect* karena pusat pertumbuhan yang umumnya adalah kota-kota besar ternyata sebagai pusat konsentrasi penduduk dan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial cukup kuat, sehingga terjadi tarikan migrasi dari desa-desa dalam wilayah pengaruh ke pusat pertumbuhan (kota besar) dan terjadi dampak polarisasi. Dampak polarisasi ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan dampak tetesan ke bawah.

Kerangka Teori

Gambar 2.2
Kerangka Teori



2.8 Hipotesis

Hipotesis penelitian yang akan diangkat dalam penelitian, yaitu :

Pendekatan sistem perkotaan dalam penyusunan suatu rencana tata ruang memiliki kaitan dengan tingginya tingkat primacy kota dan semakin lebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Disain Penelitian

Metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kuantitatif. Metodologi penelitian kuantitatif didasari oleh perspektif *post-positivism*, yang mengemukakan bahwa fenomena dapat dijelaskan dengan menggunakan sekumpulan faktor yang mewakili fenomena dan faktor sebab menentukan/mempengaruhi faktor akibat dari fenomena tersebut (Creswell, 2003). Dalam penelitian kuantitatif, hal penting untuk dicatat adalah peneliti “terpisah” dari subjek yang ditelitinya (Somantri, 2005).

Metodologi kuantitatif berakar pada paradigma tradisional, postpositivistik, eksperimental atau empiricist. Metodologi ini berkembang dari tradisi pemikiran empiris Comte, Mill, Durkeim, Newton, dan John Locke. “Gaya” penelitian kuantitatif biasanya mengukur fakta objektif melalui konsep yang diturunkan pada variabel-variabel dan dijabarkan pada indikator-indikator dengan memperhatikan aspek reliabilitas. Untuk melihat kondisi eksisting sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan, saya menggunakan 5 variabel yang masing-masing dijabarkan ke dalam indikator-indikator. Kelima variabel tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Michael Pacione (2001) tentang karakteristik perkotaan.

Penelitian kuantitatif bersifat bebas nilai dan konteks, mempunyai banyak “kasus” dan subjek yang diteliti, sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk data statistik yang berarti. Dalam penelitian ini saya meneliti 2 subyek, yaitu tentang fenomena *primacy* di Provinsi Sulawesi Selatan (menghitung indeks *primacy* dan mengkaji faktor-faktor penyebab *primacy*) dan sistem perkotaan. Selanjutnya, saya mencoba melihat hubungan di antara keduanya.

Selain itu, John W. Creswell (2003) juga menambahkan dua perspektif lain, yaitu pragmatism dan *advocacy/participatory*. Pragmatism beranggapan yang paling penting adalah pemahaman terhadap permasalahan atau mengetahui solusi permasalahan dan

metode apa saja dapat digunakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Perspektif ini mendasari penelitian pragmatis (Creswell, 2003:11-13).

John Creswell memiliki beberapa dimensi asumsi paradigmatik yang membedakan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Dimensi-dimensi tersebut mencakup ontologis, epistemologis, aksiologis, serta metodologis. Secara ontologis, peneliti kuantitatif memandang realitas sebagai "objektif" dan dalam kacamata "out there" serta independen dari dirinya. Saya melakukan penelitian tentang sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan secara ontologis memandang realitas kota besar dan kota kecil yang ada secara objektif dan independen.

Secara epistemologis, peneliti kuantitatif bersikap independen dan menjaga jarak (*detachment*) dengan realitas yang diteliti. Secara retorik atau penggunaan bahasa, penelitian kuantitatif biasanya menggunakan bahasa-bahasa penelitian yang bersifat formal dan impersonal melalui angka atau data-data statistik. Penelitian ini juga banyak menggunakan data-data berupa angka yang bersumber dari hasil survei sekunder. Terutama yang berasal dari masing-masing data Kabupaten Dalam Angka.

Terminologi atau konsep-konsep yang sering ditemukan dalam penelitian kuantitatif misalnya "*relationship*" dan "*comparison*". Secara metodologis, penelitian kuantitatif lekat dengan penggunaan logika deduktif, yaitu teori dan hipotesis diuji dalam logika sebab akibat. Desain yang bersifat statis digunakan melalui penetapan konsep-konsep, variabel penelitian, serta hipotesis. Penelitian ini untuk mengkaji hubungan/keterkaitan antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil.

Ciri khas dari penelitian kuantitatif adalah penggunaan beberapa faktor yang dianggap mewakili atau menjelaskan fenomena (reduksionis) dan pencarian hubungan non kausal atau kausal antar faktor tersebut (deterministik). Oleh karena itu, pada penelitian kuantitatif, pengumpulan data hanya dilaksanakan pada faktor yang dianggap mewakili atau menjelaskan fenomena dan sebagai konsekuensinya data yang dikumpulkan tersebut akan membatasi kemungkinan temuan analisis. Lingkup temuan analisis dibatasi oleh data yang dikumpulkan tetapi temuan penelitian itu sendiri tergantung pada jenis analisis yang digunakan. Jadi penelitian kuantitatif tidak mungkin direncanakan tanpa perencanaan pengumpulan lingkup dan jenis data, serta jenis analisis kuantitatif yang akan digunakan.

Penelitian yang saya lakukan memfokuskan pada penelaahan terhadap pendekatan sistem perkotaan dalam penyusunan suatu rencana tata ruang wilayah terkait dengan fenomena kota besar dan kota kecil. Wilayah penelitian mencakup seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang salah satu tujuannya yaitu untuk membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan..

3.2. Pemilihan Lokasi Penelitian

Penelitian mengambil lokasi penelitian di Provinsi Sulawesi Selatan dengan unit analisis kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat beberapa alasan pemilihan Sulawesi Selatan sebagai lokasi penelitian, yaitu:

- Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dapat dikatakan sebagai kota multifungsi karena seluruh fasilitas pelayanan yang ada dalam menunjang aktivitas ekonominya ada di Kota Makassar dalam jumlah dan kelengkapan yang sangat memadai. Kota Makassar yang begitu besar, mengindikasikan potensi *primacy* yang cukup tinggi untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota yang besar. Terdapat 24 Kabupaten/Kota, terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kota yang berada di dalam wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian mengambil wilayah dengan jumlah Kabupaten/Kota yang relatif besar dengan tujuan agar dapat melihat dan mengkaji ulang sistem perkotaan yang ada dengan lebih jelas.
- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstelasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, khususnya di bidang Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata, Provinsi Sulawesi Selatan letaknya juga strategis, yaitu berada di tengah-tengah Indonesia.
- Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah memiliki dan menetapkan sistem perkotaan yang baru dalam Perdanya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang melalui Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga dapat dibandingkan dengan sistem perkotaan yang lama yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan sebelumnya, yaitu dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3. Unit Analisis

Unit analisis yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan, yaitu seluruh kecamatan yang terdapat dalam seluruh wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 304 kecamatan yang tersebar pada 21 Kabupaten dan 3 Kotamadya di Provinsi Sulawesi Selatan.

3.4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan menentukan jenis analisis yang akan digunakan. Dalam analisis kuantitatif, jenis data dikelompokkan menjadi tiga, yaitu nominal, ordinal, dan continuous. Data nominal merupakan data kategori, seperti nama ibukota kecamatan, status administratif dari masing-masing kelurahan/desa. Data kategori dapat berupa angka numerik coding dari kategori atau teks (kata-kata) yang menjadi indikator dari kategori. Data ordinal merupakan data urutan atau data yang memiliki rangking. Data continuous merupakan data interval dan rasio. Data interval adalah data yang memiliki peringkat, misalnya jika angka semakin besar semakin baik, semakin tinggi, dan seterusnya.

Sumber data adalah subyek untuk memperoleh data penelitian. Sumber data dapat berupa 3p, yaitu *person* (orang), *place* (tempat), atau *paper* (simbol). Sumber data berupa *place* (tempat) terdiri dari sumber data yang bersifat diam (ruangan, kelengkapan alat, dan wujud benda) atau sumber data yang bersifat bergerak (aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, kegiatan demonstrasi). Sumber data berupa *paper* (simbol) merupakan sumber data tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol lain di kertas, batu, kayu, tulang, atau daun lontar). Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa *place* (tempat), yaitu berupa kota-kota kecamatan, dan *paper* (simbol), yaitu berupa data-data huruf yang berasal dari tulisan atau laporan, serta angka yang berasal Kabupaten Dalam Angka untuk kecamatan-kecamatan yang menjadi unit analisis.

Tabel 3.1
Data, Sumber Data, dan Kegunaan

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Kegunaan
1.	Geografi	- Lokasi (letak), luas wilayah, status wilayah (Desa/Kelurahan), jarak terhadap pusat pertumbuhan (Kabupaten)	- Kabupaten Dalam Angka - Sulawesi Dalam Angka	Deskripsi kondisi geografi wilayah, bahan analisis lanjutan (kepadatan, karakteristik kota)
2.	Sejarah	- Sejarah perkembangan kota-kota di Provinsi Sulawesi Selatan	- Situs-situs resmi dari masing-masing Kabupaten/Kota di Prov. Sulawesi Selatan	Analisis lokasi-lokasi yang memiliki catatan sejarah sebagai pusat perkembangan sebagai potensi
3.	Demografi	- Jumlah Penduduk pada masing-masing kecamatan, kabupaten, provinsi - Kepadatan Penduduk	- Kabupaten Dalam Angka - Sulawesi Dalam Angka	Analisis <i>city size distribution</i> , analisis <i>rank size rule</i> , analisis <i>primacy</i> dengan menggunakan indeks <i>primacy</i>
4.	Karakteristik kota			
a.	Penduduk dan Status wilayah	- Jumlah Penduduk pada masing-masing kecamatan - Kepadatan Penduduk - Status Wilayah (Desa/Kelurahan)	- Kabupaten Dalam Angka - Sulawesi Dalam Angka	Analisis sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan
b.	Fasilitas Pendidikan	- Data jumlah fasilitas pendidikan pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenjangnya (TK, SD, SLTP, SLTA, Univ.).	- Kabupaten Dalam Angka	

No.	Variabel	Indikator	Sumber Data	Kegunaan
c.	Fasilitas Kesehatan	- Data jumlah fasilitas kesehatan pada masing-masing kecamatan berdasarkan jenjangnya (RS, Puskesmas, Puskesmas Pembantu).	- Kabupaten Dalam Angka	
d.	Perdagangan	- Data jumlah KUD dan non KUD pada tiap-tiap kecamatan - Data posisi nilai usaha Mikro, Kecil dan Menengah tiap kecamatan	- Kabupaten Dalam Angka - Statistik ekonomi keuangan daerah Prov. Sulawesi Selatan	
e.	PDRB	- Kontribusi PDRB masing masing Kabupaten tahun 2005 dan tahun 2009	- Data PDRB dalam Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota Prov. Sulawesi Selatan	
5.	Sistem Perkotaan dalam Perda No. 44 tahun 2001 dan Perda No. 9 Tahun 2009	- Sistem Perkotaan	- Perda No. 44 tahun 2001 dan Perda No. 9 Tahun 2009	Analisis sistem perkotaan yang tertuang dalam Perda
6.	Indikasi Program	- Indikasi Program yang tercantum dalam RTRW	- RTRW Provinsi Sulawesi Selatan	Analisis indikasi program dan sistem perkotaan

3.5. Populasi

Penelitian ini tidak menggunakan sampel namun menggunakan populasi sebagai subjek penelitian, yaitu seluruh kecamatan yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota, terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 Kotamadya, yang ada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat 304 kecamatan yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan populasi sebagai subjek penelitian agar hasil penelitian dapat berlaku untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Kajian Literatur

Selain untuk membuktikan hipotesis yang dijadikan landasan penelitian, kajian literatur diperlukan untuk mengetahui kelayakan pendekatan sistem perkotaan yang digunakan dalam penyusunan rencana tata ruang. Teori difokuskan pada teori-teori yang memiliki keterkaitan kuat dengan pendekatan sistem perkotaan dan fenomena kota besar dan kota kecil. Meliputi teori-teori tentang perencanaan perkotaan, teori *system of cities*, teori *rank size rule*, dan beberapa teori pendukung yang lainnya.

Selain itu dilakukan pula penelaahan terhadap dokumen-dokumen maupun peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan rencana struktur ruang wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen-dokumen tersebut berupa dokumen materi teknis RTRW Provinsi dan peraturan-peraturan daerah tentang RTRW Provinsi. Akan dilakukan *content analysis* terhadap materi teknis maupun Perda RTRW, terutama pada bagian rencana struktur ruang Provinsi dan indikasi program utama lima tahunan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

b. Kajian data sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari masing-masing buku Kabupaten Dalam Angka Tahun 2010. Data-data tersebut dibutuhkan untuk menganalisis rank size rule dan indeks primacy di Provinsi Sulawesi Selatan serta menganalisis kondisi eksisting sistem perkotaan yang ada. Analisis tersebut dibutuhkan untuk membuktikan

adanya fenomena kota besar dan kota kecil di antara kota-kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian tentang Keterkaitan Pendekatan Sistem Perkotaan dengan Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan populasi sebagai sumber data dan tidak menggunakan metode penyebaran kuesioner sebagai metode pengumpulan data.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa disain pengumpulan data berdasarkan frekwensi pengambilan data:

1. Studi satu tahap

- Seluruh data dikumpulkan pada satu waktu.

Disain pengumpulan data ini dilakukan untuk pengambilan data masing-masing Kabupaten Dalam Angka, data Sulawesi Selatan Dalam Angka, materi teknis RTRW maupun Raperda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi studi kasus.

2. Studi cross sectional

- Data tentang beberapa subyek pada beberapa waktu tertentu dikumpulkan sekaligus.

Disain pengumpulan data ini dilakukan untuk pengambilan data time series untuk masing-masing kecamatan di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang dibutuhkan berupa data time series namun pengambilan data dapat dilakukan sekaligus dalam satu waktu.

Selain itu, dibutuhkan pula data kependudukan dan luas wilayah, ketersediaan fasilitas, perdagangan, dan PDRB sebagai salah satu indikator besaran kota.

3.7. Penetapan Indikator dan Variabel

3.7.1. Indikator dan Variabel *Primacy* dan *Rank Size Rule*

Untuk menghitung indeks *primacy* dan *rank size rule* digunakan variabel penduduk dengan indikator jumlah penduduk untuk masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 3.2
Variabel Pendukung *Primacy* dan *Rank Size Rule*
Yang Digunakan dalam Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Penduduk kabupaten/kota	- Jumlah Penduduk wilayah administratif kabupaten/kota
2.	Penduduk kawasan perkotaan dalam kabupaten/kota	- Jumlah penduduk kawasan perkotaan dalam kabupaten/kota
3.	Penduduk kawasan perkotaan lintas kabupaten/kota	- Jumlah penduduk kawasan perkotaan lintas kabupaten/kota

3.7.2. Indikator dan Variabel Karakteristik Kota

Menurut Pacione (2001), untuk mendefinisikan '*urban*' (perkotaan), akan sangat berguna jika kita membedakan antara perkotaan sebagai kesatuan (*urban as an entity*) dan perkotaan dari sisi kualitasnya (*urban as a quality*). Ini akan membantu untuk memahami kehidupan perkotaan dan memperkaya pendekatan kita terhadap studi tentang kota-kota.

Urban as an entity memiliki empat metode utama dalam mengidentifikasi '*urban place*', yaitu:

a. *Population Size*

Dalam penelitian ini, saya menggunakan ukuran jumlah penduduk sebagai salah satu variabel, namun juga menambahkan variabel kepadatan penduduk. Tiap negara memiliki ambang batas minimal penduduk untuk disebut sebagai perkotaan yang berbeda tergantung pada konteks sosialnya.

b. *Economic Base*

Menurut Pacione, faktor ekonomi merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam perubahan perkotaan. Pada beberapa negara, jumlah penduduk dikombinasikan dengan kriteria ini untuk mendefinisikan '*urban place*'. Dalam

penelitian ini saya menggunakan variabel PDRB untuk memberikan gambaran ekonomi di suatu wilayah. Selain itu, digunakan pula variabel perdagangan berupa nilai usaha mikro, kecil, dan menengah.

c. *Administrative Criteria*

Mayoritas kota di dunia didefinisikan menurut kriteria administratif dan hukum. Demikian pula halnya dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam penelitian ini digunakan pula variabel persentasi jumlah kelurahan yang ada dalam kecamatan yang bersangkutan.

d. *Functional Definition*

Membagi kota menurut fungsi wilayah perkotaannya yang merefleksikan pengaruh perkotaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini saya menggunakan variabel jumlah fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan sebagai variabel untuk mendekati wilayah perkotaan dari sisi fungsi.

Urban as a Quality berlainan dengan definisi kota sebagai kesatuan fisik (*urban as an entity*), konsep *urban as a quality*, lebih berkaitan dengan arti '*urban places*' dan pengaruh atmosfir perkotaan (*urban milieu*) pada gaya hidup masyarakat. Meskipun kota ada sebagai objek fisik, tapi secara jelas juga disediakan oleh para penghuninya. Untuk itu sangat beralasan untuk memikirkan kota yang memiliki baik struktur fisik objektif dan struktur subjektif. Dalam menginterpretasikan kembali arti '*urban*' (perkotaan), Harvey dan Castells dalam Pacione (2001) menyimpulkan bahwa ketika *urbanism* sebagai *a way of life* memiliki struktur dan karakter yang berbeda, itu ada dalam kerangka yang lebih besar yang dibuat dengan kekuatan kapitalisme. Ini artinya gaya hidup perkotaan dapat menyebar di luar batas fisik suatu kota. Mengenali suatu kota dari sudut *urban as a quality* agak sulit karena *urbanism* di Indonesia belum mencakup *a way of life* tapi masih merupakan *pseudo urbanism*, urbanisasi semu. Masih banyak orang-orang yang tinggal di kota namun masih menganut budaya "kampung".

Tabel 3.3
Variabel Pendukung Karakteristik Kota
Yang Digunakan dalam Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Kontribusi Terhadap <i>Score Akhir</i>
1.	Penduduk dan Status Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penduduk - Kepadatan Penduduk - Status wilayah (% jumlah kelurahan dalam kecamatan) 	0.2
2.	Fasilitas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah TK - Jumlah SD - Jumlah SLTP - Jumlah SLTA - Jumlah Universitas 	0.2
3.	Fasilitas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas - Jumlah Puskesmas Pembantu 	0.2
4.	Usaha dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah KUD - Jumlah non KUD - Nilai usaha Mikro, Kecil dan Menengah 	0.2
5.	PDRB	<ul style="list-style-type: none"> - Kontribusi PDRB terhadap PDRB Provinsi tahun 2005 - Kontribusi PDRB terhadap PDRB Provinsi tahun 2009 	0.2

3.7.3. Indikator dan Variabel Keterkaitan Sistem Perkotaan dan Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil

Untuk melihat keterkaitan antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil (*primacy*) digunakan metode korelasi

Tabel 3.4
Variabel Pendukung Keterkaitan Sistem Perkotaan dan
Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil
Yang Digunakan dalam Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Penduduk kabupaten/kota yang dipakai dalam penghitungan indeks <i>primacy</i>	- Jumlah Penduduk kawasan perkotaan dalam kabupaten/kota
2.	Sistem Perkotaan	- Hirarki sistem perkotaan di wilayah penelitian

3.8. Metode Pengukuran dan Penilaian

3.8.1. Pengukuran dan Penilaian Indeks *Primacy*

Penghitungan indeks *primacy* dilakukan dengan menggunakan rumus indeks *primacy*, yaitu merupakan hasil pembagian antara jumlah penduduk perkotaan dari suatu kota dengan jumlah total penduduk perkotaan pada enam kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Pengukuran dan penilaian indeks *primacy* dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Membandingkan secara langsung jumlah penduduk pada 6 kabupaten/kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan;
Yang digunakan adalah data jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten di 6 kabupaten/kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Membandingkan jumlah penduduk pada 6 kawasan perkotaan terbesar di dalam setiap kabupaten/kota;

Untuk memperoleh data jumlah penduduk pada 6 kawasan perkotaan terbesar di dalam setiap kabupaten/kota, dilakukan deliniasi terlebih dahulu terhadap setiap kawasan perkotaan dalam kabupaten/kota.

Deliniasi kawasan perkotaan yang digunakan adalah kawasan perkotaan yang ada dalam wilayah administrasi masing-masing Kabupaten/Kota, bisa terdiri dari 1 atau lebih wilayah administrasi kecamatan. Untuk menetapkan kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten/kota, tetap menggunakan data berdasarkan unit analisis kecamatan karena pertimbangan ketersediaan data. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kawasan perkotaan merupakan kecamatan yang memiliki:

- Persentase jumlah kelurahan: $\geq 50 \%$;
- Kepadatan penduduk: ≥ 500 jiwa/km²;
- Lokasi kecamatan: berdekatan dengan kecamatan lainnya yang merupakan satu kawasan perkotaan.

c. Membandingkan jumlah penduduk pada 6 kawasan perkotaan terbesar lintas kabupaten/kota.

Menggunakan data penduduk kawasan perkotaan Mamminasata, yaitu jumlah penduduk pada kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam kawasan Mamminasata. Yang termasuk ke dalam Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah:

- Seluruh kecamatan di Kota Makassar;
- Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros Baru, Moncongloe, Simbang, Tanra'lili, Tompobulu, dan Turikale di Kabupaten Maros;
- Kecamatan-Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattallassang, Pallangga, Parangloe, dan Somba Opu di Kabupaten Gowa;
- Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Utara, Mangarabombang, Mappakasunggu, Pattallassang, Palombangkeng Selatan, Palombangkeng Utara, dan Sanrobone di Kabupaten Takalar.

Untuk 5 kota yang lainnya menggunakan data jumlah penduduk seperti pada penentuan kawasan perkotaan sebelumnya.

3.8.2. Pengukuran dan Penilaian Sistem Perkotaan

Pengukuran dan penilaian sistem perkotaan dalam penelitian ini menggunakan metode *scoring* (pembobotan). Pembobotan dilakukan pada ke 5 variabel yang telah ditetapkan

sebelumnya, yaitu variabel penduduk, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas perdagangan, dan PDRB.

Klasifikasi Nilai

Klasifikasi nilai masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penduduk dan Status Wilayah:

- Jumlah penduduk:

Tinggi	$= \geq 50.000$ jiwa	= 5
Sedang	$= 25.000 \leq \text{jiwa} < 50.000$	= 3
Rendah	$= < 25.000$ jiwa	= 1
- Kepadatan penduduk:

Tinggi	$= \geq 1000$ jiwa/km ²	= 5
Sedang	$= 300 \leq \text{jiwa/km}^2 < 1000$	= 3
Rendah	$= < 300$ jiwa/km ²	= 1
- Status Wilayah:

Tinggi	$= \geq 50\%$ kelurahan	= 5
Sedang	$= 25\% \leq \text{kelurahan} < 50\%$	= 3
Rendah	$= < 25\%$ kelurahan	= 1

b. Fasilitas Pendidikan:

- Jumlah TK:

Tinggi	$= \geq 50$ TK	= 5
Sedang	$= 25 \leq \text{TK} < 50$	= 3
Rendah	$= < 25$ TK	= 1
- Jumlah SD:

Tinggi	$= \geq 40$ SD	= 5
Sedang	$= 20 \leq \text{SD} < 40$	= 3
Rendah	$= < 20$ SD	= 1
- Jumlah SLTP:

Tinggi	$= \geq 10$ SLTP	= 5
Sedang	$= 5 \leq \text{SLTP} < 10$	= 3
Rendah	$= < 5$ SLTP	= 1
- Jumlah SLTA:

Tinggi	$= \geq 6$ SLTA	= 5
Sedang	$= 3 \leq \text{SLTA} < 6$	= 3
Rendah	$= < 3$ SLTA	= 1
- Jumlah Universitas:

Tinggi	$= \geq 2$ Univ.	= 5
Sedang	$= 1 \leq \text{Univ.} < 2$	= 3
Rendah	$= < 1$ Univ.	= 1

c. Fasilitas Kesehatan:

- Jumlah RS:

Tinggi	$= \geq 2$ RS	= 5
--------	---------------	-----

	Sedang	$= 1 \leq RS < 2$	= 3
	Rendah	$= < 1 RS$	= 1
• Jumlah Puskesmas:	Tinggi	$= \geq 3$ Puskesmas	= 5
	Sedang	$= 1 \leq \text{Puskesmas} < 3$	= 3
	Rendah	$= < 1$ Puskesmas	= 1
• Jumlah Puskesmas Pembantu:	Tinggi	$= \geq 8$ Puskesmas	= 5
	Sedang	$= 5 \leq \text{Puskesmas} < 8$	= 3
	Rendah	$= < 5$ Puskesmas	= 1
d. Fasilitas Usaha dan Perdagangan:			
• Jumlah KUD:	Tinggi	$= \geq 3$ KUD	= 5
	Sedang	$= 2 \leq \text{KUD} < 3$	= 3
	Rendah	$= < 2$ KUD	= 1
• Jumlah non KUD:	Tinggi	$= \geq 40$ non KUD	= 5
	Sedang	$= 10 \leq \text{non KUD} < 40$	= 3
	Rendah	$= < 10$ non KUD	= 1
• Jumlah nilai MKM:	Tinggi	$= \geq \text{Rp. } 2.000.000$ MKM	= 5
	Sedang	$= \text{Rp. } 1.000.000 \leq \text{MKM} < \text{Rp. } 2.000.000$	= 3
	Rendah	$= < \text{Rp. } 1.000.000$	= 1
e. PDRB:			
• Share 2005:	Tinggi	$= \geq 5\%$ PDRB Prov.	= 5
	Sedang	$= 3\% \leq \text{PDRB Prov.} < 5\%$	= 3
	Rendah	$= < 3\%$ PDRB Prov.	= 1
• Share 2005:	Tinggi	$= \geq 5\%$ PDRB Prov.	= 5
	Sedang	$= 3\% \leq \text{PDRB Prov.} < 5\%$	= 3
	Rendah	$= < 3\%$ PDRB Prov.	= 1

Antar Variabel

Pembobotan antar variabel diperlukan untuk mendapat nilai komposit dari seluruh indikator. Nilai skor masing-masing indikator dirata-ratakan sehingga didapat angka skor dari masing-masing variabel. Pembobotan tersebut adalah:

- Variabel Penduduk dan Status Wilayah = 0,2
- Variabel Fasilitas Pendidikan = 0,2

- Variabel Fasilitas Kesehatan = 0,2
- Variabel Fasilitas Perdagangan = 0,2
- Variabel PDRB = 0,2

Analisis dan Penetapan Sistem Perkotaan Eksisting

Penetapan kota-kota dalam sistem perkotaan menggunakan:

- Kota hirarki I = nilai total skor ≥ 4
- Kota hirarki II = $2 \leq$ nilai total skor < 4
- Kota hirarki III = nilai total skor < 2

3.8.3. Pengukuran dan Penilaian Korelasi Sistem Perkotaan dan Indeks *Primacy*

Pengukuran dan penilaian korelasi antara sistem perkotaan dan indeks *primacy* dilakukan untuk menguji hipotesis awal bahwa terdapat keterkaitan antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil. Untuk menilai keterkaitan antara keduanya, digunakan metode korelasi tunggal. Dihitung koefisien korelasi antara variabel jumlah penduduk kawasan perkotaan di masing-masing kabupaten/kota dengan nilai skor dalam sistem perkotaan.

Istilah koefisien korelasi dikenal sebagai nilai hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti. Nilai koefisien korelasi, seperti juga taraf signifikansi, digunakan sebagai pedoman untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak dalam suatu penelitian. Nilai koefisien korelasi bergerak dari nilai negatif ke positif seperti dideskripsikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Deskripsi Nilai Koefisien Korelasi

No.	Nilai Koefisien	Deskripsi
1.	+ 0,70 – ke atas	Hubungan positif yang sangat kuat
2.	+ 0,50 – + 0,69	Hubungan positif yang mantap
3.	+ 0,30 – + 0,49	Hubungan positif yang sedang
4.	+ 0,10 – + 0,29	Hubungan positif yang tidak berarti
5.	0,0	Tidak ada hubungan
6.	- 0,01 – - 0,09	Hubungan negatif yang tidak berarti
7.	- 0,10 – - 0,29	Hubungan negatif yang rendah
8.	- 0,30 – - 0,49	Hubungan negatif yang sedang
9.	- 0,50 – - 0,59	Hubungan negatif yang mantap
10.	- 0,70 – ke bawah	Hubungan negatif yang sangat kuat

Sumber: Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sedangkan untuk menghitung korelasinya digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{N \cdot SD_x \cdot SD_y}$$

Keterangan:

- a. r_{xy} = koefisien korelasi *Product Moment*
- b. $\sum xy$ = jumlah hasil perkalian (*product*) dari x dan y
- c. N = jumlah individu
- d. SD_x = standar deviasi dari variabel x
- e. SD_y = standar deviasi dari variabel y

3.9. Definisi Operasional

Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sistem adalah serangkaian komponen yang bekerja bersama-sama, yaitu antara objek-objek, atribut, dan dihubungkan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh.
- b. Sistem perkotaan adalah serangkaian kota yang saling terkait baik secara spasial maupun fungsional dalam arti perubahan dalam penduduk, vitalitas ekonomi, pekerjaan, atau pembagian jasa yang dialami satu kota akan memiliki dampak terhadap kota lain untuk membentuk suatu sistem dengan kota-kota lain karena tersedianya infrastruktur, faktor lokasi, dan penduduk.
- c. Kota adalah kawasan perkotaan yang berstatus sebagai daerah otonom
- d. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- e. Fenomena adalah fakta, kenyataan, peristiwa sejarah yang tidak dapat diabaikan
- f. Kota *primate* adalah kota yang memiliki indeks *primacy* yang lebih dari dua kali kota terdekat di bawahnya.
- g. Indeks *primacy* adalah hasil pembagian antara jumlah penduduk perkotaan dari suatu kota dengan jumlah total penduduk perkotaan pada enam kota terbesar di wilayah tersebut.

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tinjauan terhadap Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah penelitian. Tinjauan terdiri dari: identifikasi terhadap karakteristik kondisi fisik wilayah, tinjauan perkembangan kota-kota di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi sosial kependudukan, dan gambaran kondisi perekonomian.

4.1. Gambaran Wilayah Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas darat kurang lebih 45.764,53 km². Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 0°12' sampai 8' Lintang Selatan dan 116°48' sampai 122°36' Bujur Timur. Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Makassar memiliki lokasi yang strategis karena dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang merupakan jalur lalu lintas kapal-kapal nasional maupun internasional. Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di provinsi ini, dengan jumlah sungai terbesar ada di bagian utara wilayah provinsi. Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu Danau Matana, Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas wilayah administrasi, yaitu:

Sebelah utara	: Provinsi Sulawesi Barat
Sebelah timur	: Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sebelah barat	: Selat Makassar
Sebelah selatan	: Laut Flores

Sulawesi Selatan memiliki kondisi fisik dan potensi yang sangat beragam. Dengan luas wilayah 45.764,53 km persegi, yang meliputi 20 kabupaten dan 3 kota serta 304 kecamatan, topografi Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, di sebelah selatan terdapat laut Flores, di sebelah barat terdapat selat Makassar dan di sebelah Timur terdapat Teluk Bone. Pulau-pulau tersebar pada perairan tersebut.

Kawasan Sulawesi Selatan juga memiliki sejumlah gunung. Pada perbatasan Kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai dan Bulukumba membentang Gunung Lompobattang dengan

Universitas Indonesia

ketinggian 2.871 meter. Terdapat pula Gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai. Di wilayah Luwu terdapat Gunung Bukit Rantai Kombala dengan ketinggian 3.103 meter, Gunung Kambuno (2.900 meter) dan Gunung Balease (3.016 meter). Pada wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan Enrekang terdapat Gunung Rante Mario dengan ketinggian 3.470 meter dan Gunung Latimojong dengan ketinggian 3.305 meter. Sulawesi Selatan juga ditandai oleh keberadaan bukit Kars di sekitar Kabupaten Pangkep dan Maros.

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang menuju ke Kabupaten Toraja dan menuju ke Kabupaten Mamasa dan Mamuju di Provinsi Sulbar. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya. Selain itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Kabupaten Majene di Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di dua kabupaten ini rawan terhadap bencana Tsunami.

Tabel 4.1

**Nama Ibukota, Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010**

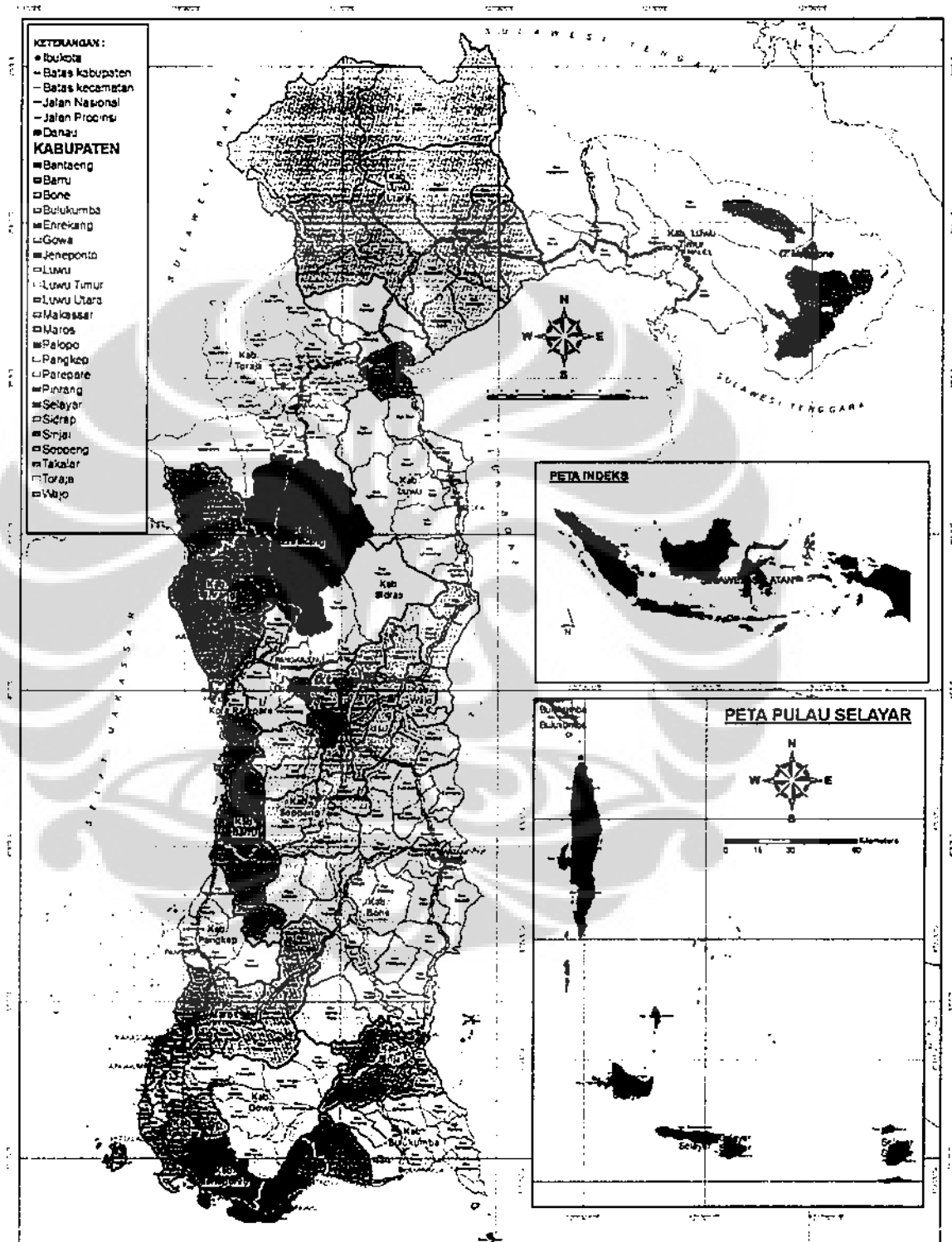
Kab./Kota	Nama Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Banyaknya Kecamatan	Banyaknya Desa	Jarak ke Provinsi (km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	Benteng	903.50	11	74	263
02. Bulukumba	Bulukumba	1,154.67	10	126	153
03. Bantaeng	Bantaeng	395.83	8	67	123
04. Jeneponto	Bontosunggu	903.35	11	113	91
05. Takalar	Pattallasang	566.51	9	83	45
06. Gowa	Sungguminasa	1,883.32	18	167	11
07. Sinjai	Sinjai	819.96	9	80	220
08. Maros	Maros	1,619.12	14	103	30
09. Pangkep	Pangkajene	1,112.29	13	102	51
10. Barru	Barru	1,174.71	7	54	102

Kab./Kota	Nama Ibukota	Luas Wilayah (km ²)	Banyaknya Kecamatan	Banyaknya Desa	Jarak ke Provinsi (km)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Bone	Watampone	4,559.00	27	372	174
12. Soppeng	Watansoppeng	1,359.44	8	70	192
13. Wajo	Sengkang	2,506.20	14	176	242
14. Sidrap	Rappang	1,883.25	11	105	188
15. Pinrang	Pinrang	1,961.17	12	104	182
16. Enrekang	Enrekang	1,786.01	12	129	236
17. Luwu	Belopa	3,000.25	21	227	236
18. Tana Toraja	Makale	2,054.30	19	159	310
19. Luwu Utara	Masamba	7,502.68	11	176	390
20. Luwu Timur	Malili	6,944.88	11	102	450
21. Toraja Utara	Rantepao	1,151.47	21	151	328
21. Makassar	Makassar	175.77	14	143	0
22. Pare-Pare	Pare-Pare	99.33	4	22	155
23. Palopo	Palopo	247.52	9	48	310
Provinsi		45,764.53	304	2,953	

Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka 2009

Kondisi topografi Provinsi Sulawesi Selatan ditandai dengan bentuk wilayah yang datar sampai bergunung dengan rentang yang cukup lebar, mulai dari dataran dengan ketinggian 0 m di atas permukaan laut hingga dataran yang memiliki ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut (dpl). Dataran yang terletak pada ketinggian 1000 m di atas permukaan laut sebagian besar terletak di bagian tengah hingga utara Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: RTRW Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2029

Adapun kondisi topografi Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan kemiringan lereng dikelompokkan atas:

→ Kemiringan 0 – 3 %

Wilayah ini memiliki lahan yang relatif datar yang sebagian besar terletak di kawasan pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah yang memiliki kondisi topografi ini adalah Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Janeponto, Takalar, Gowa, Maros, Makassar, Barru, Pangkep, Parepare, Sinjai, Bone, Wajo, dan Luwu.

→ Kemiringan >3 – 8 %

Wilayah ini memiliki permukaan datar yang relatif bergelombang. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi demikian terdiri dari Kabupaten Soppeng, Enrekang, Sidrap, dan Luwu Utara.

→ Kemiringan >8 – 45 %

Wilayah ini memiliki permukaan yang bergelombang sampai agak curam. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi seperti ini adalah Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, serta sebagian wilayah Maros dan Gowa.

→ Kemiringan > 45 %

Wilayah ini memiliki permukaan curam dan bergunung-gunung. Wilayah yang memiliki karakteristik topografi ini meliputi wilayah-wilayah kaki pegunungan seperti Pegunungan Bawakareng, Latimojong dan Lompobatang.

Lebih jelasnya klasifikasi topografi di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan ketinggian di atas permukaan air laut (dpl), dikelompokkan sebagai berikut:

→ Ketinggian 0 – 100 m dpl

Klasifikasi ketinggian antara 0-100 m dpl pada umumnya Wilayah yang terletak di wilayah pesisir yang meliputi; Makassar, Bulukumba, Bantaeng, Janeponto, Takalar, Gowa, Selayar, Maros, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Parepare, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

➤ Ketinggian 100 – 400 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam daerah dengan ketinggian ini meliputi beberapa kabupaten, yaitu Enrekang, Tana Toraja, Gowa, Maros, Bone, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

➤ Ketinggian 400 – 1000 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini sebagian kecil wilayah Kabupaten Gowa, Janeponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Maros yang merupakan Gunung Lompobatang. Selain itu daerah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini adalah Kabupaten Luwu, Enrekang, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

➤ Ketinggian di atas 1000 m dpl

Wilayah yang termasuk ke dalam klasifikasi ketinggian ini terdiri dari sebagian Kabupaten Bulukumba, Sinjai, Gowa, Maros, Enrekang, Tana Toraja, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

4.2. Kondisi Sosial dan Kependudukan

4.2.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulsel, yaitu dari buku Sulawesi Selatan Dalam Angka 2010, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2005 adalah sebesar 7,487,696 jiwa, kemudian berkembang menjadi 7,908,519 jiwa pada Tahun 2009 atau mengalami penambahan sebesar 420.823 jiwa periode waktu 5 tahun terakhir (2004-2008), atau tumbuh rata-rata sebesar 1,12% pertahun.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2009

Kab./Kota	2005	2006	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kep. Selayar	111,961	115,908	117,860	119,811	121,749
02. Bulukumba	377,471	381,874	386,239	390,543	394,746
03. Bantaeng	168,603	170,049	171,468	172,849	174,176
04. Jeneponto	326,243	328,343	330,379	332,334	334,175
05. Takalar	246,402	249,348	252,270	255,154	257,974
06. Gowa	571,705	583,021	594,423	605,876	617,317
07. Sinjai	218,583	221,064	223,522	225,943	228,304
08. Maros	292,454	296,071	299,662	303,211	306,687
09. Pangkep	284,149	287,838	291,506	295,137	298,701
10. Barru	157,726	159,090	160,428	161,732	162,985
11. Bone	686,603	693,089	699,474	705,717	711,748
12. Soppeng	225,382	226,804	228,181	229,502	230,744
13. Wajo	370,236	373,067	375,833	378,512	381,066
14. Sidrap	244,821	246,816	248,769	250,666	252,483
15. Pinrang	334,459	338,669	342,852	346,988	351,042
16. Enrekang	180,400	182,967	185,527	188,070	190,576
17. Luwu	312,056	316,141	320,205	324,229	328,180
18. Tana Toraja	436,066	444,339	452,663	461,012	240,249
19. Luwu Utara	289,463	297,392	305,468	313,674	321,979
20. Luwu Timur	211,871	218,063	224,383	230,821	237,354
21. Toraja Utara	-	-	-	-	229,090
22. Makassar	1,198,251	1,216,746	1,235,239	1,253,656	1,271,870
23. Pare-Pare	113,696	115,008	116,309	117,591	118,842
24. Palopo	129,095	133,293	137,595	141,996	146,482
Provinsi	7,487,696	7,595,000	7,700,255	7,805,024	7,908,519

Sumber: Sulawesi Dalam Angka 2010

Catatan: Data kosong, belum terbentuk Kabupaten/Kota

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan nasional dengan jumlah penduduk sebesar 1.271.870 jiwa, sedang yang paling rendah adalah di Kabupaten Parepare sebesar 118.842 jiwa pada tahun 2009. Kota Makassar memiliki penduduk 16,08% dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan sedangkan Kota Parepare hanya memiliki penduduk 1,50% dari jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten/kota yang menjadi pusat-pusat kegiatan wilayah seperti Parepare, Barru, Pangkajene, Palopo, Bulukumba, dan Bone (Watampone) memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kota Makassar.

Tabel 4.3

Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan

Kab./Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Rata rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01. Kep. Selayar	0.45	3.53	1.68	1.66	1.62	1.79
02. Bulukumba	0.86	1.17	1.14	1.11	1.08	1.07
03. Bantaeng	0.79	0.86	0.83	0.81	0.77	0.81
04. Jeneponto	-0.38	0.64	0.62	0.59	0.55	0.41
05. Takalar	0.74	1.20	1.17	1.14	1.11	1.07
06. Gowa	1.14	1.98	1.96	1.93	1.89	1.78
07. Sinjai	0.56	1.14	1.11	1.08	1.04	0.99
08. Maros	0.79	1.24	1.21	1.18	1.15	1.11
09. Pangkep	2.50	1.30	1.27	1.25	1.21	1.50
10. Barru	0.03	0.86	0.84	0.81	0.77	0.66
11. Bone	-0.06	0.94	0.92	0.89	0.85	0.71
12. Soppeng	0.09	0.63	0.61	0.58	0.54	0.49
13. Wajo	1.85	0.76	0.74	0.71	0.67	0.95
14. Sidrap	-1.17	0.81	0.79	0.76	0.72	0.38
15. Pinrang	0.11	1.26	1.24	1.21	1.17	1.00
16. Enrekang	0.98	1.42	1.40	1.37	1.33	1.30
17. Luwu	0.80	1.31	1.29	1.26	1.22	1.17
18. Tana Toraja	3.64	1.90	1.87	1.84	-47.89	-7.73
19. Luwu Utara	-39.07	2.74	2.72	2.69	2.65	-5.66
20. Luwu Timur	0.25	2.92	2.90	2.87	2.83	2.35
21. Toraja Utara	-	-	-	-	-	-
22. Makassar	2.91	1.54	1.52	1.49	1.45	1.78
23. Pare-Pare	-1.08	1.15	1.13	1.10	1.06	0.67
24. Palopo	2.67	3.25	3.23	3.20	3.16	3.10
Provinsi	1.47	1.43	1.39	1.36	1.33	1.39

Sumber: Hasil Pengolahan dari Sulawesi Selatan Dalam Angka 2009 dan 2010

Catatan: Data kosong, belum terbentuk Kabupaten/Kota

Yang menarik dari tabel pertumbuhan penduduk di atas adalah angka pertumbuhan rata-rata yang cukup tinggi dimiliki oleh Kota Makassar dan wilayah-wilayah kabupaten yang berada di sekitar Kota Makassar. Kota Makassar (1,78%), Kabupaten Takalar (1,07%), Kabupaten Gowa (1,78%), Kabupaten Maros (1,11), dan Kabupaten Pangkep (1,50%), semuanya memiliki laju pertumbuhan penduduk di atas 1%. Kabupaten Luwu Utara memiliki laju pertumbuhan penduduk -39,07% di tahun 2005 karena pada tahun tersebut, Kabupaten Luwu Utara mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Tana Toraja memiliki laju pertumbuhan -47,89 karena mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Toraja Utara.

4.2.2. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Peta dan tabel pertumbuhan penduduk menunjukkan bahwa distribusi penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum merata. Sebagian besar penduduk masih terkonsentrasi di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas penduduk pada tahun 2009 terkonsentrasi di Kota Makassar dengan proporsi penduduk sebesar 16,06%. Konsentrasi penduduk yang relatif tinggi juga terdapat di Kabupaten Bone dengan proporsi penduduk sebesar 9,04% dari total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan. Distribusi penduduk dengan konsentrasi terendah terdapat di Kabupaten Selayar yang letaknya berada di luar Pulau Sulawesi dengan proporsi 1,53% dari total penduduk.

Tabel 4.4

Kepadatan dan Distribusi Penduduk di Sulawesi Selatan Tahun 2009

Kab./Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Kep. Selayar	121,749	903.50	135	1.54%
02. Bulukumba	394,746	1,154.67	342	4.99%
03. Bantaeng	174,176	395.83	440	2.20%
04. Jenepono	334,175	903.35	370	4.23%
05. Takalar	257,974	566.51	455	3.26%
06. Gowa	617,317	1,883.32	328	7.81%
07. Sinjai	228,304	819.96	278	2.89%
08. Maros	306,687	1,619.12	189	3.88%
09. Pangkep	298,701	1,112.29	269	3.78%
10. Barru	162,985	1,174.71	139	2.06%
11. Bone	711,748	4,559.00	156	9.00%
12. Soppeng	230,744	1,359.44	170	2.92%
13. Wajo	381,066	2,506.20	152	4.82%
14. Sidrap	252,483	1,883.25	134	3.19%

15. Pinrang	351,042	1,961.17	179	4.44%
16. Enrekang	190,576	1,786.01	107	2.41%
17. Luwu	328,180	3,000.25	109	4.15%
18. Tana Toraja	240,249	2,054.30	117	3.04%
19. Luwu Utara	321,979	7,502.68	43	4.07%
20. Luwu Timur	237,354	6,944.88	34	3.00%
21. Toraja Utara	229,090	1,151.47	199	2.90%
22. Makassar	1,271,870	175.77	7,236	16.08%
23. Pare-Pare	118,842	99.33	1,196	1.50%
24. Palopo	146,482	247.52	592	1.85%
Provinsi	7,908,519	45,764.53	173	100.00%

Sumber: Diolah dari Sulawesi Selatan dalam Angka 2010

Kepadatan penduduk rata-rata di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 adalah 173 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tersebut bervariasi pada setiap kabupaten/kota yang ada. Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan masih belum merata. Kota Makassar yang memiliki luas wilayah sebesar 175,77 km² dihuni oleh 1.271.870 jiwa penduduk. Hal tersebut mengakibatkan kepadatan penduduk di Kota Makassar berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan. Kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2008 mencapai 7.236 jiwa/km². Sedangkan daerah yang memiliki kepadatan penduduk sangat rendah adalah Kabupaten Luwu Timur yaitu 34 jiwa/km². Angka tersebut berada jauh di bawah kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan.

Yang perlu dicermati adalah kepadatan penduduk untuk Kotamadya lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Di antara Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki kepadatan penduduk di atas 500 jiwa/km² hanya ada 3 wilayah, dan ketiganya merupakan wilayah Kotamadya. Kota Parepare yang hanya memiliki luas wilayah 99,33 km² memiliki jumlah penduduk 118.842 jiwa sehingga memiliki kepadatan penduduk 1.196 jiwa/km². Di lokasi lain, Kota Palopo dengan luas 247, 52 km² memiliki jumlah penduduk 146.482 jiwa sehingga memiliki kepadatan penduduk 592 jiwa/km².

4.2.3. Komposisi Penduduk

Yang dimaksud dengan komposisi penduduk di sini adalah komposisi penduduk menurut umur dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Struktur umur penduduk di suatu daerah akan dapat menentukan tingkat produktivitas penduduk di daerah tersebut karena berkaitan dengan jumlah penduduk usia produktif di suatu daerah. Penduduk usia produktif artinya penduduk yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaannya dan tidak bergantung kepada orang lain. Kelompok usia produktif meliputi usia 15 – 64 tahun.

Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 berada dalam kelompok umur 5 - 9 tahun yaitu sebesar 856.911 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah terkecil adalah kelompok penduduk usia di atas 60 tahun yaitu sebesar 694.566 jiwa. Lebih dari 50% penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan berada di kelompok usia produktif.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin
Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 4	385,614	367,056	752,670	105.06
5 - 9	441,153	415,758	856,911	106.11
10 - 14	428,962	421,599	850,561	101.75
15 - 19	356,081	359,704	715,785	98.99
20 - 24	292,474	320,531	613,005	91.25
25 - 29	281,142	339,689	620,831	82.76
30 - 34	271,411	315,198	586,609	86.11
35 - 39	293,999	310,406	604,405	94.71
40 - 44	232,803	248,495	481,298	93.69
45 - 49	192,954	217,825	410,779	88.58
50 - 54	164,685	179,002	343,687	92.00
55 - 59	126,382	147,535	273,917	85.66
60 - 64	106,011	137,832	243,843	76.91
65 +	189,414	261,309	450,723	72.49
Jumlah	3,763,085	4,041,939	7,805,024	93.10

Sumber: Sulawesi Selatan dalam Angka 2009

4.2.4. Kondisi Sosial Budaya

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki keragaman sosial budaya yang sangat tinggi. Pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan awalnya terdapat empat etnis besar yaitu: Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar serta berbagai sub-etnis seperti Duri, Konjo, Bajo dan sebagainya. Setelah mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju dan Majene yang memiliki etnis dominan Mandar tergabung dalam provinsi baru yaitu Sulawesi Barat. Etnis Bugis dominan berada di kabupaten-kabupaten yang berada pada wilayah Utara Sulawesi Selatan, sementara etnis Makassar dominan berada di kabupaten-kabupaten yang berada pada wilayah Selatan Sulawesi Selatan. Etnis Toraja tersebar di Kabupaten Tana Toraja dan Luwu, sedangkan etnis Duri di Kabupaten Enrekang.

Gambaran tersebut di atas menunjukkan keragaman etnis yang tersebar secara relatif pada keragaman wilayah pula. Di balik keragaman etnis yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat pula keragaman dalam sistem nilai dan norma serta adat-istiadat yang spesifik. Masing-masing etnis yang ada, memiliki bahasa daerah dan mengembangkan pengetahuan asli sesuai setting ekologiannya. Variasi-variasi tersebut terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan kehidupan yang ada di wilayahnya masing-masing.

Latar belakang agama dan kepercayaan juga cukup bervariasi. Pada beberapa kawasan perdesaan, agama Islam sangat dominan, tetapi untuk kawasan perkotaan, keragaman dari sisi agama cukup tinggi. Potensi keragaman juga terlihat dari jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Di sepanjang pantai Selat Makassar, tumbuh masyarakat nelayan dan petambak, sedangkan di pesisir Selatan lebih dominan dihuni oleh masyarakat petani garam. Masyarakat petani cukup tersebar di seluruh wilayah Sulsel. Bahkan ada beberapa masyarakat yang berbasis pada aktivitas ekonomi sekunder, seperti pengrajin besi di Massepe dan pengrajin perahu di Kabupaten Bulukumba.

Umumnya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut berskala kecil, tetapi memiliki kearifan lokal yang berkaitan dengan sumberdaya alam yang ada disekitarnya. Kelompok masyarakat petani misalnya, memahami kapan waktu yang tepat untuk mulai menanam serta bagaimana menangani hama, demikian pula halnya dengan masyarakat nelayan

yang bahkan telah begitu akrab dengan pantai dan laut, sehingga mengetahui peluang terjadinya badai.

Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 51,46% (1.613.949 jiwa) dari jumlah penduduk yang berumur di atas 10 tahun. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian menunjukkan bahwa tingkat kebergantungan penduduk terhadap sektor pertanian masih sangat tinggi. Sebagian besar daerah di Provinsi Sulawesi Selatan penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Namun, penduduk Kota Makassar dan Kota Pare-pare sebagian besar penduduknya bekerja di sektor non pertanian yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

4.3. Kondisi Perekonomian

4.3.1. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. Sementara itu, potensi ekonomi suatu wilayah dapat diukur dari kontribusi masing-masing sektor terhadap nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Variabel yang digunakan dalam PDRB terdiri dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa.

PDRB Sulsel atas dasar harga berlaku pada tahun 2008 sekitar Rp. 85.143.191,28 juta, dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor pertanian sebesar 31,57% dan disusul oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel yaitu sebesar 15,23%. Sedangkan PDRB Sulsel atas dasar harga konstan 2000 pada Tahun 2008 sebesar Rp. 44.549.824,56 juta.. Secara umum pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan PDRB Nasional.

Karakteristik penting yang melekat dalam proses pertumbuhan ekonomi yaitu dari tingkat perubahan struktural dan sektoral yang tinggi. Komponen utama dari perubahan struktural ini meliputi pergeseran secara bertahap kegiatan-kegiatan dari bidang pertanian ke bukan pertanian. Struktur perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2004 - 2008 tidak mengalami banyak perubahan.

Tabel 4.6
PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2008 (Rp.Juta)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	14,124,240.61	16,188,361.00	18,513,257.30	20,900,360.49	25,071,808.60
2. Pertambangan & Penggalian	3,957,326.65	4,714,272.81	5,249,991.10	5,893,998.94	6,201,497.87
3. Industri Pengolahan	6,248,763.09	7,137,863.57	8,245,336.39	9,158,552.38	11,060,440.24
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	483,279.58	548,871.10	629,314.57	721,960.26	838,095.50
5. Konstruksi	2,142,057.08	2,479,266.42	2,790,792.42	3,204,097.51	4,253,527.78
6. Perdagangan	6,815,444.62	7,880,009.00	9,507,866.45	10,986,578.24	13,913,799.61
7. Angkutan & Komunikasi	3,263,229.29	4,007,928.03	5,102,836.94	5,769,052.39	6,972,018.13
a. Angkutan	2,578,966.30	3,231,428.87	4,246,666.77	4,796,453.34	5,876,725.49
b. Komunikasi	684,262.99	776,499.16	856,170.17	972,599.05	1,095,292.64
8. Keu, Persewaan, & Jasa Perush	2,734,733.45	3,098,673.36	3,675,192.88	4,285,184.43	5,203,001.17
9. Jasa-Jasa	4,975,458.22	5,725,197.05	7,188,235.74	8,352,139.93	11,629,002.38
a. Pemerintahan Umum	4,610,075.05	5,302,756.00	6,712,778.66	7,816,248.79	11,009,630.97
b. Swasta	365,383.17	422,441.05	475,457.08	535,891.14	619,371.41
PDRB	44,744,532.59	51,780,442.34	60,902,823.79	69,271,924.57	85,143,191.28

Sumber: Statistik Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2008

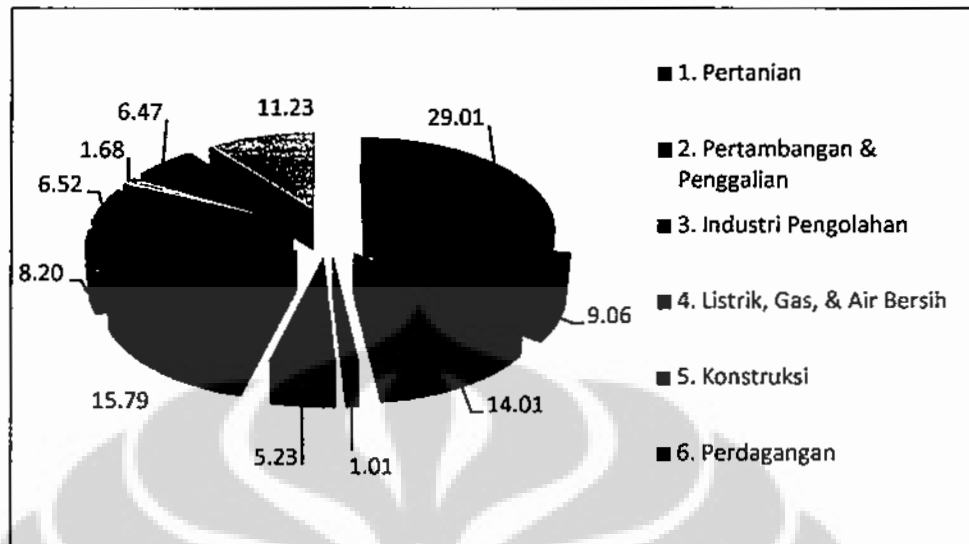
Tabel 4.7
PDRB Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2004-2008 (Rp.Juta)

Lapangan Usaha	2004	2005	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	10,646,080.87	11,337,554.79	11,802,563.14	12,181,818.23	12,923,422.93
2. Pertambangan & Penggalian	3,482,032.66	3,649,469.74	3,891,338.22	4,157,151.84	4,034,942.76
3. Industri Pengolahan	4,764,787.36	5,112,433.17	5,481,512.85	5,741,389.91	6,241,442.02
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	321,423.00	342,428.68	368,274.35	400,881.01	450,999.19
5. Konstruksi	1,603,010.51	1,712,294.89	1,787,872.72	1,942,088.56	2,328,425.32
6. Perdagangan	5,065,354.14	5,386,350.00	5,770,903.64	6,322,425.76	7,034,556.56
7. Angkutan & Komunikasi	2,558,626.69	2,757,776.02	2,945,640.97	3,244,612.89	3,651,369.31
a. Angkutan	2,074,118.89	2,215,224.19	2,367,076.25	2,596,386.20	2,903,248.21
b. Komunikasi	484,507.80	542,551.83	578,564.72	648,226.69	748,121.09
8. Keu, Persewaan, & Jasa Perush	2,063,661.47	2,152,675.32	2,340,471.90	2,610,477.11	2,881,068.05
9. Jasa-Jasa	3,840,104.18	3,970,804.79	4,479,101.42	4,731,580.99	5,003,598.42
a. Pemerintahan Umum	3,563,912.37	3,676,175.61	4,164,572.53	4,390,144.21	4,632,387.06
b. Swasta	276,191.81	294,629.18	314,528.89	341,436.77	371,211.36
Produk Domestik Regional Bruto	34,345,080.88	36,421,787.40	38,867,679.21	41,332,426.30	44,549,824.56

Sumber: Statistik Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Gambar 4.2

Persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008



Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Dari gambar di atas terlihat dalam struktur ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, sektor pertanian masih memiliki kontribusi yang paling besar. Sebesar 29,01% PDRB atas dasar harga konstan masih berasal dari sektor pertanian. Namun sektor industri pengolahan pun memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Sebesar 14,01% PDRB atas dasar harga konstan berasal dari sektor industri pengolahan.

4.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diartikan sebagai kemampuan daerah tersebut dalam jangka panjang untuk menyediakan berbagai benda ekonomi yang terus meningkat kepada penduduknya. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini ditentukan oleh penambahan yang sebenarnya dari barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi. Berdasarkan tingkat pertumbuhan yang dicapai dari tahun ke tahun maka secara kasar dapat dinilai prestasi dan kesuksesan suatu daerah serta kemampuan daerah untuk mengendalikan kegiatan ekonomi jangka panjang.

Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu tahun 2005-2008 sekitar 6,72%.

Tabel 4.8

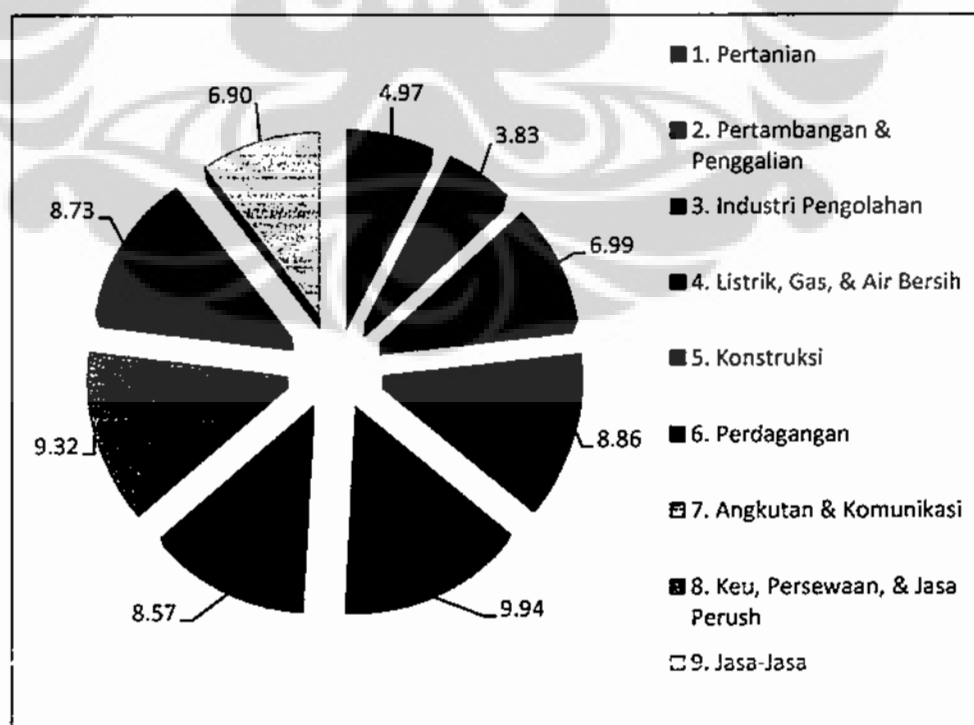
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008 (%)

Lapangan Usaha	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pertanian	6.50	4.10	3.21	6.09	4.97
2. Pertambangan & Penggalian	4.81	6.63	6.83	-2.94	3.83
3. Industri Pengolahan	7.30	7.22	4.74	8.71	6.99
4. Listrik, Gas, & Air Bersih	6.54	7.55	8.85	12.50	8.86
5. Konstruksi	6.82	4.41	8.63	19.89	9.94
6. Perdagangan	6.34	7.14	9.56	11.26	8.57
7. Angkutan & Komunikasi	7.78	6.81	10.15	12.54	9.32
a. Angkutan	6.80	6.85	9.69	11.82	8.79
b. Komunikasi	11.98	6.64	12.04	15.41	11.52
8. Keu, Persewaan, & Jasa Perush	4.31	8.72	11.54	10.37	8.73
9. Jasa-Jasa	3.40	12.80	5.64	5.75	6.90
a. Pemerintahan Umum	3.15	13.29	5.42	5.52	6.84
b. Swasta	6.68	6.75	8.55	8.72	7.68
PDRB	6.05	6.72	6.34	7.78	6.72

Sumber: Statistik Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2008

Gambar 4.3

Laju Pertumbuhan Ekonomi Rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2008



Sumber: Diolah dari Statistik Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2008

4.4. Sejarah Perkembangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

4.4.1. Kota Benteng di Kabupaten Selayar

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di antara 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan, yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan.

Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil ini membentang dari Utara ke Selatan. Berdasarkan letak, Kepulauan Selayar merupakan kepulauan yang berada di antara jalur alternatif perdagangan internasional yang menjadikan Selayar secara geografis sangat strategis sebagai pusat perdagangan dan distribusi baik secara nasional untuk melayani Kawasan Timur Indonesia maupun pada skala internasional guna melayani negara-negara di kawasan Asia.

Di masa lalu, Selayar juga pernah menjadi rute dagang menuju pusat rempah-rempah di Moluccan (Maluku). Di Pulau Selayar, para pedagang singgah untuk mengisi perbekalan sambil menunggu musim yang baik untuk berlayar. Dari aktivitas pelayaran ini pula muncul nama Selayar. Nama Selayar berasal dari kata "cedaya" (Bahasa Sansekerta) yang berarti, satu layar, karena konon banyak perahu satu layar yang singgah di pulau ini. Selain nama Selayar, pulau ini dinamakan pula dengan nama Tana Doang yang berarti tanah tempat berdoa. Di masa lalu, Pulau Selayar menjadi tempat berdoa bagi para pelaut yang hendak melanjutkan perjalanan baik ke barat maupun ke timur untuk keselamatan pelayaran mereka. Saat ini, ibukota Kabupaten Selayar berada di Kota Benteng.

4.4.2. Kota Bulukumba di Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu phinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km² dengan jarak tempuh dari Kota Makassar 153 Km.

Bulukumba lahir dari suatu proses perjuangan panjang yang mengorbankan harta, darah, dan nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945 diawali dengan terbentuknya "barisan merah putih" dan "laskar brigade pemberontakan Bulukumba

angkatan rakyat". Mitologi penamaan "Bulukumba", konon bersumber dari dua kata dalam bahasa Bugis yaitu "Bulu'ku" dan "Mupa" yang dalam bahasa Indonesia berarti "masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya". Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar di Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama "Tana Kongkong", di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi "Bulukumba". Konon sejak itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah kabupaten. Saat ini Bulukumba terkenal dengan Pantai Bira dan memiliki potensi yang tinggi di sektor Pariwisata.

4.4.3. Kota Bantaeng di Kabupaten Bantaeng

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 123 km dan waktu tempuh sekitar 2,5 jam. Luas wilayahnya 395.83 km². Kota Bantaeng berjarak 125 km ke sebelah selatan dari Makassar. Secara yuridis formal, hari jadi Bantaeng jatuh pada tanggal 4 Juli 1959 disaat diundangkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. Namun, Bantaeng sudah dikenal sebagai pusat pemerintahan formal sejak jaman Hindia Belanda. Kerajaan Bantaeng terbentuk pada abad XII, ditemukan oleh kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit ketika memperlebar usaha dagang dan kekuasaan kewilayah timur dan dicatat dalam berbagai dokumen, antara lain peta wilayah Singosari dan buku Prapanca yang berjudul Negara Kertagama.

Selain itu, sejarah menunjukkan, bahwa pada tanggal 7 Juli 1667 terjadi perang Makassar, dimana tentara Belanda mendarat lebih dahulu di Bantaeng sebelum menyerang Gowa karena letaknya yang strategis sebagai bandar pelabuhan dan lumbung pangan Kerajaan Gowa. Serangan Belanda tersebut gagal, karena ternyata dengan semangat patriotisme rakyat Bantaeng sebagai bagian Kerajaan Gowa pada waktu itu mengadakan perlawanan besar-besaran.

Karena sebagian besar penduduknya petani, maka wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Kentang adalah salah satu tanaman hortikultura yang paling menonjol. Selain kentang, hortikultura lainnya adalah kool, wortel, dan buah-

buah seperti pisang dan mangga. Sektor industri menjadi pilihan kedua untuk dikembangkan di Kabupaten Bantaeng yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pengembangan sektor industri sangat berpeluang dimasa mendatang, namun membutuhkan investor yang sangat kuat. Dengan perkembangan sektor industri, dampaknya sangat positif, sebab disamping meningkatkan pendapatan masyarakat juga menyerap banyak tenaga kerja.

4.4.4. Kota Bontosunggu di Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di ujung bagian barat wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bontosunggu. Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah 903,35 km² dan berpenduduk sebanyak 332.334 jiwa. Jaraknya dari Kota Makassar sekitar 91 km. Kabupaten Jeneponto pada awalnya hanya terdiri dari 5 (lima) kecamatan, namun kemudian dimekarkan menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Kecamatan Kelara satu-satunya kecamatan yang tidak mengalami pemekaran.

Kabupaten Jeneponto yang beribukota di Bontosunggu sangat mudah dikenali dari penampilan fisiknya. Yang pertama tentu saja lambang kuda yang dijadikan simbol. Di pintu masuk kabupaten dari arah Takalar, ada patung kuda bertengger di tengah jalan raya. Ciri kedua yang mudah dikenali adalah padang savana. Sebelum memasuki kota Bontosunggu dari Pattalasang dan sesudah keluar kota sebelum mencapai Bantaeng, yang terlihat adalah padang savana berwarna kecoklatan dengan rerumputan yang meranggas dan pohon-pohon palem maupun lontar yang berdiri sendiri jarang-jarang di kejauhan. Kondisi tanah serupa hanya umum ditemukan di wilayah Timor dan Indonesia bagian tenggara lainnya. Akibat curah hujan yang rendah dan tanah yang agak berkapur, maka situasi tanah di Jeneponto mudah sekali menjadi padang savana.

4.4.5. Kota Pattalasang di Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar memiliki ibukota kabupaten di Kota Pattalasang yang terletak 29 km arah selatan dari Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Takalar adalah sekitar 566,51 km², dari luas itu, 240,88 km² diantaranya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sekitar 74 km. Bagian Utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, bagian

Timur berbatasan dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa, bagian Selatan dibatasi oleh Laut Flores, sementara bagian Barat dibatasi oleh Selat Makassar.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu wilayah penyangga kota Makassar dan termasuk ke dalam kawasan Mamminasata. Kabupaten Takalar dapat mengantisipasi perkembangan Kota Makassar dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri Kota Makassar.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan SandraBone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal. Dengan fasilitas pelabuhan yang ada, Takalar memiliki potensi akses regional maupun nasional sebagai pintu masuk baru untuk kegiatan industri dan perdagangan untuk kawasan Indonesia Timur setelah Makassar mengalami kejenuhan.

4.4.6. Kota Sungguminasa di Kabupaten Gowa

Dalam sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar di perairan Nusantara. Kerajaan ini juga memunculkan pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, yaitu Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota Makassar. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih

dari Waduk Bili-bili. Keuntungan alam menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

4.4.7. Kota Sinjai di Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai secara geografis terdiri atas dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah ada di kecamatan Sinjai Utara, Tellu Limpoe, dan Sinjai Timur sedangkan dataran tinggi berada mulai dari Sinjai Barat, Sinjai Tengah, Sinjai Selatan, dan Sinjai Borong. Terdapat pula kecamatan yang bernama Kecamatan Pulau Sembilan yang merupakan hamparan 9 pulau yang berderet sampai mendekati Pulau Buton.

Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Propinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 220 km dari kota Makassar. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (bagian Utara), Teluk. Bone (bagian Timur), Kabupaten Bulukumba (di bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat).

Kabupaten Sinjai awalnya terdiri dari beberapa kerajaan, seperti kerajaan yang tergabung dalam federasi Tellu Limpoe dan Kerajaan - kerajaan yang tergabung dalam federasi Pitu Limpoe. Bila ditelusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang ada di kabupaten Sinjai di masa lalu, ternyata terjalin erat oleh tali kekeluargaan yang dalam Bahasa Bugis disebut *Sijai* yang memiliki arti sama jahitannya.

Pada agresi Belanda tahun 1859 – 1861 terjadi pertempuran hebat yang dalam sejarah dikenal dengan nama Rumpa'na Manggarabombang atau perang Mangarabombang. Tahun 1859 Benteng Balangnipa jatuh ke tangan belanda. Tahun 1861 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi dan Daerah, takluknya wilayah Tellulimpoe Sinjai dijadikan satu wilayah pemerintahan dengan sebutan Goster Districten. Tanggal 24 Pebruari 1940, Gubernur Grote Gost menetapkan pembagian administratif untuk daerah timur termasuk residensi Celebes.

4.4.8. Kota Maros di Kabupaten Maros

Kota Maros yang merupakan ibukota Kabupaten Maros terletak 30 km dari Kota Makassar dengan luas 1.619,12 km². Kabupaten Maros terbentuk secara administratif pada tahun 1959 dengan Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tanggal 28 Januari 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi.

Awalnya pada wilayah Kabupaten Maros hanya terdapat sebuah kerajaan yg cukup besar, yaitu Kerajaan Marusu. Kerajaan Marusu pada waktu itu hidup damai, berdampingan dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan tersebut berlangsung terus hingga masuknya intervensi kompeni belanda. Kerajaan Marusu memiliki wilayah yang cukup luas mulai sebelah selatan Kota Makassar dan diapit oleh dua kerajaan besar yaitu Gowa dan Bone. Namun kekalahan terjadi, dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian perdamaian yang dikenal dengan "cappaya ri bungaya" atau "perjanjian bungaya".

4.4.9. Kota Pangkajene di Kabupaten Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat Pangkep) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibukotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 km. Kabupaten Pangkep berpenduduk sebanyak ± 295.000 jiwa.

Asal kata Pangkajene dipercaya berasal dari sungai besar yang membelah kota Pangkep. *Pangka* berarti cabang dan *Je'ne* berarti air. Ini mengacu pada sungai yang membelah kota Pangkep dan membentuk cabang. dinamai demikian karena pada daerah yang dulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Barasa itu, terdapat sungai yang bercabang, yang sekarang dinamai Sungai Pangkajene. Sampai saat ini belum didapatkan keterangan yang tegas, sejak kapan nama "Pangkajene" menggantikan nama yang populer sebelumnya, 'Marana'. Menurut beberapa sumber, awalnya yang dikenal adalah Kampung Marana dan sungai yang membelah kota Pangkajene sekarang ini dulunya bernama Sungai Marana.

4.4.10. Kota Barru di Kabupaten Barru

Kabupaten Barru merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang mempunyai wilayah terbentang di pesisir selat Makassar, membujur dari arah selatan ke utara sepanjang kurang lebih 78 Km. Kabupaten Barru secara geografis terletak pada Koordinat 4°0,5'49" sampai 4°47'35" Lintang selatan dan 119°35'0" sampai 119°49'16" Bujur Timur yang mempunyai luas wilayah 1.174,71 km² (117.427 Ha).

Kabupaten Barru awalnya terdiri dari beberapa kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan

Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Di masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dengan wilayah Kerajaan Barru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru yang bernaung di bawah *Afdelling* Parepare.

Pada tanggal 24 Pebruari 1960, berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dibentuk Kabupaten Barru dengan ibukota Kabupaten di Kota Barru. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959, pada tahun 1961 daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru, Kabupaten Parepare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibukota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibukota Kewedanaan Barru.

Berdasarkan karakteristik sumber daya alam yang ada, kabupaten Barru mempunyai 4 wilayah, yaitu :

- Wilayah pegunungan yang berada disebelah timur, pada umumnya berada di kecamatan Pujananting dan kecamatan Tanete Riaja. Wilayah ini merupakan daerah pertanian, pertambangan dan daerah kawasan peternakan.
- Wilayah selatan adalah Kecamatan Tanete Rilau yang merupakan pintu gerbang dari Kabupaten Pangkep dengan Potensi Perikanan yang cukup luas seperti tambak dan perikanan laut.
- Wilayah tengah sebagai Ibu Kota Kabupaten Barru yang merupakan Pusat Agropolitan yang terletak di Kecamatan Barru.
- Wilayah utara yang terdiri dari Kecamatan Balusu, Soppeng Riaja dan Kecamatan Mallusetasi yang merupakan pintu keluar ke Kota Pare-pare, wilayah ini disamping sebagai Daerah Pertanian dan Perikanan, juga adalah Daerah Wisata khususnya Wisata laut yang terletak di Kecamatan Mallusetasi. Kondisi topografi Kabupaten Barru yang cukup bervariasi ini terdiri dari laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan.

4.4.11. Kota Watampone di Kabupaten Bone

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur

Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'-5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT.

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada pertengahan abad ke-17. Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat memberi pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Bone dahulu disebut Tanah Bone dan berdasarkan Lontarak, nama asli Bone adalah Pasir, yang dalam Bahasa Budis adalah Kessi (pasir). Dari sinilah asal usul sehingga dinamakan *BONE*. Adapun bukit pasir yang dimaksud kawasan Bone sebenarnya merupakan lokasi Bangunan Masjid Raya sekarang, letaknya persis di Jantung Kota Watampone Ibu Kota Kabupaten Bone tepatnya di Kelurahan Bukaka.

Pada tahun 1905 Kerajaan Bone di kuasai oleh Penjajah Belanda dan atas persetujuan Dewan Ade PituE Ri Bone nama *LALENG BATA* sebagai Ibu Kota Kerajaan Bone diganti namanya menjadi *WATAMPONE* sampai sekarang.

Kabupaten Bone ditetapkan sebagai daerah penyangga beras untuk Propinsi Sulawesi Selatan yang biasa dikenal dengan istilah BOSOWA SIPILU singkatan dari Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang dan Luwu, begitu pula daerah pantainya sangat panjang membujur dari Utara ke Selatan yang menyusuri Teluk Bone dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, 9 diantaranya masuk daerah pantai seperti Kecamatan Cenrana, Tellu SiantingE, Awangpone, Tanette Riattang Timur, SibuluE, Mare, Tonra, Salomekko dan Kajuara, dengan demikian sumber mata pencaharian penduduk Kabupaten Bone sebagian besar adalah Petani dan Nelayan.

4.4.12. Kota Watansoppeng di Kabupaten Soppeng

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota terletak di Watansoppeng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.359,44 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 229.502 jiwa (2008).

Soppeng adalah sebuah kota kecil yang dalam buku-buku lontara terdapat catatan tentang raja-raja yg pernah memerintah sampai berakhirnya status daerah Swapraja. Satu hal yang menarik dalam lontara tersebut adalah bahwa jauh sebelum terbentuknya kerajaan Soppeng, telah ada kekuasaan yg mengatur daerah Soppeng, yaitu sebuah pemerintahan berbentuk demokrasi karena berdasar atas kesepakatan 60 pemuka masyarakat, namun saat itu Soppeng masih merupakan daerah yang terpecah dalam beberapa kerajaan kecil. Literatur yang ditulis tentang sejarah Soppeng masih sangat sedikit. Sebagaimana tentang daerah-daerah di Limae Ajattappareng, juga Mandar dan Toraja, Soppeng hanyalah daerah “kecil” dan mungkin “kurang signifikan” untuk diperebutkan oleh dominasi dua kekuatan di Sulawesi Selatan yakni Luwu dan Siang sebelum abad ke-16. Namun demikian, dulunya Soppeng bersama Wajo, sangat bergantung kepada kerajaan Luwu.

Seiring menguatnya kekuatan persekutuan Goa-Tallo di Makassar; untuk mengimbangnya, Bone sempat mengajak Wajo dan Soppeng membentuk persekutuan Tellumpocco pada perjanjian Timurung tahun 1582. Akan tetapi, masuknya Islam di Sulawesi Selatan di paruh akhir abad ke-16, ditandai dengan masuknya Karaeng Tallo I Mallingkang yang lebih dikenal sebagai Karaeng Matoaya serta penguasa Goa I Manga'ranggi yang kemudian bergelar Sultan Alauddin, telah merubah peta politik di Sulawesi Selatan. Untuk sementara, kekuatan Bugis Makassar menjadi satu kekuatan baru untuk melawan orang kafir ketika Soppeng dan Sidenreng memeluk Islam tahun 1609, Wajo 1610 dan akhirnya Bone pada tahun 1611.

Sebagaimana sejarah Sulawesi Selatan pada umumnya, proses terbentuknya komunitas masyarakat di Soppeng juga menyerupai daerah-daerah lainnya. Dimulai dari masa *sianre balei tauve* sampai masa *tomanurung*, Lontara Soppeng juga memulai catatannya dengan cara sama, bahwa komunitas “resmi” orang Soppeng adalah ketika Matoa Ujung, Matoa Botto dan Matoa Bila bersama ketua persekutuan lainnya melantik tomanurung sebagai raja.

4.4.13. Kota Sengkang di Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Wajo terletak di Sengkang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,20 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 378.500 jiwa.

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu. Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo.

Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem *to manurung* sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas.

Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman La Tadampare Pang Timaggalatung Arung Matowa, yaitu raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matowa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Soppeng terlebih dahulu memeluk agama Islam.

Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar (Gowa Tallo) dengan Kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) yang membentuk aliansi *tellumpocoe* untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Soppeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Soppeng, VOC dan Buton, Arung Matowa Wajo pada saat itu, La Tenri Lai To Sengngeng tidak ingin menandatangani perjanjian Bungayya.

Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah. Hingga saat datangnya La Maddukkelleng Arung Matowa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasis, beliaulah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar *Petta Pamaradekangngi Wajo* (Tuan yang memerdekakan Wajo).

4.4.14. Kota Sidenreng di Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota kabupaten di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten ini

memiliki luas wilayah 1.883,25 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 250.000 jiwa. Penduduk asli daerah ini adalah suku Bugis yang ta'at beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong-menolong. Dimana-mana dapat dengan mudah ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen.

Sebelum ditetapkan menjadi sebuah Kabupaten, Sidenreng Rappang atau yang lebih akrab disingkat Sidrap, memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Bugis yang cukup disegani di Sulawesi Selatan sejak abad XIV, disamping Kerajaan Luwu, Bone, Gowa, Soppeng, dan Wajo. Berbagai literatur yang ada menyebutkan, eksistensi kerajaan ini turut memberi warna dalam percaturan politik dan ekonomi kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Sidenreng merupakan salah satu dari sedikit kerajaan yang tercatat dalam kitab La Galigo yang amat melegenda. Sidenreng merupakan salah satu kerajaan kuno atau pertama di Sulawesi Selatan.

Kerajaan Sidenreng yang berpusat di sekitar danau besar (Tappareng karaja) menjadi salah satu negeri yang ramai dan terkenal hingga ke benua lain. Ini sesuai dengan catatan seorang Portugis di abad ke-16 M yang menuliskan Sidereng sebagai "Sebuah kota besar dan terkenal, berpusat di sebuah danau yang dapat dilayari, dan dikelilingi tempat-tempat pemukiman."

Dalam literatur lain, Rappang disebutkan sebagai kerajaan yang menguasai daerah hilir Sungai Saddang di abad 15 M. Bersama dengan Sidenreng, Sawitto, Alitta, Suppa, dan Bacukiki, mereka membentuk persekutuan Aja'Tappareng (wilayah barat danau) untuk membendung dominasi Luwu. Persekutuan itu kemudian diikatkan dalam perkawinan antar keluarga raja-raja mereka.

Dari perjalanan sejarahnya tergambar adanya pertautan antara Sidenreng dan Rappang sejak awal. Itu Sebabnya, kedua kerajaan memiliki hubungan yang sangat erat. Walau demikian, kedua kerajaan ini juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan. Kerajaan Sidenreng menerapkan sistem Top Down yang dalam bahasa Bugis disebut Massorong Pao, sedangkan Rappang justru sudah lebih maju dalam menerapkan demokrasi dengan menganut sistem Mangelle Pasang (Buttom Up). Namun perbedaan itu tidak memisahkan hubungan keduanya. Malah, pada Tahun 1889, Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang justru diperintah oleh seorang raja bernama Lapanguriseng.

Selanjutnya pada Tahun 1917 kedua wilayah tersebut digabung menjadi satu, sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Afdeling Parepare yang meliputi Sidenreng Rappang, Pinrang, Parepare, Enrekang, dan Barru. Setelah kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, gelora semangat persatuan Indonesia tak terbendung lagi. Dengan dukungan penuh seluruh masyarakat, Sidenreng Rappang menyatakan diri sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketika Parepare menjadi Daerah Swatantra Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952, Sidenreng Rappang menjadi kewedanan yang didalamnya terdapat Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang yang berotonomi sebagai lembaga pemerintahan adat berdasarkan Staatblat 1938 Nomor 529. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, kewedanan Sidenreng Rappang yang meliputi Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng. Akhirnya pada tanggal 18 Pebruari 1960 dengan berdasarkan pelantikan Bupati pertama, dijadikanlah hari tersebut sebagai hari jadi daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang juga dikenal dengan sebutan Bumi Nene' Mallomo. Nama ini diambil dari seorang Cendekiawan yang diyakini pernah hidup di Kerajaan Sidenreng di masa pemerintahan La Patiroi Addatuan Sidenreng VII. Nene' Mallomo adalah penasehat utama Addatuang dalam hukum dan pemerintahan. Ia dikenang karena kecendekiawannya dalam merumuskan hukum ketatanegaraan dan kejujurannya dalam menegakkan keadilan.

4.4.15. Kota Pinrang di Kabupaten Pinrang

Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 182 km dari Kota Makassar. Kabupaten Pinrang memiliki luas 1.961,17 km² dengan jumlah penduduk sekitar 357.000 jiwa. Pinrang merupakan sebuah negeri yang telah dikenal sejak abad 14 meski namanya pada waktu itu dikenal dengan nama Sawitto. Istilah Pinrnag barulah dikenal pada abad 15 atau sekitar tahun 1450 setelah raja ke IV Sawitto yakni Lapaletang kembali dari kerajaan Gowa.

Waktu itu terjadi peperangan antara Sawitto dan Gowa, Perang terjadi karena Gowa sebagai kerajaan besar, berusaha untuk menguasai Sawitto yang memiliki potensi besar.

Berbagai upaya telah dilakukan Gowa untuk menguasai Sawitto melalui agresi dan terjadilah perang antar Sawitto dan Gowa sekitar Tahun 1540. Sawitto kalah, raja dan istrinya dibawa ke Gowa namun dapat dibebaskan kembali. Waktu kembali dari Gowa, rakyat mengatakan " Pinra kana ni tappa na datue pole ri gowa" yang artinya wajah raja menagalami perubahan sekembali dari Gowa. Kata-kata inilah senantiasa terlontar dari orang - oraang yang menyertai sang raja sehingga akhirnya tempat tersebut dinamai Pinra.

Sumber lain ini mengatakan pemukiman kota Pinrang yang dahulunya rawa-rawa yang selalu tergenang air membuat masyarakat senantiasa berpindah-pindah mencari wilayah pemukiman yang bebas genangan air, berpindah-pindah atau berubah-ubah pemukiman, dalam bahasa bugis disebut "pinra-pinra onroang" setelah masyarakat menemukan tempat pemukiman yang baik, maka diberinya tempat tersebut: pinra-pinra. Dari kedua sejarah yang berbeda itu lahirlah istilah yang sama yaitu "pinra" yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh intonasi dan dialek bahasa bugis sehingga menjadi Pinrang yang sekarang ini diabadikan menjadi Kabupaten Pinrang.

Dengan ditetapkannya PP Nomor 34/1952 tentang perubahan daerah Sulawesi selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra.. Pada tahun 1959 keluar undang-undang yang dikenal dengan undang-undang nomor 29/1959 yang berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi yang praktis membentuk Daerah Tingkat II Pinrang pula.

4.4.16. Kota Enrekang di Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota di Kota Enrekang. Kota Enrekang berjarak 236 km dari Kota Makassar ke arah utara dengan luas wilayah 1.786,01 km² dan berpenduduk sekitar 188.000 jiwa.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu' yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk

di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Sejak abad 14, daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang berasal dari Endeg yang artinya 'naik dari' atau 'panjat'. Dari sinilah asal mulanya sebutan 'endekan'.

4.4.17. Kota Belopa di Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu yang ada saat ini awalnya merupakan bagian integral dari "Kerajaan Luwu" yang semula berkedudukan di Ussu Malili (sekarang masuk wilayah Luwu Timur) sebagai pusat pengendalian pemerintahan yang dipimpin Pajung Luwu Pertama. Dalam perkembangan sejarah Kedatuan Luwu, Ware' (*watampare*) atau ibukota sebagai pusat pengendalian pemerintahan Kedatuan Luwu telah berpindah tempat beberapa kali antara lain pertama, mencapai wilayah Kab. Kolaka Utara, kedua, Cilallang-Kamanre Kec. Kamanre. ketiga, Pattimang Kec. Malangke dan keempat atau terakhir ke Palopo.

Pada tahun 1905, pemerintah Hindia Belanda berhasil menduduki pusat Kedatuan Luwu di Palopo setelah terlebih dahulu melalui serentetan pertempuran. Beberapa waktu kemudian, di Bajo ditempatkan seorang pejabat Hindia Belanda yang disebut "*Tuan Petoro Kecil*" dengan wilayah kekuasaan yang disebut "*distrik*" dari wilayah kekuasaan Kedatuan Luwu bagian selatan. Belopa tetap diberi posisi penting, karena letak geografis dan didukung oleh pelabuhan ulo-ulo yang dapat memperlancar perdagangan rakyat antara pulau. Belopa merupakan daerah agraris dan sentra perdagangan hasil bumi di bagian selatan. Pada sisi lainnya ruang gerak masyarakat dibatasi kebebasannya dan inilah yang menjadi salah satu pemicu munculnya gerakan nasionalisme dari seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahun 1942, Jepang berhasil menghaiau pemerintah Hindia Belanda, namun sistem pemerintahannya hampir sama dengan sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Rakyat lebih lega karena diberi kebebasan berusaha, bercocok tanam, dan menjadi nelayan. Keadaan tersebut memberi suasana baru bagi

masyarakat yang mendiami Bajo-Belopa dan sekitarnya, sehingga hasil bumi masyarakat Belopa dan sekitarnya yang dikenal dengan nama *Tana Manai* lebih meningkat. Kondisi inilah yang memberi motivasi sehingga Belopa dan sekitarnya, diberi julukan "*Pabbarasanna Tana Luwu*". (*lumbung pangan Tana Luwu*)

Dengan berlakunya Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1957 tentang penghapusan Sistem Pemerintahan Swapraja dan terpisahnya Tana Toraja dari Kab. Luwu, maka berakhir pula pemerintahan sistem Kerajaan Luwu. Oleh karena Belopa mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang, maka Belopa ditingkatkan statusnya menjadi Kecamatan pada tahun 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1983.

Sebagai konsekwensi logis lahirnya UU. no. 22 tahun 1999, mekarlah Kab. Luwu Utara dengan ibu kota Masamba berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1999. Kota Palopo sebagai Ibukota Kab. Luwu ditingkatkan statusnya menjadi kota otonom dengan lahirnya UU. no 11 tahun 2002.

4.4.18. Kota Makale di Kabupaten Tana Toraja

Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makale. Sebelum pemekaran, kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.205,77 km² dan berpenduduk sebanyak 248.607 jiwa (2007) yang terletak di antara 2°20' sampai 3°30' Lintang Selatan dan 119°30' sampai 120°10' Bujur Timur. Tana Toraja dibelah oleh satu sungai terbesar di Sulsel yakni sungai Sa'dan. Sungai inilah yang memberikan tenaga pembangkit listrik untuk menyalakan seluruh Makassar.

Suku Toraja mendiami daerah pegunungan, mempertahankan gaya hidup yang khas, dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli serta mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara.

Turis datang ke Sulawesi Selatan biasanya hanya akan pergi ke Tana Toraja, bahkan tempat lainnya di seluruh Sulawesi Selatan masih kalah pamor dibandingkan Tana Toraja. Setelah perjalanan panjang selama 9 jam dengan jalur darat menuju utara melalui jalan raya poros Sulawesi, akan terlihat pemandangan alam dan budaya yang unik. Tator amat berbeda dengan suku Bugis dan Makasar.

Tana Toraja memiliki nama tua yang dikatakan dalam literatur kuno sebagai "Tondok Lepongan Bulan Tana Matari' Allo" , yang berarti negeri dengan pemerintahan dan masyarakat berketuhanan yang bersatu utuh bulat seperti bulatnya matahari dan bulan. Agama asli nenek moyang mereka adalah Aluk Todolo yang berasal dari sumber Negeri Marinding Banua Puan yang dikenal dengan sebutan Aluk Pitung Sa'bu Pitung Pulo. Ketika Belanda masuk, agama Aluk Todolo tergeser oleh missionaris Kristen yang menyebarkan agama di wilayah ini. Namun adat istiadat yang berakar pada konsep Aluk Todolo hingga kini masih dijalankan. Kita masih akan menikmati pertunjukan upacara kematian masyarakat Tator sebagai pengaruh kuat dari agama nenek moyang mereka.

Menurut data sejarah, penduduk yang pertama-tama menduduki/mendiami daerah Toraja pada zaman purba adalah penduduk yang bergerak dari arah Selatan dengan perahu. Mereka datang dalam bentuk kelompok yang dinamai Arroan (kelompok manusia). Hingga kini kita akan melihat disekitar Rantepao terdapat beberapa Bamba Puang milik keluarga paling berpengaruh dan terkaya disitu yang mendirikan Tongkonan (rumah adat Tator) beserta belasan lumbung padinya. Setiap Tongkonan satu keluarga besar dihiasi oleh puluhan tanduk kerbau yg dipakai untuk menjelaskan status sosial dalam strata masyarakat adat.

4.4.19. Kota Masamba di Kabupaten Luwu Utara

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ibukota di Masamba. Luwu Utara terletak pada koordinat $2^{\circ}30'45''-2^{\circ}37'30''$ LS dan $119^{\circ}41'15''-121^{\circ}43'11''$ BT. Secara geografis kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah di bagian utara, Kabupaten Luwu Timur di sebelah timur, Kabupaten Luwu di sebelah selatan dan Kabupaten Mamuju di sebelah barat.

Kabupaten Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dan merupakan pecahan dari Kabupaten Luwu. Kabupaten ini memiliki luas 7.502,68 km² dengan jumlah penduduk sekitar 313.000 jiwa.

Pada tahun 2003, di usianya yang ke-4, Kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Dengan demikian, pasca pemekaran, Kabupaten Luwu Utara terdiri dari sebelas kecamatan masing-masing Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Limbong, Kecamatan Seko,

Kecamatan Masamba, Kecamatan Rampi, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju dan Kecamatan Bone Bone

4.4.20. Kota Malili di Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan yang berasal dari pemekaran Kabupaten Luwu Utara dan disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003. Malili adalah ibu kota dari Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,98 km². Di kabupaten ini terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada.

Di usianya yang terbilang masih belia, Luwu Timur yang berjudul Bumi Batara Guru ini mengalami kemajuan yang sangat pesat di segala bidang. Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dan pertumbuhan yang prospektif di masa datang karena karakteristik khusus yang dimilikinya yaitu sebagai wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam. Sehingga secara alamiah, Kabupaten Luwu Timur memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Selatan.

4.4.21. Kota Makassar di Kotamadya Makassar

Kota Makassar yang dikenal sekarang dan pernah bernama Ujung Pandang, awalnya berada di muara sungai Tallo dengan pelabuhan niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad XV. Sumber-sumber Portugis memberitakan, bahwa bandar Tallo awalnya berada di bawah Kerajaan Siang di sekitar Pangkajene, akan tetapi pada pertengahan abad XVI, Tallo bersatu dengan sebuah kerajaan kecil lainnya yang bernama Gowa, dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siang, bahkan menyerang dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu sungai Tallo, terjadi pendangkalan sungai Tallo, sehingga bandarnya dipindahkan ke muara sungai Jeneberang, disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Gowa-Tallo yang kemudian membangun pertahanan benteng Somba Opu, yang untuk selanjutnya seratus tahun kemudian menjadi wilayah inti Kota Makassar.

Pada masa pemerintahan Raja Gowa XVI terjadi peningkatan aktifitas pada sektor perdagangan lokal, regional dan Internasional, sektor politik serta sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa ini merupakan puncak kejayaan Kerajaan Gowa. Komoditi ekspor utama Makassar adalah beras, yang dapat ditukar dengan rempah-rempah di Maluku maupun barang-barang manufaktur asal Timur Tengah, India dan Cina di Nusantara Barat. Dalam kurun waktu satu abad, Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka dunia yang dihuni lebih 100.000 orang yang multikultural (termasuk ke-20 kota terbesar dunia). Pada zaman itu jumlah penduduk Amsterdam, Belanda, baru mencapai sekitar 60.000 orang.

Ambisi para pemimpin Kerajaan Gowa-Tallo untuk semakin memperluas wilayah kekuasaan serta persaingan Bandar Makassar dengan Kompeni Dagang Belanda VOC berakhir dengan perang dahsyat dan sengit. Pasukan Bugis, Belanda dan sekutunya dari Ternate, Buton dan Maluku memerlukan tiga tahun operasi militer di seluruh kawasan Indonesia Timur. Baru pada tahun 1669, akhirnya dapat merata-tanahkan kota Makassar dan benteng terbesarnya, Somba Opu.

Beberapa dekade pertama setelah pemusnahan kota dan bandar Makassar, penduduk yang tersisa membangun sebuah pemukiman baru di sebelah utara bekas Benteng Ujung Pandang. Benteng pertahanan pinggir utara kota lama itu pada tahun 1673 ditata ulang oleh VOC sebagai pusat pertahanan dan pemerintahan dan diberi nama baru Fort Rotterdam, dan 'kota baru' yang mulai tumbuh di sekelilingnya dinamakan 'Vlaardingen'. Pemukiman tersebut jauh lebih kecil dibanding Kota Raya Makassar yang telah dihancurkan. Dekade pertama se usai perang, kawasan itu dihuni tidak lebih 2.000 jiwa; pertengahan abad ke-18 jumlah itu meningkat menjadi sekitar 5.000 orang, setengah di antaranya sebagai budak.

Pada awalnya, kegiatan perdagangan utama di bekas Bandar Dunia ini adalah pemasaran budak serta menyuplai beras kepada kapal-kapal VOC yang menukarkannya dengan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1830-an, pelabuhan Makassar dibuka bagi kapal-kapal dagang Cina. Adanya kegiatan perdagangan, mendorong kembali aktivitas maritim penduduk kota dan kawasan Makassar. Sejak pertengahan abad ke-18 para nelayan-pelaut Sulawesi secara rutin berlayar hingga pantai utara Australia. Tiga sampai empat bulan lamanya mereka membuka puluhan lokasi pengolahan teripang. Sampai

sekarang, hasil laut masih merupakan salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk pulau-pulau dalam wilayah Kota Makassar.

Setelah Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menggantikan kompeni perdagangan VOC yang bangkrut pada akhir abad ke-18, Makassar dihidupkan kembali dengan menjadikannya sebagai pelabuhan bebas pada tahun 1846. Tahun-tahun berikutnya terjadi kenaikan volume perdagangan yang pesat, dan kota Makassar kembali menjadi bandar internasional.

Awal abad ke-20, Belanda akhirnya menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi. Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Makassar mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Wilayah kota diperluas ke semua penjuru. Dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906, Makassar tahun 1920-an adalah kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan.

Perang Dunia Kedua dan pendirian Republik Indonesia sekali lagi mengubah wajah Makassar. Hengkangnya sebagian besar warga asing tahun 1949 dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir tahun 1950-an menjadikannya kembali sebuah kota provinsi. Antara tahun 1930-an sampai tahun 1961 jumlah penduduk meningkat dari kurang lebih 90.000 jiwa menjadi hampir 400.000 orang. Lebih dari setengah penduduk Makassar merupakan pendatang baru dari wilayah luar kota. Hal ini tercermin dari penggantian nama kota menjadi Ujung Pandang berdasarkan julukan "Jumpandang" yang selama berabad-abad lamanya menandai Kota Makassar pada tahun 1971. Baru pada tahun 1999 kota ini kembali bernama Makassar, tepatnya 13 Oktober berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999.

4.4.22. Kota Pare-Pare di Kotamadya Pare-Pare

Kota Parepare merupakan salah satu dari tiga Kotamadya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Parepare dapat ditempuh dari kota Makassar dengan jarak 155 km. Luas Kota Parepare kurang lebih 99,33 km² dengan jumlah penduduk sekitar 117.500 jiwa. Di awal perkembangannya, dataran tinggi yang sekarang ini disebut Kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh

lubang-lubang tanah yang agak miring, mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan Kota Parepare.

Lontara Kerajaan Suppa menyebutkan, sekitar abad XIV seorang anak Raja Suppa meninggalkan Istana dan pergi ke selatan mendirikan wilayah tersendiri pada tepian pantai karena kegemarannya memancing. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai kerajaan Soreang, kemudian satu lagi kerajaan berdiri sekitar abad XV yakni Kerajaan Bacukiki.

Dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tonapaalangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke Kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, Kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah pada hamparan ini dan spontan menyebut "Bajiki Ni Pare" artinya "(Pelabuhan di kawasan ini) di buat dengan baik". Sejak itulah melekat nama "Parepare". Kota Pelabuhan. Parepare akhirnya ramai dikunjungi termasuk orang-orang melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.

Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Di sinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.

Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no. 1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia). Dan selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian Daerah-daerah tingkat II dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling menjadi Kabupaten Tingkat II, yaitu masing-masing Kabupaten Tingkat II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus Kota Praja Tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah Kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah, maka status Kotamadya berganti menjadi “KOTA” sampai sekarang ini.

4.4.23. Kota Palopo di Kotamadya Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.

Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti :

1). Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Palopo.2).Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi, 3). Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo;4). Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratif Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota.

Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo.



BAB V PEMBAHASAN

5.1. Analisis Sejarah Perkembangan Kota-Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Umumnya, perkembangan kota-kota di Asia Tenggara banyak dibentuk berdasarkan warisan sejarah masa sebelumnya (Nas, 1979:56-57). Menurut dinamika sejarahnya, kota-kota terlahir sebagai akibat pusat-pusat politik tradisional seperti pusat-pusat istana kerajaan, pusat-pusat perkembangan perdagangan seperti di daerah pegunungan, demikian pula di pelabuhan atau wilayah pesisir pantai. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi pergeseran pusat-pusat perdagangan dari pegunungan ke pantai. Perpindahan itu seringkali terjadi karena dinamika politik yang terjadi di pedalaman sebagai akibat perkembangan politik di tingkat internal yang menyebabkan keinginan untuk memisahkan diri, maupun serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya.

Salah satu yang menjadi bahan sorotan para pakar tentang kelemahan teori central places yang dikenalkan oleh Walter Christaller adalah karena teori ini tidak mempertimbangkan faktor sejarah. Dengan latar belakangnya sebagai ahli geografi, teori tersebut mengasumsikan bahwa keadaan penduduk homogen dan tidak mempertimbangkan faktor kebutuhan individu. Dalam penelitian ini, saya mencoba untuk memasukkan unsur sejarah perkembangan kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melengkapi latar belakang alasan suatu kota menjadi pusat pertumbuhan atau memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan. Berikut ini analisis beberapa kota yang memang memiliki sejarah sebagai pusat pertumbuhan dan memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan.

Sejarah perkembangan kota-kota di Provinsi Sulawesi Selatan tidak dapat lepas dari sejarah pergolakan kerajaan-kerajaan yang ada di dalamnya. Satu kerajaan yang sangat terkenal adalah kerajaan Gowa. Kerajaan Gowa yang telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya merupakan cikal bakal dari wilayah inti Kota Makassar. Dari sejarahnya, Kota Makassar sudah menampakkan diri sebagai pusat pertumbuhan. Sejak abad 16, Makassar dengan Bandar Makassar nya sudah menjadi pusat perdagangan. Walaupun telah dirata-tanahkan oleh pasukan Bugis, Belanda, dan sekutunya, Makassar tetap berhasil muncul kembali dengan bantuan Belanda dan menjadi

pusat perdagangan bahkan menjadi bandar internasional pada waktu itu dan pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur.

Dalam sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar di perairan Nusantara. Kerajaan ini juga memunculkan pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang.

Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi kota Makassar. Keuntungan alam menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya subur.

Kota lainnya yang cukup istimewa adalah Kota Pare-Pare. Kota Pare-Pare merupakan salah satu dari tiga Kotamadya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Pare-Pare memiliki luas wilayah terkecil di antara ke 24 Kabupaten/Kota yang ada, namun memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kepadatan penduduk Kota Pare-Pare hanya dapat dikalahkan oleh kepadatan penduduk Kota Makassar. Dengan kata lain, kepadatan penduduk Kota Pare-Pare berada di urutan ke 2 setelah Kota Makassar.

Berdasarkan sejarahnya, Kota Pare-Pare awalnya merupakan Kerajaan Soreang. Melihat posisinya yang strategis sebagai pelabuhan, terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian menjadikannya kota penting di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan.

Selain Kota Makassar dan Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki satu lagi wilayah Kotamadya, yaitu Kota Palopo. Awalnya, Palopo merupakan ibukota Kabupaten Luwu yang kemudian mengalami pemekaran sehingga menjadi satu kotamadya.

Berikut adalah beberapa kabupaten yang memiliki kekhasan dan potensi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan, misalnya Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Suku Toraja mendiami daerah pegunungan, mempertahankan gaya hidup yang khas, dan

masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli serta mirip dengan budaya Nias. Daerah ini merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara wilayah kabupaten ini dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara.

Turis datang ke Sulawesi Selatan biasanya hanya akan pergi ke Tana Toraja, bahkan tempat lainnya di seluruh Sulawesi Selatan masih kalah pamor dibandingkan Tana Toraja. Setelah perjalanan panjang selama 9 jam dengan jalur darat menuju utara melalui jalan raya poros Sulawesi, akan terlihat pemandangan alam dan budaya yang unik.

Kabupaten Tana Toraja dengan ibukotanya Makale telah mengalami pemekaran wilayah, yaitu Kabupaten Toraja Utara yang beribukota di Rantepao. Tana Toraja dibelah oleh satu sungai terbesar di Sulsel yakni sungai Sa'dan. Sungai inilah yang memberikan tenaga pembangkit listrik untuk menyalakan seluruh Makassar. Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara ini memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Perencanaan dan pengelolaan kawasan yang baik akan membantu mengembangkan Kota Makale dan Kota Rantepao sebagai pusat pertumbuhan terutama dengan mendorong fungsinya sebagai kawasan pariwisata.

Selain itu, di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan ada Kabupaten Luwu Timur. Luwu Timur merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Malili adalah ibu kota Kabupaten Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Kabupaten ini menyimpan potensi sumberdaya alam yang cukup menonjol. Di Kabupaten Luwu Timur terdapat tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada. Luwu Timur memiliki potensi pengembangan dan pertumbuhan yang prospektif di masa datang karena karakteristik khusus yang dimilikinya yaitu sebagai wilayah yang memiliki potensi kekayaan sumberdaya alam. Sehingga secara alamiah, Kabupaten Luwu Timur memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Sulawesi Selatan

5.2. Analisis *Primacy* di Provinsi Sulawesi Selatan

Sudah sejak tahun 1939, Mark Jefferson, seorang ahli geografi mengatakan bahwa sebuah kota utama dalam suatu negara besarnya selalu tidak proporsional. Kota *primate* paling tidak, minimal 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kota terbesar berikutnya dan umumnya lebih dari 2 kalinya. Ahli geografi Mark Jefferson mengembangkan hukum

Universitas Indonesia

primate city untuk menjelaskan fenomena kota-kota besar yang menggambarkan proporsi besar dari penduduk seperti aktivitas ekonominya. Kota *primate* ini sering terjadi, tetapi tidak selalu, merupakan ibukota negara.

Masih menurut Jefferson (1939), berlaku hukum *Primate city*, yaitu bahwa di seluruh dunia, ibukota merupakan kota terbesar bukan hanya dalam hal ukuran tapi juga dalam pengaruh. Ukuran dan aktivitasnya menjadi faktor penarik yang menarik migrasi masuk ke kota dan menyebabkan *primate city* menjadi lebih besar dan semakin tidak proporsional dengan kota kecil lainnya.

Pacione (2001) mengungkapkan bahwa sistem perkotaan dapat digolongkan ke dalam skala lokal, regional, nasional, dan global. Pada skala global terdapat kota-kota dunia. Skala nasional terdiri dari kota *primate* dan *megacities*. Pada skala lokal dan regional terdiri dari kota-kota baru, kota metropolitan dan *edge cities* (kota pinggiran). Pacione mengatakan bahwa kota *primate* ada dalam skala nasional. Pembahasan dalam sub bab ini ingin mengkaji, kemungkinan terjadinya kota *primate* dalam skala regional. Jika Pacione mengatakan bahwa kota *primate* ada dalam skala nasional, penelitian ini mencoba mengkaji kemungkinan Kota Makassar sebagai kota *primate* dalam skala regional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan.

5.2.1. Analisis Indeks *Primacy* Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota

Jika penghitungan indeks *primacy* diterapkan pada kota-kota yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa Kota Makassar merupakan kota yang memiliki indeks *primacy* yang paling besar di antara kota-kota lainnya. Penghitungan indeks *primacy* dilakukan dengan menggunakan rumus bahwa indeks *primacy* adalah hasil pembagian antara jumlah penduduk perkotaan dari suatu kota dengan jumlah total penduduk perkotaan pada enam kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghitungan pertama dilakukan dengan menggunakan jumlah penduduk pada 6 Kabupaten/Kota yang memiliki jumlah penduduk terbesar di antara Kabupaten/Kota yang lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan seperti terlihat pada tabel 5.1. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa Kota Makassar merupakan kota yang memiliki indeks *primacy* terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar merupakan kota yang selain besar dari sisi jumlah penduduknya dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

juga memiliki pengaruh yang cukup besar dan memiliki aktivitas ekonomi yang jauh melebihi kota lainnya.

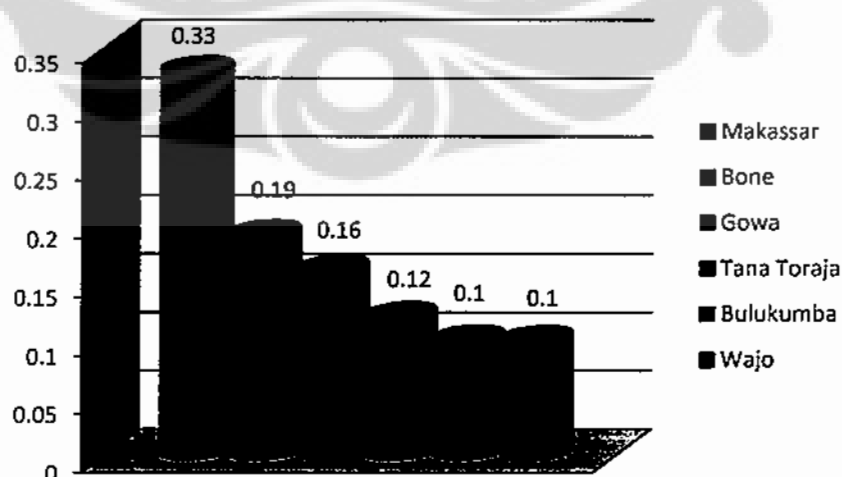
Dari penghitungan indeks primacy tersebut, terlihat bahwa 6 kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bulukumba, dan dan Kabupaten Wajo.

Tabel 5.1
Indeks Primacy 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Rata- Rata
1.	Makassar	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
2.	Bone	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
3.	Gowa	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
4.	Tana Toraja	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
5.	Bulukumba	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
6.	Wajo	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Gambar 5.1
Indeks Primacy 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Jika dilihat dari angka indeks *primacy* nya, berdasarkan tabel dan gambar di atas, Kota Makassar memiliki indeks *primacy* yang jauh melebihi kota lainnya namun belum dapat dikatakan sebagai kota *primate* karena suatu kota umumnya dikatakan sebagai kota *primate* jika paling tidak memiliki indeks *primacy* minimal 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kota terbesar berikutnya dan umumnya lebih dari 2 kalinya.

Sebagai bahan perbandingan, Kota Jakarta merupakan *primate city* karena memiliki indeks *primacy* 0,50, jauh melebihi indeks *primacy* kota-kota besar lainnya di Indonesia.

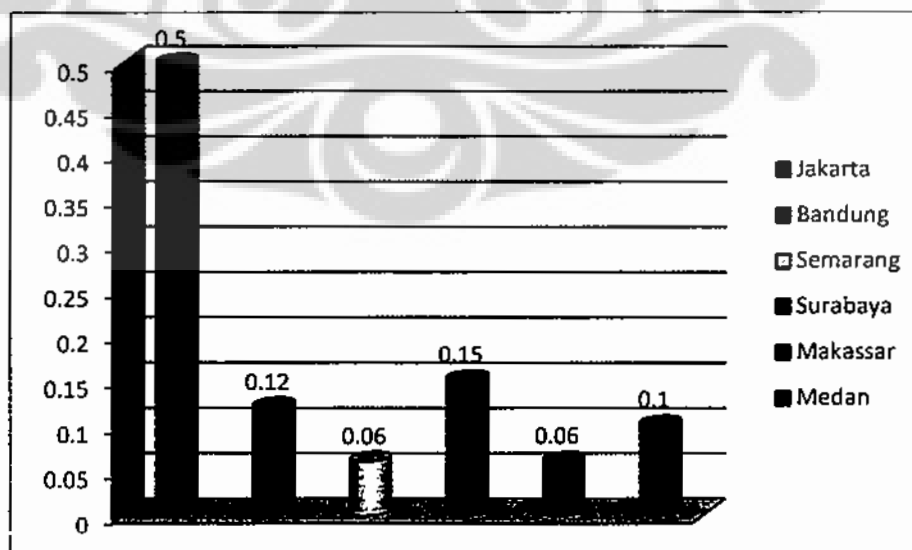
Tabel 5.2

Indeks *Primacy* 6 Kota Terbesar di Indonesia 1995 -2005

No.	Nama Kota	1995	2000	2005	Rata-Rata
1.	Jakarta	0.51	0.50	0.48	0.50
2.	Bandung	0.12	0.13	0.12	0.12
3.	Semarang	0.06	0.06	0.07	0.06
4.	Surabaya	0.15	0.15	0.15	0.15
5.	Makassar	0.06	0.06	0.06	0.06
6.	Medan	0.10	0.10	0.11	0.10

Sumber: diolah dari data BPS, 2010

Gambar 5.2

Indeks *Primacy* Rata-rata 6 Kota Terbesar di Indonesia 1995-2005

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Kota Jakarta memiliki indeks *primacy* lebih dari 3 kali lebih besar dibandingkan dengan Kota terdekat di bawahnya, yaitu Surabaya. Bahkan Kota Makassar hanya memiliki indeks *primacy* 0,06 dan sangat jauh jika dibandingkan dengan Jakarta.

5.2.2. Analisis Indeks *Primacy* Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten/Kota

Jika penghitungan pertama tentang indeks *primacy* dilakukan dengan menggunakan jumlah penduduk berdasarkan wilayah administrasi Kabupaten/Kota nya, penghitungan kedua tentang indeks *primacy* dilakukan dengan menggunakan jumlah penduduk kawasan perkotaan yang berada dalam masing-masing Kabupaten/Kota. Kawasan perkotaan di setiap Kabupaten/Kota ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan kriteria kedekatan lokasinya dengan ibukota kabupaten atau merupakan ibukota kabupaten tersebut. banyaknya status administrasi berupa kelurahan dalam wilayah kecamatan, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduknya. Dari hasil deliniasi kawasan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota, didapat tabel berikut:

Tabel 5.3
Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan
Dalam Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(5)
01	Kab. Selayar	Benteng	30,661
02	Bulukumba	Bulukumba	113,462
03	Bantaeng	Bantaeng	140,506
04	Jeneponto	Bontosunggu	154,599
05	Takalar	Pattalassang	257,974
06	Gowa	Sungguminasa	448,519
07	Sinjai	Sinjai	117,459
08	Maros	Maros	286,226
09	Pangkep	Pangkajene	160,148
10	Barru	Barru	108,032
11	Bone	Watampone	303,561
12	Soppeng	Watansoppeng	192,946
13	Wajo	Sengkang	153,664
14	Sidrap	Rappang	180,005

Kode	Nama Kabupaten/Kota	Nama Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)
15	Pinrang	Pinrang	247,428
16	Enrekang	Enrekang	162,514
17	Luwu	Belopa	122,039
18	Tana Toraja	Makale	103,163
19	Luwu Utara	Masamba	107,717
20	Luwu Timur	Malili	94,491
21	Makassar	Makassar	1,272,349
22	Pare-Pare	Pare-Pare	117,063
23	Palopo	Palopo	143,482

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Dari tabel di atas jika dihitung indeks *primacy* untuk 6 kawasan perkotaan terbesar yang ada. Kota-kota yang merupakan 6 terbesar berdasarkan jumlah penduduk kawasan perkotaan dalam kabupaten/kota adalah Kota Makassar, Gowa, Bone, Maros, Takalar, dan Pinrang. Indeks *primacy* dari masing-masing kota tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

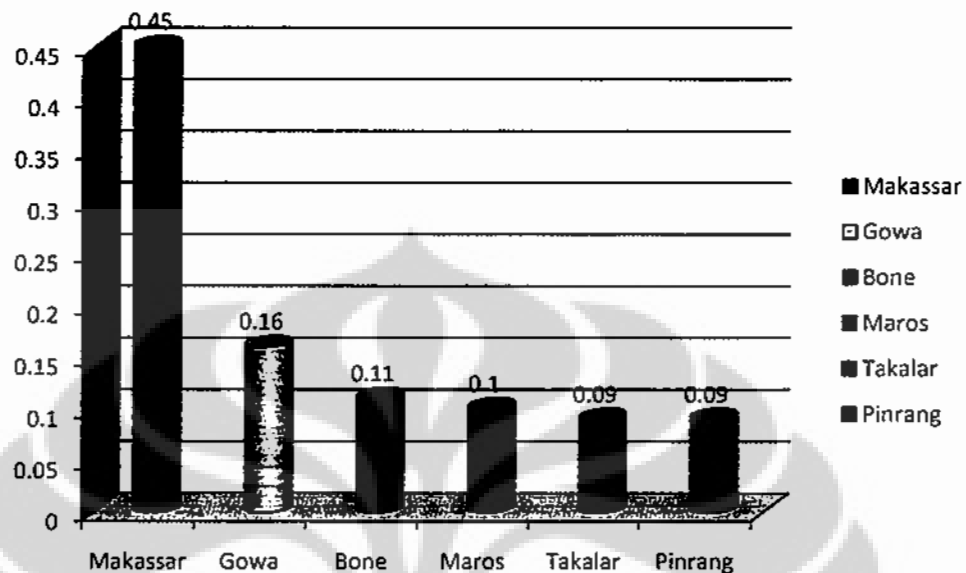
Tabel 5.4

**Indeks *Primacy* 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten/Kota**

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Indeks <i>Primacy</i>
1.	Makassar	Makassar	1,272,349	0.45
2.	Gowa	Sungguminasa	448,519	0.16
3.	Bone	Watampone	303,561	0.11
4.	Maros	Maros	286,226	0.10
5.	Takalar	Pattalasang	257,974	0.09
6.	Pinrang	Pinrang	247.428	0.09
Total			2.816.057	

Sumber: Hasil Analisis, 2010

Gambar 5.3
Indeks *Primacy* 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan dalam Kabupaten/Kota



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Dalam hasil penghitungan indeks *primacy* di atas, terdapat perbedaan dengan hasil penghitungan indeks *primacy* sebelumnya. Jika yang dimasukkan dalam penghitungan hanya kawasan perkotaannya saja, terlihat bahwa Kota Makassar sudah menunjukkan sebagai *primate city*. Indeks *primacy* kota Makassar 0,45 dan hampir 3 kali lipat jika dibandingkan dengan kota yang berada di bawahnya, yaitu Kota Sungguminasa yang berada di Kabupaten Gowa yang hanya memiliki indeks *primacy* 0,16.

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Mark Jefferson, kota *primate* paling tidak, minimal 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kota terbesar berikutnya. Kota Makassar memiliki indeks *primacy* lebih dari 3 kali lipat dari indeks *primacy* yang dimiliki oleh kota Sungguminasa yang terdapat di Kabupaten Gowa sehingga dapat dikatakan bahwa Kota Makassar merupakan kota *primate*.

Hal menarik lainnya yang terlihat dari tabel di atas adalah adanya kenyataan bahwa kawasan perkotaan besar di Provinsi Sulawesi Selatan juga merupakan kawasan perkotaan yang letaknya berdekatan dengan Kota Makassar. Kota Sungguminasa (Kabupaten Gowa), Kota Pattalasang (Kabupaten Takalar), dan Kota Maros (Kabupaten

Maros) merupakan kota-kota yang letaknya berada di sekitar Kota Makassar dan sekarang ini merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Untuk itu perlu dianalisis pula indeks *primacy* jika menggunakan kawasan perkotaan lintas kabupaten.

5.2.3. Analisis Indeks *Primacy* Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Dalam dan Lintas Kabupaten/Kota

Dengan menggunakan jumlah penduduk kawasan perkotaan dalam suatu wilayah administratif Kabupaten/Kota, dihasilkan 3 kawasan perkotaan terbesar selain Makassar, yaitu Kota Sungguminasa (Kabupaten Gowa), Kota Pattalasang (Kabupaten Takalar), dan Kota Maros (Kabupaten Maros). Ketiga kawasan perkotaan berada pada lokasi yang berdekatan dengan Kota Makassar. Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya bersama dengan Kota Makassar, ketiga kawasan perkotaan merupakan satu kesatuan perkotaan membentuk kawasan perkotaan yang lebih besar, yaitu yang sekarang dikenal sebagai Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Kawasan tersebut mencakup kecamatan-kecamatan:

- Di Kota Makassar, meliputi seluruh kecamatan;
- Di Kabupaten Maros, meliputi Kecamatan-Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros baru, Moncongloe, Simbang, Tanra'lili, Tompobulu, dan Turikale;
- Di Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan-Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattalassang, Pallangga, Parangloe, dan Somba Opu;
- Di Kabupaten Takalar meliputi Kecamatan-Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Utara, Mangarabombang, Mappakasunggu, Pattalassang, Palombangkeng Selatan, Palombangkeng Utara, dan Sanrobone

Untuk itu, dalam penghitungan indeks *primacy* yang ketiga, akan dicoba memasukkan kawasan perkotaan Mamminasata sebagai satu kesatuan kawasan perkotaan untuk melihat indeks *primacy*nya terhadap kawasan perkotaan lainnya. Jumlah penduduk yang akan dipakai dalam penghitungan indeks *primacy* berikut ini menggunakan jumlah penduduk yang terdapat dalam kawasan perkotaan Mamminasata.

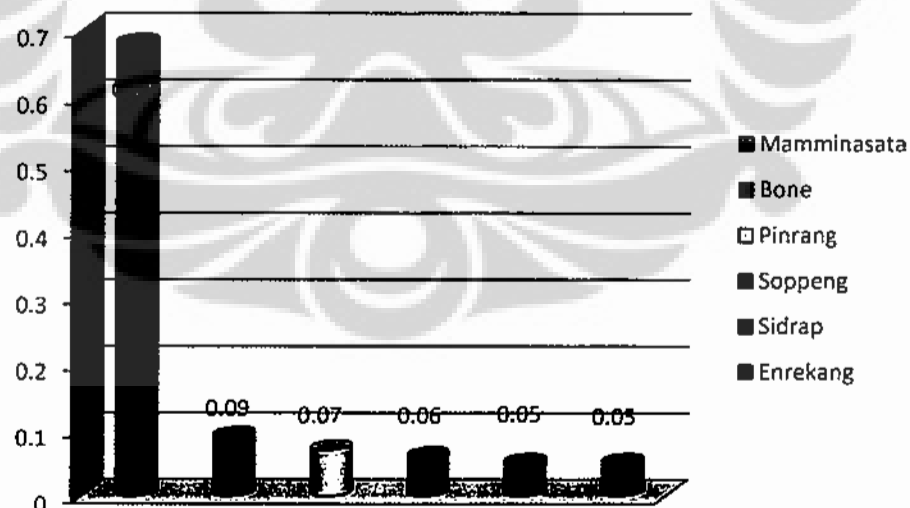
Tabel 5.5
Indeks *Primacy* 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Dalam dan Lintas Kabupaten/Kota

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Nama Ibukota Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Indeks <i>Primacy</i>
1.	Mamminasata	Makassar	2,265,068	0.68
2.	Bone	Watampone	303,561	0.09
3.	Pinrang	Pinrang	247,428	0.07
4.	Soppeng	Watansoppeng	192,946	0.06
5.	Sidrap	Rappang	180,005	0.05
6.	Enrekang	Enrekang	162,514	0.05
Total			3,351,522	

Sumber: Hasil Analisis, 2010\

Gambar 5.4

Indeks *Primacy* 6 Kota Terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jumlah Penduduk Kawasan Perkotaan Dalam dan Lintas Kabupaten/Kota



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Tabel dan gambar di atas menunjukkan secara lebih tegas bahwa Kawasan Mamminasata merupakan kawasan *primate* dengan memiliki indeks *primacy* 0,68 jauh di atas kawasan perkotaan lainnya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Mamminasata

Universitas Indonesia

memiliki indeks *primacy* lebih dari 7 kali lipat jika dibandingkan dengan kawasan perkotaan Watampone yang berada di bawahnya. Ini bisa dipahami karena kawasan perkotaan Mamminasata yang merupakan kawasan yang melibatkan Kota Makassar secara keseluruhan dan beberapa kecamatan yang terdapat dalam 3 kabupaten lainnya memiliki jumlah penduduk yang menjadi lebih besar dibandingkan jika hanya merupakan kawasan perkotaan yang terpisah.

Kota Makassar sebagai kota yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki hirarki perkotaan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan *primate city*. Dari sisi kepadatan penduduk pun terlihat. Kota Makassar memiliki kepadatan penduduk 6 kali lebih padat dibandingkan dengan kota hirarki di bawahnya. Kota Makassar memiliki kepadatan penduduk sebesar 7.132 jiwa/km² sedangkan Kota Parepare sebagai kota yang memiliki hirarki terdekat, hanya memiliki kepadatan 1.184 jiwa/km².

Ini belum ditambah dengan fenomena Kota Makassar menjadi Kota Metropolitan Mamminasata yang semakin membuat Kota Makassar menjadi suatu kawasan perkotaan yang besar, jauh meninggalkan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Bahasan yang dilakukan dalam sub bab ini masih menggunakan indikator jumlah penduduk dan belum menggunakan indikator lainnya di luar jumlah penduduk. Dari hasil penghitungan dengan menggunakan alat ukur jumlah penduduk, terlihat kota-kota yang berpotensi untuk menjadi pusat pertumbuhan di bawah Kota Makassar atau kawasan perkotaan Mamminasata, seperti Kota Watampone, Kota Pinrang, Kota Watansoppeng, Kota Rappang, dan Kota Enrekang. Namun perlu analisis lain yang lebih mendalam untuk mendapatkan kota-kota yang memang memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan di luar kawasan perkotaan Makassar dengan menggunakan indikator selain jumlah penduduk.

Untuk itu, penelitian ini juga akan mengkaji sistem perkotaan eksisting yang ada pada skala regional Provinsi Sulawesi Selatan. Mengkaji pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan di luar Kota Makassar yang bersama kawasan Mamminasata nya telah menjadi kota *primate*, kota yang besar tidak hanya dari sisi ukuran namun juga besar dari sisi pengaruhnya terhadap kota-kota lainnya. Menurut George K Zipf, semakin

besar indeks *primacy* maka semakin kuat pula peranan (dominasi) dan tingkat keutamaan kota tersebut terhadap kota atau wilayah lain pada peringkat di bawahnya.

5.3. Analisis *Rank size rule* di Provinsi Sulawesi Selatan

Banyak peneliti yang telah berupaya untuk menelusuri pola pertumbuhan kota-kota besar dengan menggunakan hukum Zipf dengan *rank-size rule* nya. Zipf (1949) telah menyimpulkan bahwa ukuran distribusi aktivitas ekonomi dari suatu kota akan mengikuti distribusi Pareto, sekaligus juga memiliki bentuk parameter tertentu (jamak dikenal sebagai Hukum Zipf). Dan Hukum Zipf inilah yang menjadi dasar *Rank size rule*, sebuah aturan yang jamak digunakan jika ingin melihat proporsi distribusi aktivitas ekonomi perkotaan.

Inti gagasan *Rank size rule* adalah, secara rata-rata, jumlah penduduk atau tingkat populasi yang ada di suatu kota, jika dikalikan dengan peringkat kota tersebut dalam hierarki aktivitas ekonomi perkotaan di suatu wilayah, adalah sama dengan jumlah populasi yang ada di kota terbesar. Pola keteraturan ini dianggap dapat menjadi solusi bagi *primacy* yang terjadi, yaitu dengan menawarkan solusi berupa penciptaan kota-kota menengah.

Pada tahun 1949, George Zipf merancang teori *rank-size rule* untuk menjelaskan ukuran kota dalam sebuah negara. Beliau menjelaskan bahwa kota kedua dan kota yang lebih kecil menggambarkan keteraturan proporsi dari kota terbesarnya. Sebagai contoh, jika kota terbesar dalam suatu negara berisi 1 juta jiwa penduduk, Zipf menyatakan bahwa kota kedua akan terdiri dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah penduduk kota yang pertama, atau memiliki penduduk 500.000 ribu jiwa. Kota yang memiliki hirarki ke 3 akan memiliki jumlah penduduk $\frac{1}{3}$ jumlah penduduk pada kota pertama, yaitu sebesar 333.333 jiwa, dan kota dengan hirarki ke 4 akan menjadi rumah bagi $\frac{1}{4}$ jumlah kota pertama, atau 250.000 jiwa.

Artinya, jika kita menggunakan *Rank size rule* ini, ketika kita mengalikan jumlah penduduk yang ada di Kota Pare-Pare dengan peringkatnya dalam hierarki aktivitas ekonomi perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan akan sama dengan jumlah penduduk di kota Makassar yang merupakan kota terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti halnya dengan indeks *primacy*, teori *rank size rule* ini juga akan coba dikaji dalam skala regional, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5.6
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kawasan Perkotaan
di Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Nama Kabupaten	Ibukota Kabupaten	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Makassar	Makassar	175.77	1,272,349	7,239
06	Gowa	Sungguminasa	686.51	448,519	653
11	Bone	Watampone	929.17	303,561	327
08	Maros	Maros	1,237.84	286,226	231
05	Takalar	Pattalassang	566.51	257,974	455
15	Pinrang	Pinrang	777.83	247,428	318
12	Soppeng	Watansoppeng	1,140.00	192,946	169
14	Sidrap	Rappang	739.56	180,005	243
16	Enrekang	Enrekang	1,156.30	162,514	141
09	Pangkep	Pangkajene	312.45	160,148	513
04	Jenepono	Bontosunggu	243.78	154,599	634
13	Wajo	Sengkang	487.72	153,664	315
23	Palopo	Palopo	247.52	143,482	580
03	Bantaeng	Bantaeng	208.55	140,506	674
17	Luwu	Belopa	503.77	122,039	242
07	Sinjai	Sinjai	338.17	117,459	347
22	Pare-Pare	Pare-Pare	99.33	117,063	1,179
02	Bulukumba	Bulukumba	187.95	113,462	604
10	Barru	Barru	531.68	108,032	203
19	Luwu Utara	Masamba	1,639.60	107,717	66
18	Tana Toraja	Makale	386.55	103,163	267
20	Luwu Timur	Malili	1,242.87	94,491	76
01	Kab. Selayar	Benteng	136.87	30,661	224

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Tabel 5.7
Rank size rule di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk 2009	Hirarki Kota	Teori <i>Rank-size rule</i>
1.	Makassar	1,272,349	I	$\pm 1,200,000$
2.	Gowa	448,519	II	$\pm 600,000$
3.	Bone	303,561	III	$\pm 400,000$
4.	Maros	286,226	III	$\pm 400,000$
5.	Takalar	257,974	III	$\pm 400,000$
6.	Pinrang	247,428	III	$\pm 400,000$
7.	Soppeng	192,946	IV	$\pm 300,000$
8.	Sidrap	180,005	IV	$\pm 300,000$
9.	Enrekang	162,514	IV	$\pm 300,000$
10.	Pangkep	160,148	IV	$\pm 300,000$
11.	Jeneponto	154,599	IV	$\pm 300,000$
12.	Wajo	153,664	IV	$\pm 300,000$
13.	Palopo	143,482	IV	$\pm 300,000$
14.	Bantaeng	140,506	IV	$\pm 300,000$
15.	Luwu	122,039	IV	$\pm 300,000$
16.	Sinjai	117,459	IV	$\pm 300,000$
17.	Pare-Pare	117,063	IV	$\pm 300,000$
18.	Bulukumba	113,462	IV	$\pm 300,000$
19.	Barru	108,032	IV	$\pm 300,000$
20.	Luwu Utara	107,717	IV	$\pm 300,000$
21.	Tana Toraja	103,163	IV	$\pm 300,000$
22.	Luwu Timur	94,491	IV	$\pm 300,000$
23.	Kab. Selayar	30,661	IV	$\pm 300,000$

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Identifikasi *rank-size rule* di Sulawesi Selatan dilakukan dengan membandingkan antara ukuran perkotaan berdasarkan data yang ada dengan ukuran perkotaan menurut hasil prediksi *rank-size rule*. Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa *rank-size rule*

yang diperkirakan untuk Provinsi Sulawesi Selatan selalu memberikan prediksi ukuran perkotaan yang lebih besar dari ukuran perkotaan aktual.

Tabel tersebut telah menunjukkan bahwa sebaran populasi di Provinsi Sulawesi Selatan cenderung membentuk Kota Makassar sebagai *primate city* yang memiliki perbedaan yang jauh dari kota-kota yang berada di bawahnya dan tidak mengikuti aturan *Rank-size rule*. Terlihat dari hasil pengolahan data di atas, Kota Makassar memiliki populasi kurang lebih 3 kali lebih besar dibandingkan dengan populasi Kota Gowa, kota yang berada pada peringkat yang terdekat dengan Kota Makassar.

Rank-size rule dapat dengan tepat memprediksi ukuran perkotaan jika nilai eksponen pareto, yang menggambarkan distribusi ukuran perkotaan, sama dengan satu. Nilai pareto yang dihasilkan tidak sama dengan satu dan memiliki kecenderungan yang berbeda pada setiap wilayah.

Identifikasi distribusi ukuran perkotaan suatu wilayah dilakukan dengan mengestimasi nilai pareto eksponen yang diperoleh dari penerapan *rank-size rule* dengan menggunakan data penduduk perkotaan pada kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan tahun 2009. Berdasarkan hasil identifikasi nilai eksponen pareto yang diestimasi dapat diketahui bahwa distribusi ukuran perkotaan di Sulawesi Selatan terpolarisasi.

Ini belum ditambah dengan fenomena Kota Makassar menjadi Kota Metropolitan Mamminasata yang semakin membuat Kota Makassar menjadi suatu kawasan perkotaan yang besar jauh meninggalkan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

5.4. Analisis Faktor Pemicu Primacy di Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam sub bab ini saya mencoba untuk menganalisis faktor pemicu dan faktor-faktor yang menyebabkan Kota Makassar menjadi sebuah kota *primate* dalam skala regional. Menurut Pacione (2001) terdapat tujuh faktor pemicu perubahan perkotaan. Fenomena *primacy* juga merupakan salah satu fenomena dalam perubahan perkotaan yang cenderung memusat membentuk suatu kutub pertumbuhan. Dalam penelitian ini analisis faktor pemicu *primacy* dilakukan berdasarkan faktor politik, faktor ekonomi, faktor kelengkapan sarana dan prasarana, faktor demografi, faktor sosial budaya, dan faktor yang tak kalah penting, yaitu faktor sejarah.

5.4.1. Faktor Politik

Yang dimaksud dengan faktor politik di sini terutama menyangkut status Kota Makassar sebagai Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Jefferson (1939) mengatakan bahwa di dunia ini berlaku Hukum Ibukota, bahwa kota terbesar merupakan kota terunggul, tidak hanya dalam ukuran tetapi juga dalam pengaruhnya. Jefferson mengungkapkan berlakunya "*The Law of the Primate City*". Di seluruh dunia, kota primate biasanya merupakan ibukota, tempat berkumpulnya barang-barang terbaik, talenta terbesar, dan pekerja terampil, serta pusat-pusat budaya nasional, kebanggaan dan pengaruh. Namun, manfaat aglomerasi penduduk tersebut juga mengakibatkan biaya yang harus ditanggung dari *urban primacy*, misalnya para pekerja yang harus tinggal dalam permukiman yang padat, kemacetan lalu lintas, degradasi lingkungan, dan kemungkinan terkena penyakit yang lebih tinggi.

Sebuah ibukota menjadi kota yang lebih besar terkait dengan keuntungannya sebagai pusat pemerintahan. Terdapat beberapa hal yang turut mendukung hal tersebut, yaitu:

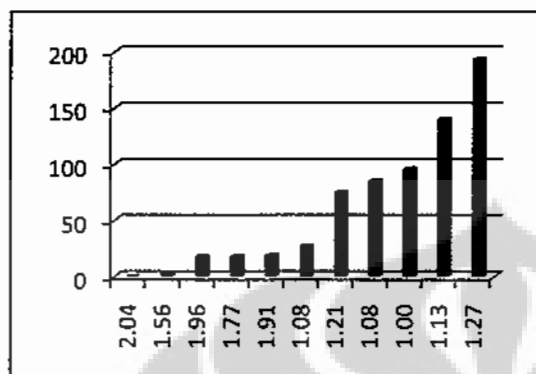
- a. Pemerintahan dan para pegawainya terkonsentrasi di ibukota;
- b. Sebagian besar program pemerintah dialokasikan untuk ibukota;
- c. Ibukota menarik untuk investasi karena infrastruktur lebih lengkap;

Kota Makassar yang berada dalam Wilayah Penelitian merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan sehingga memiliki beragam keuntungan terkait dengan status administrasi pemerintahannya sebagai ibukota provinsi. Yang terutama adalah banyaknya program pemerintah yang masuk ke Kota Makassar yang tentunya semakin menjadikan Kota Makassar sebagai pusat kota dan pusat pertumbuhan bagi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

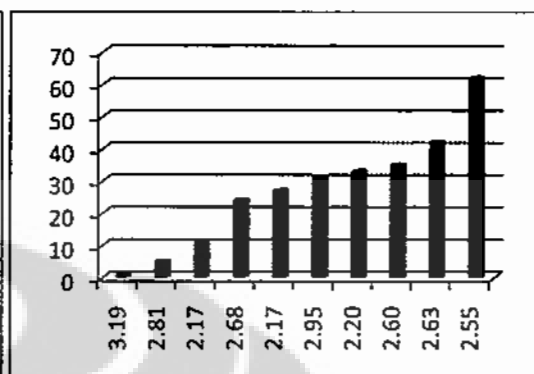
Jika coba melakukan kajian terhadap keterkaitan antara jarak tiap kecamatan terhadap ibukota kabupaten pada masing-masing kabupaten/kota, terdapat hal yang menarik yang juga mendukung hukum ibukota yang juga berlaku pada skala lokal. Terlihat pada gambar berikut bahwa kota-kota kecamatan yang memiliki jarak yang dekat dengan ibukota kabupaten cenderung memiliki skor total dalam sistem perkotaan yang lebih tinggi. Kota-kota kecamatan tersebut pada akhirnya akan berkonurbasi membentuk kawasan perkotaan yang lebih besar.

Gambar 5.5.
Hubungan Jarak ke Kabupaten dan Nilai Skor Total

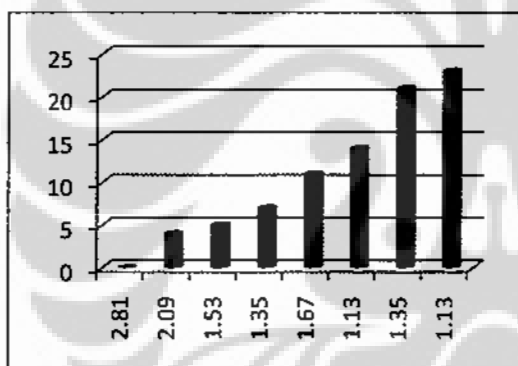
Kabupaten Kepulauan Selayar



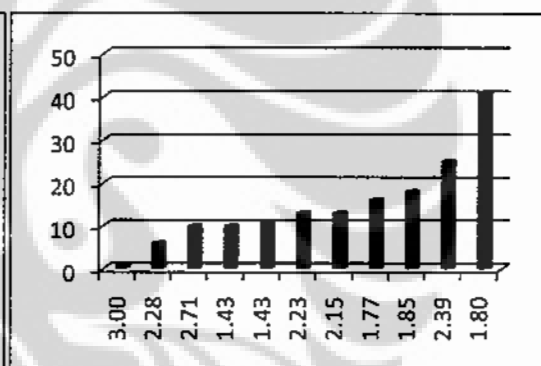
Kabupaten Bulukumba



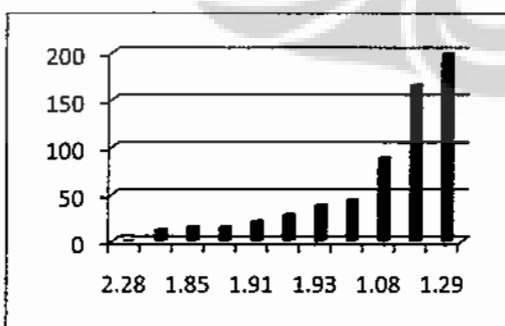
Kabupaten Bantaeng



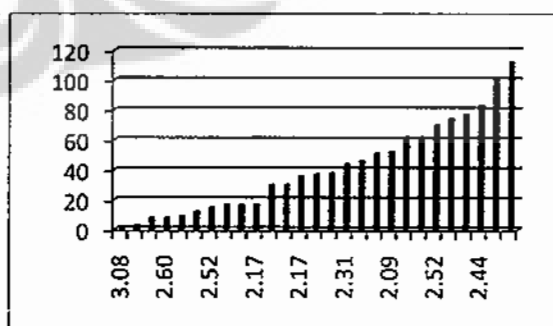
Kabupaten Jeneponto



Kabupaten Luwu Utara



Kabupaten Bone



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

5.4.2. Faktor Ekonomi

Faktor pemicu *primacy* di Provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa terlepas dari faktor ekonomi. Menurut Pacione (2001), faktor ekonomi merupakan faktor yang memiliki pengaruh dominan dalam perubahan perkotaan. Analisis faktor pemicu *primacy* dari sisi ekonomi akan dilihat dari struktur ekonomi berdasarkan peringkat kontribusi PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5.8
Perubahan Peringkat Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 dan 2009

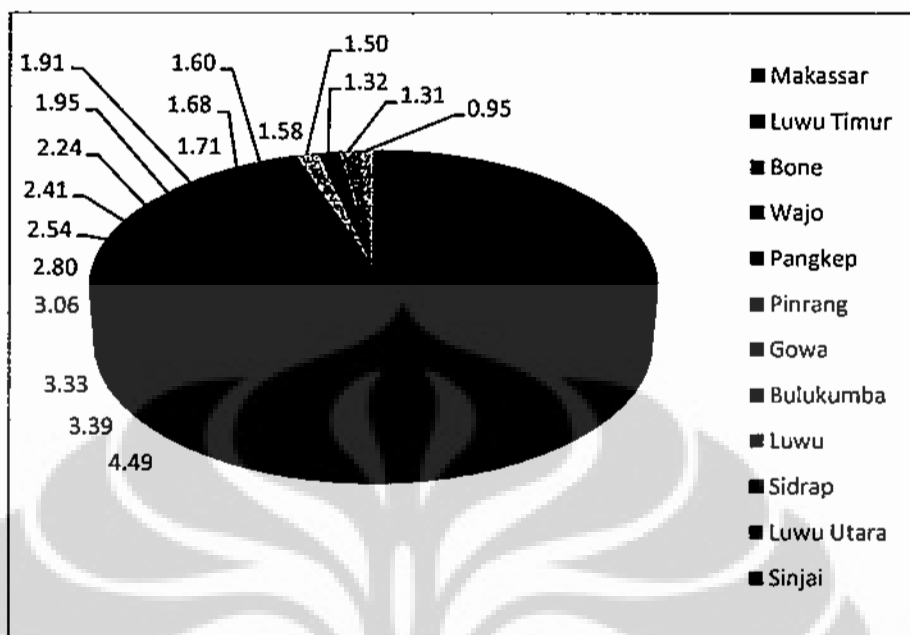
Peringkat	Tahun 2005		Tahun 2009	
	Kab/Kota	Kontribusi	Kab/Kota	Kontribusi
1	Makassar	30.45	Makassar	32.55
2	Luwu Timur	9.97	Luwu Timur	6.68
3	Bone	6.44	Bone	6.68
4	Wajo	4.84	Wajo	4.85
5	Pinrang	4.75	Pangkep	4.79
6	Pangkep	4.61	Pinrang	4.68
7	Gowa	4.11	Gowa	4.49
8	Luwu	3.39	Bulukumba	3.39
9	Bulukumba	3.37	Luwu	3.33
10	Sidrap	2.91	Sidrap	3.06
11	Tana Toraja	2.71	Luwu Utara	2.80
12	Luwu Utara	2.70	Sinjai	2.54
13	Soppeng	2.39	Soppeng	2.41
14	Sinjai	2.33	Maros	2.24
15	Maros	2.30	Jeneponto	1.95
16	Jeneponto	1.97	Takalar	1.91
17	Takalar	1.87	Palopo	1.71
18	Palopo	1.73	Enrekang	1.68
19	Enrekang	1.63	Bantaeng	1.60
20	Barru	1.54	Pare-pare	1.58
21	Pare-pare	1.52	Barru	1.50
22	Bantaeng	1.51	Toraja Utara	1.32
23	Selayar	0.96	Tana Toraja	1.31
24	Toraja Utara	0.00	Selayar	0.95
	Provinsi	100.00		100.00

Sumber: Indikator Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009

Universitas Indonesia

Gambar 5.6

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009



Sumber: Hasil pengolahan data, 2010

Terlihat dari tabel di atas, Kota Makassar menunjukkan *primacy* nya dari sudut ekonomi. Pada tahun 2005, nilai kontribusi PDRB kota Makassar lebih dari 3 kali lipat yang diberikan oleh Kabupaten Luwu Timur yang merupakan peringkat terdekat di bawahnya. Dari data PDRB tahun 2009, kondisi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2005. Kontribusi Kota Makassar terhadap Provinsi Sulawesi Selatan semakin menunjukkan dominasinya sebagai kota *primate*. Nilai kontribusi Kota Makassar sebesar 32,55% sangat jauh berbeda dengan kontribusi yang diberikan oleh Kabupaten Luwu Timur (6,68%) yang merupakan kabupaten dengan nilai kontribusi yang paling dekat. Nilai kontribusi Kota Makassar menunjukkan 5 kali lipat dibandingkan dengan kota terdekat di bawahnya. Ini juga mengindikasikan semakin menguatnya Makassar dalam konstelasi ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki nilai strategis dalam konstelasi pembangunan Indonesia. Selain memiliki sumberdaya alam yang cukup besar, khususnya di bidang Pertanian, Pertambangan dan Pariwisata, Provinsi Sulawesi Selatan letaknya juga strategis, yaitu berada di tengah-tengah Indonesia.

Jika berbicara tentang kota dalam dimensi ekonomi, akan berbeda dengan kota dalam dimensi administratif. Kota dalam dimensi ekonomi memberikan konsekuensi batas-batas kota yang dilihat dari aktivitas ekonomi yang ada dan tidak lagi dari batas administrasi pemerintah. Dapat saja terjadi beberapa kota yang berdekatan, dalam dimensi ekonomi merupakan satu kesatuan. Penggunaan dimensi ekonomi, yaitu aktivitas ekonomi yang digunakan sebagai batas wilayah suatu kota memberikan konsekuensi tersendiri mengenai bentuk struktur distribusi aktivitas ekonomi antarkota tersebut.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pintu gerbang sekaligus berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu Sulawesi Selatan memiliki keunggulan komparatif sekaligus kompetitif untuk kegiatan investasi. Adapun Keunggulan untuk Berinvestasi di Sulawesi Selatan, antara lain:¹

- a. Posisi yang strategis secara ekonomi sehingga berperan sebagai pusat pelayanan angkutan udara dan laut di Kawasan Timur Indonesia dan Pusat pelayanan jasa perdagangan, industri serta perbankan.
- b. Wilayah yang relatif aman bagi kegiatan investasi di Indonesia, gejolak masyarakat dan komunitas buruh relatif rendah.
- c. Keanekaragaman potensi sumberdaya alam untuk investasi. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi kegiatan investasi.
- d. Kawasan Timur Indonesia sebagai pasar potensial yang belum termanfaatkan secara maksimal
- e. Komitmen Pemerintah Daerah yang sangat kuat dalam memberikazn kemudahan bagi Investor
- f. Ketersediaan Sumberdaya manusia yang berkualitas dengan tersedianya cukup banyak universitas yang baik di Provinsi Sulawesi Selatan.
- g. Ketersediaan lahan yang masih luas dan relatif murah.

5.4.3. Faktor Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kota Makassar telah tumbuh menjadi kota yang besar, jauh meninggalkan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan semakin besarnya kota dan beragamnya fasilitas yang mempengaruhi aktivitas ekonomi kota tersebut, Kota Makassar tidak dapat

¹ [www:/potensidaerah.ugm.ac.id/data/PELUANG%20INVESTASI.doc](http://www.potensidaerah.ugm.ac.id/data/PELUANG%20INVESTASI.doc)

lagi dikatakan hanya sebagai kota yang memiliki pola fungsional sebagai Kota Pelabuhan atau kota perdagangan saja, tapi sudah menjadi kota multifungsi.

Hal ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa pelabuhan bukan satu-satunya alternatif transportasi maupun alat distribusi barang di Kota Makassar. Kota Makassar tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas pelabuhan yang ada namun juga yang tak kalah penting adalah peran Bandar Udara Hasannudin sebagai Bandar Udara Pusat Pengumpul Primer disamping keberadaan jaringan transportasi darat yang juga mempengaruhinya. Keberadaan Bandar Udara Hasannudin beserta dengan kelengkapan fasilitas lainnya inilah yang memungkinkan Kota Makassar untuk dikategorikan sebagai Kota Multifungsi.

Dari sudut kelengkapan sarana dan prasarana pun jelas menunjukkan dominasi Kota Makassar dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Beragam fasilitas, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan sudah lengkap tersedia di Kota Makassar. Ini tentunya juga menjadi salah satu faktor pemicu bagi Makassar untuk semakin memantapkan posisinya sebagai kota *primate*.

5.4.4. Faktor Sejarah

Faktor yang tak kalah penting yang turut berkontribusi terhadap keutamaan Kota Makassar adalah faktor sejarahnya. Sejak jaman kerajaan, Kota Makassar sudah menjadi cikal bakal pusat pertumbuhan bagi Pulau Sulawesi maupun sebagai pusat pertumbuhan untuk kawasan timur Indonesia. Analisis faktor sejarah ini sudah diungkapkan pada sub bab sebelumnya.

5.5. Analisis Dampak *Primacy* pada Masyarakat

Gejala menguatnya *primacy* Kota Makassar dengan kawasan perkotaan Mamminasatanya yang membesar hingga ke daerah pinggiran dan jauh meninggalkan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan menimbulkan konsekuensi logis. Semakin *primate* nya Kota Makassar dengan Kawasan Perkotaan Mamminasata menunjukkan bahwa kawasan perkotaan tersebut menguasai daerah belakangnya.

Dilihat dari sejarah perkembangan kotanya, Makassar sejak jaman kolonial dulu telah merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah Sulawesi bahkan bagi wilayah Timur

Indonesia. Sejak jaman kerajaan (pra kolonial) Makassar telah menjadi pusat perdagangan dan juga diuntungkan karena lokasinya yang berada di tepi pantai serta memiliki pelabuhan yang sangat mendukung fungsi Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan.

Makassar sebagai *primate city* tidak akan menjadi masalah jika masyarakat tidak menerima dampak negatif akibat hal tersebut. Kondisi Makassar sebagai *primate city* akan menjadi masalah jika masyarakat menerima lebih banyak kerugian dibandingkan dengan keuntungan dari kotanya. Selama ini masyarakat yang tinggal di Makassar diuntungkan karena dapat menikmati beragam kelengkapan pelayanan dari sebuah kota besar. Namun tentunya juga akan mengalami dampak negatif jika Kota Makassar suatu saat tidak dapat menampung akibat-akibat yang ditimbulkan oleh semakin membesarnya kota. Misalnya: masalah kemacetan, polusi udara, kurangnya lahan untuk permukiman, dan sebagainya.

Makassar sebagai kota *primate* memainkan peran yang dominan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar dengan Mamminasatannya menjadi kawasan yang tidak hanya memiliki konsentrasi tinggi pada sisi populasinya tapi juga memainkan peranan sebagai pusat dalam hal politik, ekonomi, budaya, dan transportasi. Jika dilihat dari sejarah perkembangan kotanya, Makassar sejak awal abad ke 20 telah dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan oleh pemerintahan kolonial untuk kawasan Indonesia Timur. Makassar sudah merupakan pusat perdagangan bagi kawasan-kawasan Indonesia Timur.

Primacy di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mengindikasikan:

- Ketidakmerataan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini akan menjadi tidak baik jika disertai dengan tidak meratanya aspek-aspek lainnya yang berakibat pada tidak meratanya kualitas hidup masyarakat di kota lainnya.
- Rendahnya kemampuan wilayah lain, yaitu kota lainnya, dalam mengembangkan potensi dan sumberdayanya masing-masing untuk menggerakkan kegiatan ekonominya di Indonesia karena sebagian besar sumberdaya finansial dan non-finansial lain seperti sumberdaya manusia berkualitas dan lainnya bergerak pada pusaran Kota Makassar dan sekitarnya.

Namun, terlepas dari itu semua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia menunjukkan hasil yang menggembirakan terkait dengan Kota Makassar. IAP pada tahun 2010 telah melakukan penelitian "*Indonesia Most Liveable City Index*", untuk mengetahui persepsi tingkat kenyamanan hidup di 12 kota besar di Indonesia. Penelitian dilakukan pada Kota Yogyakarta, Manado, Makassar, Bandung, Jayapura, Surabaya, Banjarmasin, Semarang, Medan, Palangkaraya, Jakarta, dan Kota Pontianak. Hasilnya menyatakan bahwa mayoritas masyarakat kota-kota besar di Indonesia merasa tidak nyaman tinggal di kotanya. Namun Kota Makassar memiliki indeks kenyamanan di atas rata-rata bersama dengan Kota Manado, Semarang, dan Bandung.

5.6. Analisis Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Jika pada sub bab sebelumnya analisis terhadap kota-kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan data jumlah penduduk saja, dalam sub bab ini, analisis dilakukan tidak hanya berdasarkan data jumlah penduduk. Saya mencoba untuk menggambarkan kondisi eksisting sistem perkotaan yang ada di Provinsi tidak hanya dari sisi jumlah penduduk, namun juga memasukkan variabel lainnya yang menentukan karakteristik suatu kota

Werner Rutz (1987) telah mencoba untuk memberikan gambaran tentang kota-kota di Indonesia dengan melakukan tinjauan berdasarkan keberadaan jenis-jenis pelayanan yang ada, antara lain layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pelabuhan, perikanan, industri manufaktur, dan pariwisata. Rutz membedakan masing-masing tempat dari fungsinya yang menonjol. Menampilkan kota-kota kecamatan berdasarkan aktivitas ekonominya. Dengan melihat hubungan antara aktivitas ini, memungkinkan untuk mengenali tipe fungsional kota atau permukiman dan bukan pertanian. Jika hanya satu dari kegiatan ekonomi tersebut mendominasi secara relatif atau absolut dalam pola fungsional permukiman, dihasilkan kota dengan tipe fungsi tunggal. Tapi ini sangat jarang terjadi.

Yang lebih sering terjadi adalah kota-kota dengan fungsi kombinasi dari beragam aktivitas perkotaan, misalnya kombinasi fungsi administratif dan komersial. Walaupun memiliki tiga atau empat aktivitas ekonomi yang merupakan bukti dalam pola fungsional permukiman, permukiman tersebut belum dapat dikatakan sebagai "*multifunctional*".

Kombinasi dari empat fungsi terjadi ketika baik industri maupun perikanan secara jelas menentukan ekonomi permukiman seperti halnya pada central services dan transportasi.

Suatu permukiman atau suatu kota dapat dikategorikan sebagai "*multifunctional*" hanya ketika tidak ada satupun aktivitas yang disebutkan di atas yang menonjol atau ketika lebih dari empat aktivitas ekonomi yang menentukan pola fungsional permukiman tersebut. Kategori ini untuk permukiman yang memiliki nilai tinggi dalam seluruh kategori mengacu pada kriteria absolut dari mulai central services, pelabuhan dan layanan transportasi lain, perikanan, industri manufaktur dan pertambangan, serta pariwisata, atau untuk tempat yang lebih kecil, suatu permukiman yang diperlengkapi oleh pusat dengan tingkat yang lebih rendah.

Menurut Rutz, Kota Makassar merupakan kota yang dicirikan oleh fungsinya sebagai kota pelabuhan karena memiliki tingkat signifikansi III untuk kategori pelabuhan. Ini berarti pelabuhan Makassar merupakan bukti bagi pola fungsional Kota Makassar. Namun itu merupakan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan Rutz pada tahun 1985. Keadaan tersebut belum tentu sama dengan kondisi yang sekarang. Pada kenyataannya sekarang, Kota Makassar telah tumbuh menjadi kota yang cukup besar. Dengan semakin besarnya kota dan beragamnya fasilitas yang mempengaruhi aktivitas ekonomi kota tersebut, Kota Makassar tidak dapat lagi dikatakan hanya sebagai kota yang memiliki pola fungsional sebagai Kota Pelabuhan.

Pelabuhan bukan satu-satunya alternatif transportasi maupun alat distribusi barang di Kota Makassar. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa Kota Makassar tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas pelabuhan yang ada namun juga yang tak kalah penting adalah peran Bandar Udara Hasanudin sebagai Bandar Udara Pusat Penyebaran Primer disamping keberadaan jaringan transportasi darat yang juga mempengaruhinya. Walaupun memang keberadaan Bandar Udara Hassanudin tidak serta merta menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang dapat dikategorikan tempat yang memiliki karakteristik fungsi transportasi udara seperti halnya Kota Sentani dan Kota Wamena di Papua yang transportasi udaranya mendominasi kotanya. Keberadaan Bandar Udara Hasanudin beserta dengan kelengkapan fasilitas lainnya inilah yang memungkinkan Kota Makassar untuk dikategorikan sebagai Kota Multifungsi.

Kota Makassar dapat dikatakan sebagai kota multifungsi karena seluruh fasilitas pelayanan yang ada dalam bahasan Rutz terutama dalam menunjang aktivitas ekonominya ada di Kota Makassar dalam jumlah dan kelengkapan yang sangat memadai. Berdasarkan kriteria yang telah dikemukakan oleh Rutz, Kota Makassar merupakan kota yang dapat dikategorikan sebagai “*multifunctional*” karena tidak ada satupun aktivitas yang disebutkan di atas yang menonjol terhadap kota tersebut. Kota Makassar berikut dengan kawasan Mamminasata nya telah menjadi *primate city* yang memiliki pengaruh yang kuat bagi wilayah lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan untuk wilayah Timur Indonesia.

Analisis sistem perkotaan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan pengelompokan perkotaan sesuai karakteristik utama dan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Pengolahan data menghasilkan hirarki wilayah yang memiliki nilai tertinggi sampai nilai terendah. Selain itu dilakukan analisis untuk menghasilkan variabel-variabel yang dominan dalam menentukan tingkat kekotaan.

Telah cukup banyak pakar yang mengatakan bahwa hirarki perkotaan tidak dapat dilihat dari hirarki penduduknya saja karena banyak hal yang mempengaruhi sistem perkotaan dalam suatu wilayah. Untuk itu, penelitian ini mencoba untuk memasukkan variabel lain yang mendukung karakteristik suatu kota.

1. Variabel penduduk dan status wilayah

Analisis *rank size rule* dan analisis *primacy* dalam sub bab sebelumnya hanya menggunakan data jumlah penduduk. Untuk menggambarkan kondisi eksisting sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan, penelitian ini memasukkan variabel kepadatan penduduk dan persentasi jumlah kelurahan dalam kecamatan yang bersangkutan. Persentase jumlah kelurahan digunakan sebagai salah satu variabel dengan pertimbangan bahwa suatu wilayah yang memiliki status sebagai kelurahan tentunya memiliki karakteristik perkotaan. Sehingga semakin besar persentasi jumlah kelurahan yang ada dalam kecamatan, maka semakin tinggi pula *score* dari variabel ini.

2. Variabel fasilitas pendidikan

Variabel fasilitas pendidikan dimasukkan ke dalam salah satu faktor yang dipertimbangkan karena dengan semakin banyak dan semakin lengkapnya layanan fasilitas pendidikan akan menggambarkan dan memperkuat karakteristik kota.

3. Variabel fasilitas kesehatan

Sama halnya dengan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dimasukkan ke dalam salah satu variabel karena dengan semakin banyaknya fasilitas kesehatan juga menunjukkan semakin tingginya fungsi pelayanan kota yang dijalankan oleh kota tersebut.

4. Variabel perdagangan

Variabel perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain nilai yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya semakin tinggi nilai dari usaha mikro, kecil dan menengah dapat mengindikasikan karakteristik kota yang lebih tinggi. Selain itu digunakan pula variabel jumlah KUD dan jumlah non KUD.

5. Variabel PDRB

Selama ini pengukuran perubahan struktur ekonomi dihitung berdasarkan persentase sumbangan masing-masing aktivitas sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku untuk cakupan wilayah provinsi atau wilayah administrasi yang lebih kecil. Analisis sistem perkotaan yang dilakukan dalam penelitian ini memasukkan variabel PDRB sebagai salah satu variabel karena variabel ini juga banyak digunakan untuk melihat kondisi perekonomian suatu daerah atau wilayah. Pada penghitungan dalam penelitian, dimasukkan variabel kontribusi masing-masing kabupaten terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Besarnya kontribusi PDRB ini cukup bervariasi sebab setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda, seperti dalam hal ketersediaan sumberdaya alam, faktor-faktor produksi, infrastruktur penunjangnya, dan kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki wilayah tersebut.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan sehingga data-data yang digunakan dalam penelitian merupakan data kecamatan-kecamatan yang ada di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan digunakan metode *scoring* atau biasa pula disebut sebagai metode pembobotan.

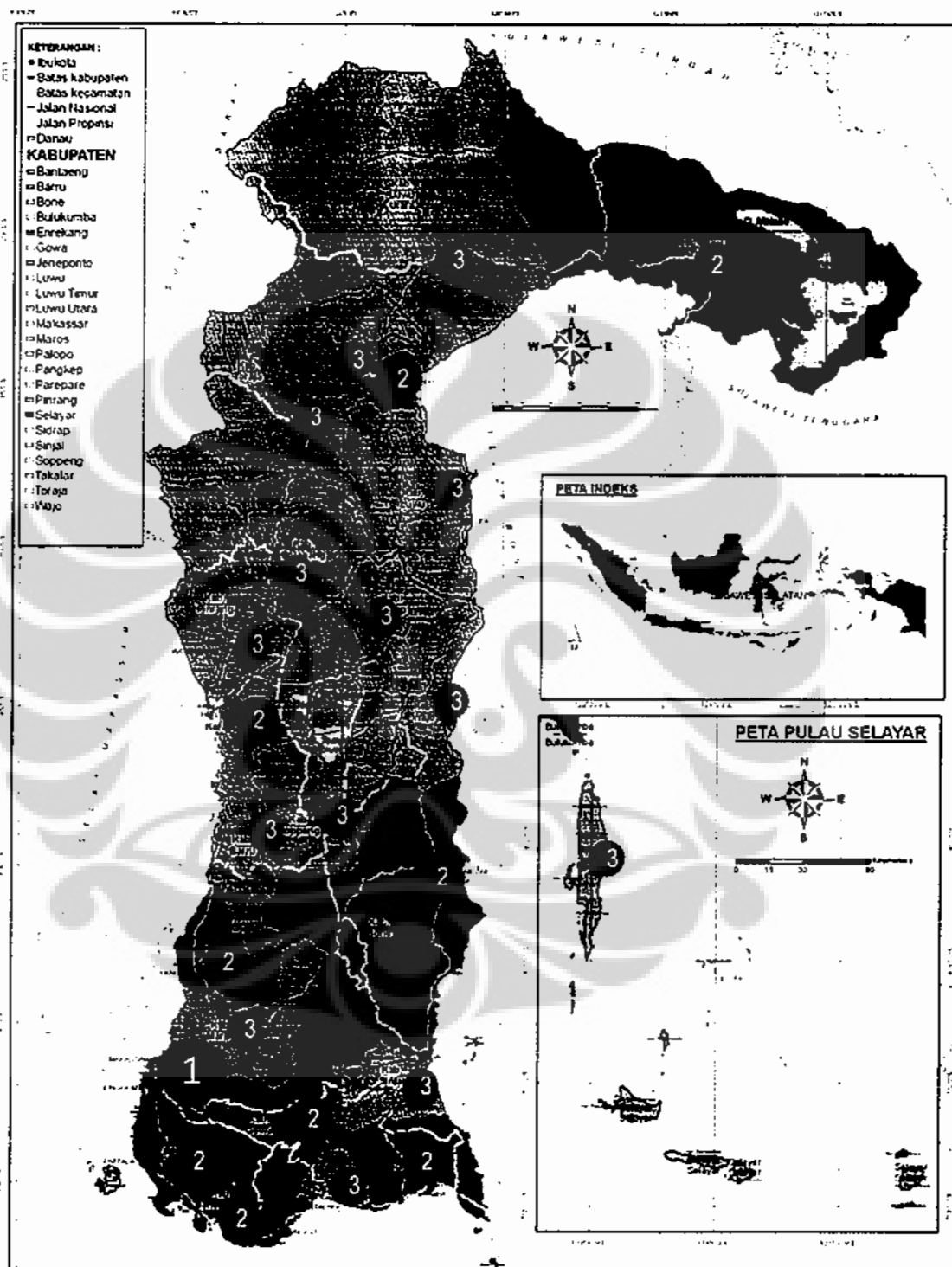
Nilai rata-rata *score* dari masing-masing variabel kemudian dikalikan dengan angka kontribusi untuk mendapatkan *score* akhir dari masing-masing variabel. Pada akhirnya, *score* masing-masing variabel dijumlahkan sehingga didapat *score* akhir untuk masing-masing Kecamatan. Sebagai hasil akhir, *score* masing-masing kecamatan dalam kabupaten/kota yang sama diambil rata-ratanya untuk kemudian menghasilkan hirarki dari masing-masing kabupaten.

Tabel 5.9
Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Kab./Kota	<i>Score</i> Penduduk	<i>Score</i> Pendidikan	<i>Score</i> Kesehatan	<i>Score</i> Perdagangan	<i>Score</i> PDRB	<i>Score</i> Total	Hasil Akhir Kab.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01. Kep. Selayar	0.26	0.32	0.35	0.33	0.20	1.46	III
02. Bulukumba	0.51	0.65	0.40	0.44	0.60	2.59	II
03. Bantaeng	0.45	0.25	0.33	0.40	0.20	1.63	III
04. Jeneponto	0.49	0.65	0.37	0.38	0.20	2.09	II
05. Takalar	0.51	0.45	0.39	0.48	0.20	2.03	II
06. Gowa	0.55	0.44	0.39	0.52	0.60	2.50	II
07. Sinjai	0.38	0.47	0.47	0.32	0.20	1.83	III
08. Maros	0.38	0.30	0.42	0.35	0.20	1.66	III
09. Pangkep	0.34	0.33	0.49	0.36	0.60	2.12	II
10. Barru	0.33	0.49	0.43	0.26	0.20	1.70	III
11. Bone	0.32	0.49	0.25	0.37	1.00	2.43	II
12. Soppeng	0.38	0.50	0.48	0.23	0.20	1.80	III
13. Wajo	0.35	0.41	0.35	0.26	0.60	1.97	III
14. Sidrap	0.45	0.42	0.28	0.37	0.40	1.93	III
15. Pinrang	0.41	0.43	0.28	0.27	0.60	1.99	III
16. Enrekang	0.32	0.46	0.34	0.29	0.20	1.62	III
17. Luwu	0.23	0.31	0.30	0.36	0.60	1.80	III
18. Tana Toraja	0.31	0.27	0.21	0.30	0.20	1.30	III
19. Luwu Utara	0.30	0.48	0.36	0.41	0.20	1.74	III
20. Luwu Timur	0.24	0.37	0.36	0.38	1.00	2.35	II
21. Toraja Utara	0.32	0.23	0.25	0.21	0.20	1.21	III
22. Makassar	0.97	0.82	0.58	0.73	1.00	4.10	I
23. Pare-Pare	0.73	0.62	0.37	0.53	0.20	2.45	II
24. Palopo	0.53	0.34	0.38	0.56	0.20	2.00	II

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2010

Gambar 5.7
Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Tanpa Mamminasata



Sumber: Hasil Analisis, 2010

Untuk memudahkan analisis, tabel di atas dapat pula disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Hasil Pengolahan Data

No.	Hirarki I	No	Hirarki II	No	Hirarki III
1	Makassar	1.	Kabupaten Bulukumba	1.	Kabupaten Kep. Selayar
		2.	Kabupaten Jeneponto	2.	Kabupaten Bantaeng
		3.	Kabupaten Takalar	3.	Kabupaten Sinjai
		4.	Kabupaten Gowa	4.	Kabupaten Maros
		5.	Kabupaten Pangkep	5.	Kabupaten Barru
		6.	Kabupaten Bone	6.	Kabupaten Soppeng
		7.	Kabupaten Luwu Timur	7.	Kabupaten Wajo
		8.	Kotamadya Pare-Pare	8.	Kabupaten Sidrap
		9.	Kotamadya Palopo	9.	Kabupaten Pinrang
				10.	Kabupaten Enrekang
				11.	Kabupaten Luwu
				12.	Kabupaten Tana Toraja
				13.	Kabupaten Luwu Utara
				14.	Kabupaten Toraja Utara

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Terdapat beberapa temuan yang menarik untuk dianalisis berdasarkan hasil pengolahan data di atas:

1. Kota Makassar sudah dapat dipastikan merupakan kota yang memiliki hirarki yang paling tinggi di antara kota-kota lainnya. Dilihat dari skor totalnya, Kota Makassar memang unggul dalam seluruh variabel. Kota Makassar memiliki skor total 4,10 jauh jika dibandingkan dengan kota terdekat di bawahnya, yaitu Bulukumba yang hanya memiliki skor 2,59.
2. Kota-kota yang memiliki hirarki II, tampak mengerucut di sekitar Kota Makassar. Di antara 9 Kabupaten/Kota yang berada di hirarki II terdapat 6 kota yang berlokasi di bagian selatan Provinsi, yaitu: Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone. Hal ini mengindikasikan bahwa:

- Kota Makassar memiliki pengaruh yang kuat dalam urbanisasi yang terjadi pada kota-kota sekitar Makassar.
 - Terdapat perbedaan yang cukup lebar antara kota-kota yang berada di bagian Selatan dengan kota-kota yang berada di bagian Utara.
3. Kenyataan bahwa kota-kota yang terletak di sekitar Kota Makassar memiliki hirarki II mengindikasikan terjadinya konurbasi pada kawasan Kota Makassar dan sekitarnya, sesuai dengan yang dikenal dengan Kawasan Mamminasata. Kota Makassar tidak dapat berdiri sendiri namun telah menjadi satu kesatuan dari sisi aktivitas ekonominya dengan kota-kota di sekitarnya, yaitu Kota Maros, Kota Sungguminasa, dan Kota Takalar.
 4. Kota-kota hirarki II lainnya yang berada di bagian utara dapat menjadi pusat pertumbuhan bagi kawasan sekitarnya sehingga tidak terlalu berorientasi pada bagian selatan saja. Kabupaten Luwu Utara dapat menjadi pusat pertumbuhan untuk bagian utara Provinsi dan Kota Palopo dapat dijadikan pusat pertumbuhan pada kawasan tengah.
 5. Dari hasil pengolahan data terlihat bahwa Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan. Walaupun dalam rencana sistem perkotaan Sulawesi Selatan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur hanya ditempatkan sebagai PKL, namun Luwu Timur memiliki potensi jika dilihat dari sisi ekonomi. Investor menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Timur tanpa mempertimbangkan posisi Luwu Timur dari sistem perkotaannya. Jika dilihat dari nilai PDRB dan nilai usaha MKM nya, kabupaten Luwu Timur termasuk Kabupaten yang memiliki *share* yang tinggi. Investor menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Timur lebih pada sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur.
 6. Jika dicermati lebih jauh lagi, ternyata faktor yang berperan besar dalam menjadikan Kabupaten Luwu Timur sebagai kota yang memiliki peran cukup tinggi adalah dari sisi PDRB nya. Ternyata di Kabupaten Luwu Timur terdapat perusahaan INCO (perusahaan nikel) yang berkontribusi besar terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur. Namun penempatan investasi yang tinggi di Kabupaten Luwu Timur tidak akan memiliki dampak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut jika investasi yang dilakukan tidak memiliki "*trickling down effect*" bagi masyarakat di sekitar lokasi investasi. Investasi yang dilakukan di Luwu Timur tidak akan memiliki arti banyak bila kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur tidak melibatkan masyarakat setempat.

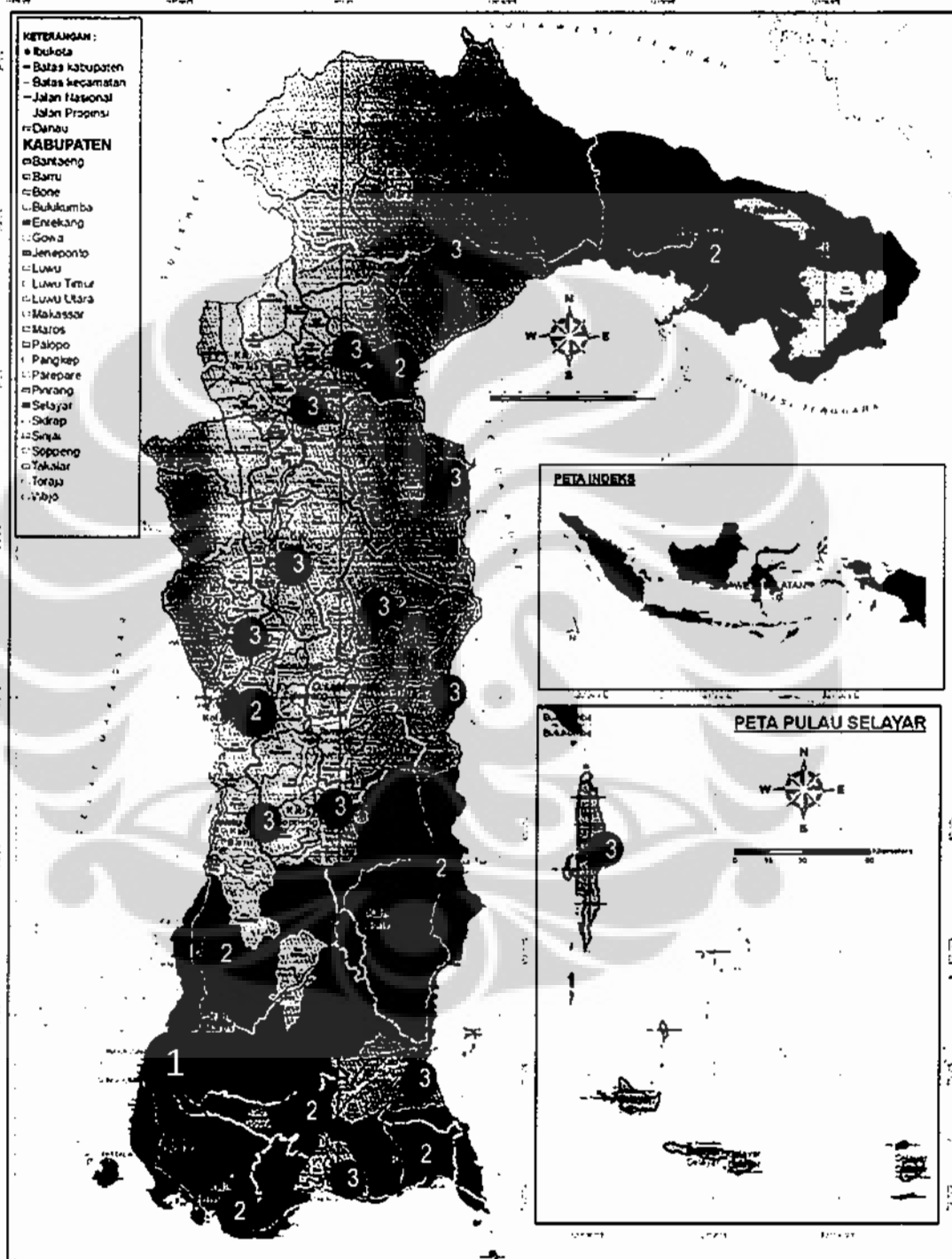
Kecenderungan mengerucutnya kota-kota yang memiliki hirarki II di wilayah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di sekitar Kota Makassar mengindikasikan adanya proses konurbasi. Dengan adanya konurbasi pada Kota Makassar dan kota-kota di sekitarnya, membuat sistem perkotaan menjadi:

Tabel 5.11
Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan
dengan Pusat Mamminasata

No.	Hirarki I	No	Hirarki II	No	Hirarki III
1	Makassar dan sekitarnya (Mamminasata: Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar)	1.	Kabupaten Bulukumba	1.	Kabupaten Kep. Selayar
		2.	Kabupaten Jeneponto	2.	Kabupaten Bantaeng
		3.	Kabupaten Pangkep	3.	Kabupaten Sinjai
		4.	Kabupaten Bone	4.	Kabupaten Barru
		5.	Kabupaten Luwu Timur	5.	Kabupaten Soppeng
		6.	Kotamadya Pare-Pare	6.	Kabupaten Wajo
		7.	Kotamadya Palopo	7.	Kabupaten Sidrap
		.		8.	Kabupaten Pinrang
				9.	Kabupaten Enrekang
				10.	Kabupaten Luwu
				11.	Kabupaten Tana Toraja
				12.	Kabupaten Luwu Utara
				13.	Kabupaten Toraja Utara

Sumber : Hasil Analisis, 2010

Gambar 5.8
Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Mamminasata



Sumber: Hasil Analisis, 2010

5.7. Sistem Perkotaan Berdasarkan Perda Provinsi Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

5.7.1. Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Perda Provinsi Nomor 44 Tahun 2001

Berdasarkan Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, nomenklatur yang digunakan untuk sistem perkotaan adalah sistem kota-kota. Dalam Perda Prov. Nomor 44 Tahun 2001, sistem perkotaan tercantum pada pasal 34 tentang Arahana Pengembangan Sistem Kota-Kota. Mengacu pada RTRWN, yang dimaksud dengan :

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) setara dengan Pusat Pelayanan Nasional (PPN)
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) setara dengan Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW)
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) setara dengan ----- (tidak ada data, tidak tercantum dalam RTRW Provinsi)

Perda No. 44/2001 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan tidak mencantumkan PKL dan sistem kota-kota yang ada hanya mencakup kota-kota setara PKN dan PKW saja.

Perlu diketahui bahwa, saat penyusunan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditetapkan dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Mamuju masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, Mamuju merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Barat dan merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Sulawesi Barat adalah provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju.

Kota Makassar sudah dapat dipastikan merupakan kota yang memiliki hirarki yang paling tinggi di antara kota-kota lainnya. Kota Makassar sudah dapat dipastikan merupakan kota yang memiliki hirarki yang paling tinggi di antara kota-kota lainnya.

Tabel 5.12
Sistem Perkotaan Menurut Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 44/2001
Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

No.	PKN	No	PKW	No	PKL
1	Makassar	1.	Kota Pare-Pare		Tidak dicantumkan
		2.	Kota Watampone		
		3.	Kota Palopo		
		4.	Kota Bulukumba		
		5.	Kota Mamuju		

Sumber : Disarikan dari Lampiran Perda No. 9/2009 tentang RTRW P Sulawesi Selatan

5.7.2. Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Perda Provinsi Nomor 9 Tahun 2009

Sistem perkotaan yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 berbeda dengan sistem perkotaan yang ditetapkan dalam Perda Prov. Nomor 44 Tahun 2001. Selain karena perbedaan area wilayah provinsi, yaitu karena adanya pemekaran Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Hirarki sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan dengan menetapkan pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.

Sistem perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan tercantum pada Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 14. Dalam Perda yang baru ini, sudah mencantumkan PKL yang dalam Perda sebelumnya tidak dicantumkan. Metropolitan Mamminasata yang terdiri dari Kota Makassar, Kota Maros, Kota Sungguminasa dan Kota Takalar ditetapkan sebagai PKN dan relatif terletak di pantai barat Sulawesi Selatan. Kawasan Mamminasata berfungsi sebagai pusat jasa pelayanan perbankan yang cakupan pelayanannya berskala nasional; pusat pengolahan dan atau pengumpul barang secara nasional khususnya KTI, menjadi simpul transportasi udara maupun laut skup pelayanan nasional, pusat jasa publik lainnya seperti pendidikan tinggi dan kesehatan yang skup pelayanannya nasional khususnya KTI, berdaya dorong pertumbuhan wilayah sekitarnya, dan menjadi pintu gerbang internasional terutama jalur udara dan laut.

PKN Mamminasata yang berada di: wilayah Kota Makassar meliputi Kecamatan-kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Makassar, Mamajang, Manggala, Mariso,

Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, Ujung Tanah, dan Wajo.

Tabel 5.13
Sistem Perkotaan Menurut Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 09/2009
Tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

No	PKN	No	PKW	No	PKL
1	Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar (Mamminasata) Wilayah PKN Mamminasata di Kota Makassar meliputi seluruh kecamatan; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten Maros meliputi Kecamatan-Kecamatan Bantimurung, Bontoa, Cenrana, Mandai, Marusu, Maros baru, Moncongloe, Simbang, Tanra'lili, Tompobulu, dan Turikale; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten Gowa meliputi Kecamatan-Kecamatan Bajeng, Barombong, Bontomarannu, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Manuju, Pattallassang, Pallangga, Parangloe, dan Somba Opu; Wilayah PKN Mamminasata di Kabupaten Takalar meliputi Kecamatan-Kecamatan Galesong Selatan, Galesong Utara, Mangarabombang, Mappakasunggu, Pattallassang, Palombangkeng Selatan, Palombangkeng Utara, dan Sanrobone	1. Pangkajene di Kabupaten 2. Pangkajene; Kepulauan 3. Jeneponto di Kabupaten 4. Jeneponto; Kota Palopo; 5. Watampone di Kabupaten Bone; 6. Bulukumba di Kabupaten 7. Bulukumba; Barru di Kabupaten Barru; Kota Parepare.	1. Bantaeng di Kabupaten bantaeng; 2. Enrekang di Kabupaten Enrekang; 3. Masamba di Kabupaten Luwu utara; 4. Belopa di Kabupaten Luwu; 5. Malili di Kabupaten Luwu Timur; 6. Pinrang/Watansawitto di Kabupaten Pinrang; 7. Pangkajene di Kabupaten Sidenreng-Rappang; 8. Benteng dan Pamatata* di Kabupaten Kepulauan Selayar; 9. Sinjai di Kabupaten Sinjai; 10. Watansoppeng di Kabupaten Soppeng; 11. Makale di Kabupaten Tana Toraja; 12. Rantepao di Kabupaten Toraja Utara; 13. Sengkang di Kabupaten Wajo.		

Sumber: Lampiran Perda Provinsi Sulawesi Selatan No.9 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan

5.7.3. Persandingan Sistem Perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Perda Provinsi No. 44 Tahun 2001 dan Perda Provinsi No. 9 Tahun 2009

Pada dasarnya, berbagai pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan mempunyai keterkaitan yang sinergis dengan dukungan prasarana wilayah baik berupa jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, terminal, setasiun kereta api, jaringan listrik, jaringan irigasi, jaringan air bersih, jaringan informasi dan telekomunikasi. Selain itu, perlu pula mempertimbangkan ketersediaan beragam fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas ibadah, fasilitas rekreasi dan olahraga, pasar dan sebagainya yang mendukung keadilan dan kualitas pelayanan publik di semua tempat baik metropolitan, kota sedang, kota kecil maupun desa. Untuk memudahkan menganalisis sistem perkotaan yang ada di kedua Perda dilakukan persandingan antara kedua Perda tersebut. Terdapat perbedaan antara sistem perkotaan yang terdapat dalam Perda No. 44 / 2001 dan yang terdapat dalam Perda No. 9 Tahun 2009.

Tabel 5.14

Persandingan Sistem Perkotaan dalam Perda Provinsi Sulawesi Selatan No 44 Tahun 2001 dengan Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009.

No.	Sistem Perkotaan	Perda No. 44 Tahun 2001	Perda No. 9 Tahun 2009
1.	PKN	1. Makassar	1. Mamminasata: (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar)
2.	PKW	1. Kota Pare-Pare 2. Kota Watampone 3. Kota Palopo 4. Kota Bulukumba 5. Kota Mamuju	1. Pangkajene di Kabupaten Pangkajene Kepulauan 2. Jeneponto di Kabupaten Jeneponto 3. Kota Palopo 4. Watampone di Kabupaten Bone 5. Bulukumba di Kabupaten Bulukumba 6. Barru di Kabupaten Barru 7. Kota Parepare

No	Sistem Perkotaan	Perda No. 44 Tahun 2001	Perda No. 9 Tahun 2009
3.	PKL	Tidak ada	1. Bantaeng di Kabupaten Bantaeng; 2. Enrekang di Kabupaten Enrekang; 3. Masamba di Kabupaten Luwu utara; 4. Belopa di Kabupaten Luwu; 5. Malili di Kabupaten Luwu Timur; 6. Pinrang/Watansawitto di Kabupaten Pinrang; 7. Pangkajene di Kabupaten Sidenreng-Rappang; 8. Benteng dan Pamatata* di Kabupaten Kepulauan Selayar; 9. Sinjai di Kabupaten Sinjai; 10. Watansoppeng di Kabupaten Soppeng; 11. Makale di Kabupaten Tana Toraja; 12. Rantepao di Kabupaten Toraja Utara; 13. Sengkang di Kabupaten Wajo.

Sumber : Diolah dari Perda Prov Sulawesi Selatan No. 44/2001 dan No. 9/2009

Perbedaan tersebut disebabkan oleh penambahan kota-kota menjadi hirarki yang lebih tinggi atau karena perluasan kota yang masuk ke dalam suatu hirarki. Misalnya :

1. Awalnya yang ditetapkan menjadi PKN pada Perda No. 44/2001 hanya Kota Makassar. Pada Perda No. 9/2009, yang menjadi PKN tetap berpusat pada Kota Makassar, namun Kota Makassar tersebut telah menjadi satu kesatuan dengan kota-kota lainnya dan membentuk Kawasan Perkotaan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Ini menandakan bahwa Kota Makassar tetap menjadi Kota Utama di Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak ada kota yang dapat menggantikan Kota Makassar atau paling tidak mengimbangi perkembangan Kota Makassar. Kecenderungan ini juga bisa terlihat dari hasil analisis sejarah perkembangan Kota Makassar. Dari awal, Kota Makassar telah menjadi pusat bagi wilayah Sulawesi bahkan Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar bahkan membutuhkan untuk melakukan konurbasi dengan kota-kota di sekitarnya untuk membentuk suatu kawasan perkotaan Mamminasata.
2. Kawasan Mamminasata yang secara sinergis peran dan fungsi pelayannya dilakukan oleh kota-kota Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar, diharapkan berperan sebagai:

- pusat kegiatan industri dan perdagangan oleh berbagai perusahaan internasional, nasional maupun lokal;
- pusat kegiatan perbankan nasional dengan pelayanan sampai skala internasional;
- pusat kegiatan pendidikan tinggi yang beberapa program studinya bertaraf internasional;
- pusat pelayanan kesehatan dalam skala nasional;
- memiliki Bandara Internasional Sultan Hasanuddin; dan
- memiliki pelabuhan internasional Makassar.

Maka disimpulkan bahwa Makassar memenuhi syarat sebagai PKN

3. Kota-kota yang ditetapkan sebagai PKW dalam Perda No. 44/2001 tetap menjadi PKW dalam Perda No. 9/2009. Yang membedakannya adalah pada Perda No. 9/2009 terdapat penambahan 3 kota yang mengalami peningkatan hirarki, menjadi berstatus PKW, yaitu Kota Pangkajene di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, dan Kota Barru di Kabupaten Barru. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada penurunan hirarki yang terjadi pada sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pada Perda No. 44 Tahun 2001 tidak tercantum kota-kota yang berfungsi sebagai PKL. Namun dalam Perda No. 9 Tahun 2009 terdapat banyak kota yang diposisikan sebagai PKL. Berdasarkan hasil analisis, kota-kota yang ditetapkan sebagai PKL adalah kota-kota yang merupakan ibukota Kabupaten/Kota namun belum termasuk ke dalam PKN maupun PKW. Penetapan ini sebenarnya tidak mencerminkan sistem perkotaan yang sebenarnya ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini lebih pada pemerataan hirarki ke dalam seluruh ibukota kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Ibukota-ibukota kabupaten yang tidak termasuk sebagai PKW atau dalam PKN Mamminasata menjadi PKL. PKL tersebut berfungsi sebagai:
 - pusat pengolahan dan/atau pengumpulan barang yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga;
 - simpul transportasi yang melayani kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga;
 - jasa pemerintahan kabupaten; dan
 - pusat pelayanan publik lainnya untuk kabupaten dan beberapa kecamatan kabupaten tetangga.

PKL di wilayah Sulsel adalah Malili, Masamba, Toraja Utara, Makale, Enrekang, Pangkajene, Sengkang, Soppeng, Sinjai, Bantaeng, Watansawitto, Belopa, Benteng, dan Pamatata.

6. Khusus untuk Kota Mammuju, dalam Perda No. 9/2009 tidak lagi memiliki status dalam sistem perkotaan karena Kota Mammuju sekarang telah berubah menjadi ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang dibentuk pada 5 Oktober 2004 ini berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004.
7. Sub pusat kegiatan lokal berupa Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lokal (PPK dan PPL) dan atau yang lebih mikro lagi dapat terletak pada ibukota kecamatan atau di desa-desa sebagai pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri tempat tumbuh berkembangnya komunitas dengan jatidiri nilai kearifan lokal dan secara ekonomis dapat mempunyai ciri produk komoditas unggulan masing-masing. Sub-sub pusat kegiatan yang berupa wilayah mikro ini diarahkan menjadi desa mandiri pangan dan energi.

Kriteria yang digunakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dalam penetapan rencana sistem perkotaannya mengacu pada Kriteria sistem perkotaan yang terdapat dalam PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

5.8. Analisis Hubungan Sistem Perkotaan dan Indikasi Program Utama dalam RTRW

Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta dengan perkiraan pendanaannya. Program pemanfaatan ruang tersebut disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang terdapat dalam suatu rencana tata ruang wilayah. Indikasi program utama baik Nasional maupun Provinsi, disusun berdasarkan indikasi program untuk perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategisnya.

Penempatan program utama lima tahunan yang berdasarkan perwujudan struktur ruang semakin mempertegas penetapan hirarki kota tersebut. Ini pula yang turut berkontribusi terhadap semakin melebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil, antara kota dengan hirarki tinggi dan kota-kota yang memiliki hirarki yang lebih rendah. Kota yang ditetapkan sebagai PKN mendapatkan program yang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang ditetapkan sebagai PKW. Begitu pula kota-kota yang ditetapkan sebagai

Universitas Indonesia

PKW memiliki program yang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang hanya merupakan PKL. Bukan hanya dari sisi jumlah programnya yang lebih banyak, tapi juga tentunya terkait dengan jumlah dana yang mengalir dalam jumlah yang lebih banyak.

Tabel berikut adalah contoh tabel indikasi program yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan fenomena tersebut. Penempatan program-program yang lebih banyak selalu terjadi untuk kota-kota yang memiliki hirarki yang lebih tinggi dalam sistem perkotaan dan uang yang mengalir pun tentunya lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang memiliki hirarki yang lebih rendah dalam sistem perkotaan wilayah tersebut.

Tentunya hal ini akan semakin memperkuat status kota yang memiliki hirarki yang lebih tinggi sehingga kemungkinan untuk berubah menjadi hirarki yang lebih rendah sangat kecil kemungkinannya.

Tabel 5.15
Contoh Indikasi Program Utama di Provinsi Sulawesi Selatan pada PP No. 4 / 2009

No.	Status dalam Sistem Perkotaan	Indikasi Program Utama dalam RTRW Provinsi
1.	PKN	Contoh Indikasi program untuk kawasan Mamminasata 1. Peningkatan kapasitas bandara pusat penyebaran primer 2. Peningkatan kapasitas pelabuhan internasional 3. Pembangunan terminal bis Tipe A 4. Pengembangan pasar induk regional 5. Perbankan internasional dan nasional swasta maupun pemerintah 6. Pengembangan kawasan pendidikan Samata Bontomarannu 7. Pengembangan kawasan industri dan pergudangan 8. Pembangunan sistem mitigasi bencana (banjir, longsor) 9. Pengembangan sumber daya energi listrik 10. Pengembangan sumber daya air (air minum dan limbah cair) 11. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Tipe A 12. Industri pengolahan sampah regional 13. Pengembangan kota baru
2.	PKW	Contoh Indikasi program untuk Kota Barru 1. Peningkatan Pelabuhan Laut Regional Multi Guna 2. Peningkatan Pelabuhan Lokal 3. Pembangunan terminal bis Tipe A 4. Peningkatan dan pengembangan Kawasan Industri Emas sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 5. Pembangunan PLTU 6. Peningkatan kualitas Pasar Induk 7. Pengembangan perbankan 8. Peningkatan kualitas pelayanan RSUD Tipe B 9. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama banjir
3.	PKL	Contoh Indikasi program untuk Kota Makale

No.	Status dalam Sistem Perkotaan	Indikasi Program Utama dalam RTRW Provinsi
		1. Peningkatan kualitas pelayanan fungsi terminal tipe C 2. Peningkatan kualitas pasar induk kabupaten 3. Pengembangan perbankan 4. Pengembangan RSUD Tipe C 5. Pengembangan SMA/SMK 6. Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama gempa & longsor

Sumber : Diolah dari Lampiran Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan No. 9/2009

Dari tabel di atas jelas terlihat bahwa Kawasan Perkotaan Mamminasata yang berstatus PKN (kawasan perkotaan yang memiliki hirarki tertinggi) memperoleh program yang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya yang memiliki hirarki lebih rendah dalam sistem perkotaan yang ada. Kota-kota yang berstatus PKW memiliki program yang lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang hanya merupakan PKL. Jika ini terus terjadi akan sangat wajar bila perbedaan antara kota besar dan kota kecil menjadi semakin lebar. Kota kecil sulit untuk mengejar ketertinggalannya dari kota besar.

5.9. Keterkaitan *System of Cities* dengan Fenomena Kota Besar – Kota Kecil

Untuk melihat keberadaan keterkaitan *System of Cities* dengan fenomena kota besar dan kota kecil, akan dilakukan dengan menggunakan analisis pengukuran dan penilaian korelasi. Pengukuran dan penilaian korelasi antara sistem perkotaan dan indeks *primacy* dilakukan untuk menguji hipotesis awal bahwa terdapat keterkaitan antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil. Untuk menilai keterkaitan antara keduanya, digunakan metode korelasi tunggal. Teknik korelasi tunggal dipergunakan untuk penelitian tentang hubungan antara dua variabel penelitian. Dihitung koefisien korelasi antara variabel indeks *primacy* kawasan perkotaan pada masing-masing kabupaten/kota dengan nilai skor dalam sistem perkotaan.

Untuk menghitung korelasinya digunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{N \cdot SD_x \cdot SD_y}$$

Keterangan:

- a. \bar{Y}_{xy} = koefisien korelasi *Product Moment*
- b. $\sum xy$ = jumlah hasil perkalian (*product*) dari x dan y
- c. N = jumlah individu
- d. SDx = standar deviasi dari variabel x
- e. SDy = standar deviasi dari variabel y

Dari hasil penghitungan dengan menggunakan rumus tersebut dihasilkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,576422 yang berarti bahwa antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar – kota kecil memiliki hubungan yang mantap. Dalam hal ini, hipotesis penelitian dapat diterima.

Nilai yang besar dalam angka korelasi ini dapat dimengerti karena semakin besar nilai indeks *primacy* dari suatu kota sesuai dengan semakin tingginya nilai skor dalam sistem perkotaan.

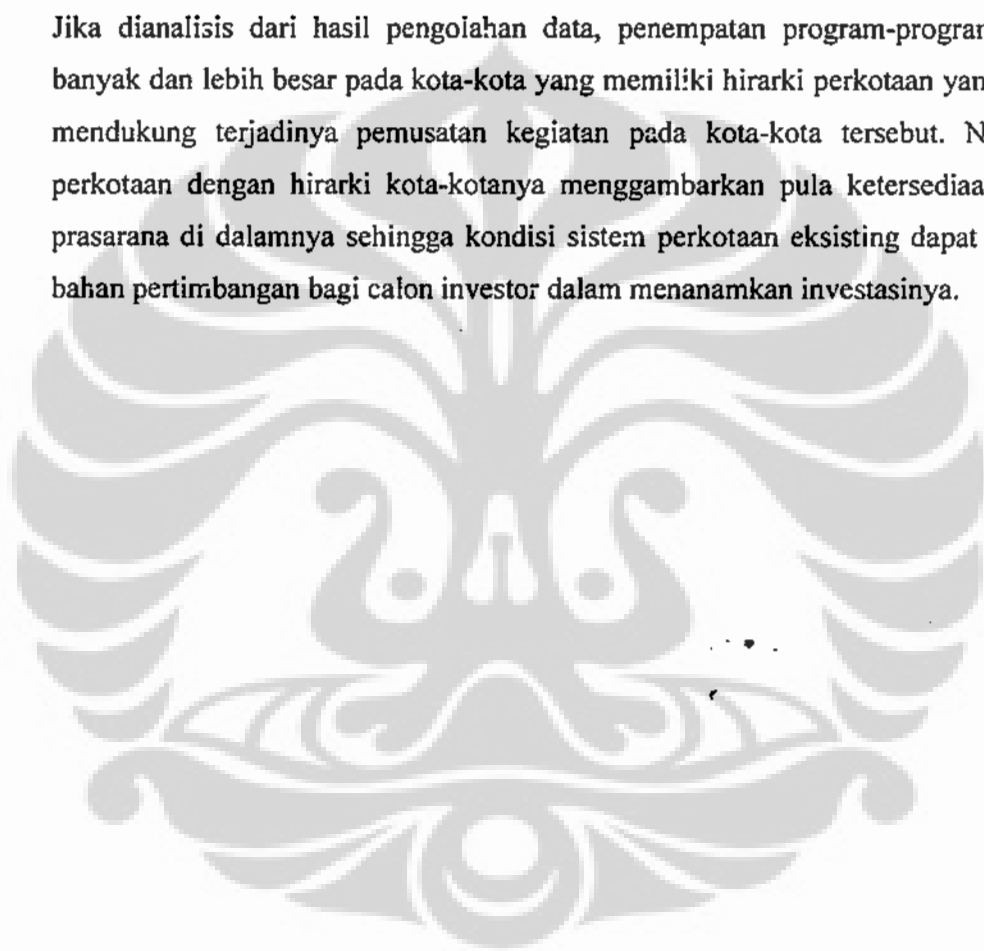
Hasil pengolahan data yang menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang mantap antara sistem perkotaan dengan fenomena *primacy* di Provinsi Sulawesi Selatan diperkuat dengan kenyataan masih berlakunya hukum ibukota. Faktor-faktor pemicu *primacy* turut pula berkontribusi pada semakin lebarnya perbedaan antara kota besar dan kota kecil.

Iklm investasi yang terjadi sekarang di Indonesia maupun di dunia pada umumnya, berbeda dengan iklim investasi pada masa ketika sistem perkotaan nasional dibuat pertama kali oleh NUDS (1981-1985). Sistem perkotaan yang tercantum dalam RTRWN pun, disusun berdasarkan konteks rencana, dengan kata lain, ada kota-kota yang sengaja diciptakan/dipromosikan untuk menjadi kota dengan hirarki yang lebih tinggi karena melihat potensinya. Walaupun kewenangan pemerintah sangat kuat untuk menciptakan/mempengaruhi sistem perkotaan namun tidak dapat diabaikan pula adanya perkembangan baru, yaitu peranan swasta.

Untuk konteks ekonomi, sistem perkotaan akan sangat sulit untuk diciptakan karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kota yang berada di luar wewenang pemerintah, misalnya faktor globalisasi, kecenderungan konsentrasi infrastruktur, keuntungan lokasi geografi, dan lain-lain. Ketika mekanisme ekonomi pasar mulai merasuk, teknologi transportasi dan komunikasi sudah semakin maju, sistem moneter

juga mendukung, maka pemasaran hasil produksi perdesaan atau hasil produksi dari kota kecil tidak lagi mengandalkan kota besar tetapi dapat secara langsung. Demikian pula halnya dengan proses impor. Ketika sistem transportasi sudah semakin berkembang, kota kecil yang memiliki potensi sumberdaya alam maupun manusia memiliki peluang untuk langsung melakukan kegiatan ekonominya tanpa terlalu bergantung pada sistem perkotaan yang ada di wilayah tersebut.

Jika dianalisis dari hasil pengolahan data, penempatan program-program yang lebih banyak dan lebih besar pada kota-kota yang memiliki hirarki perkotaan yang lebih tinggi mendukung terjadinya pemusatan kegiatan pada kota-kota tersebut. Namun sistem perkotaan dengan hirarki kota-kotanya menggambarkan pula ketersediaan sarana dan prasarana di dalamnya sehingga kondisi sistem perkotaan eksisting dapat pula menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor dalam menanamkan investasinya.



BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

6.1.1. Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *primacy* tidak hanya terjadi pada skala nasional namun juga terjadi pada skala regional/provinsi. Kota Makassar merupakan kota *primate* jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar tidak hanya *primate* dari sisi dominasi jumlah penduduk tapi juga dari sisi pengaruh Kota Makassar terhadap kota-kota lainnya dan terhadap wilayah *hinterlandnya*. Pengaruh ini mengundang semakin besarnya kota karena menarik migrasi masuk ke kota tersebut. Dalam perjalanan sejarahnya pun, Kota Makassar telah menunjukkan dominasinya dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menemukan bahwa *primacy* suatu kota maupun kawasan perkotaan tidak hanya disebabkan oleh satu sebab (*monocausal*), tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor pemicu Kota Makassar sebagai kota *primate* selain faktor sejarah juga kenyataan masih tetap berlakunya "*The Law of the Primate City*". Statusnya sebagai ibukota pemerintahan provinsi, turut andil dalam mendukung dan menguatkan Kota Makassar sebagai kota *primate*. Banyaknya program pemerintah yang masuk ke Kota Makassar tentunya semakin menjadikan Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan bagi Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan faktor kelengkapan sarana dan prasarananya. Faktor penting lain yang berperan sebagai pemicu adalah faktor ekonomi. Kota Makassar memiliki kontribusi yang paling besar terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan sangat jauh dengan kota terdekat lain yang berada di bawahnya.

Rank size rule tidak berlaku untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Kota-kota yang memiliki hirarki di bawahnya tidak mengikuti *rank size rule*. Terdapat perbedaan yang jauh antara kota dengan hirarki yang paling tinggi, yaitu Kota Makassar (bahkan Kawasan Metropolitan Mamminasata) dengan kota yang memiliki hirarki terdekat di bawahnya, yaitu Kota Pangkajene di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kota Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, Kota Palopo, Kota Watampone di Kabupaten Bone, Kota Bulukumba di Kabupaten Bulukumba, Kota Baru di Kabupaten Barru, dan Kota

Parepare. Ini terjadi karena Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan semakin besar dan berkembang menjadi *primate city*, tidak mengikuti pola *rank size rule* dengan kota-kota menengahnya.

Hal ini menggambarkan bahwa Kota Makassar tidak berfungsi optimal sebagai sebagai “mesin pendorong” pengembangan wilayah sekitarnya karena kurang optimalnya fungsi eksternal kota. Kegagalan tersebut telah menyebabkan terjadinya “*backwash effect*” daripada “*trickling down effect*” sehingga Kota Makassar cenderung menyedot sumberdaya yang ada di sekitarnya dibandingkan dengan menyebarkannya ke kota-kota lain. Kota Makassar semakin membesar secara fisik dan sosial ekonomi, sedangkan kota-kota kecil lainnya mengalami kondisi stagnan. Implikasinya tentu semakin tidak menariknya kota-kota kecil ini dari pandangan investor dan pengembangan ekonomi.

6.1.2. Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil penelitian tentang kondisi eksisting sistem perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan beberapa hal yang menarik. Kota-kota yang memiliki hirarki II mengerucut di sekitar Kota Makassar dan kota-kota yang memiliki skor rendah umumnya berada di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Fenomena ini mengindikasikan terjadinya konurbasi pada kawasan Kota Makassar dan sekitarnya, sesuai dengan yang dikenal dengan Kawasan Mamminasata. Kota Makassar tidak dapat berdiri sendiri namun telah menjadi satu kesatuan dari sisi aktivitas ekonominya dengan kota-kota di sekitarnya, yaitu Kota Maros (Kabupaten Maros), Kota Sungguminasa (Kabupaten Gowa), dan Kota Takalar (Kabupaten Takalar). Selain itu, juga kenyataan bahwa “*trickling down effect*” lebih dirasakan pada wilayah yang dekat dengan Makassar saja.

Kenyataan di atas dapat dipahami jika dilihat dari perjalanan sejarah perkembangan kotanya. Dalam sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang memiliki pengaruh besar di perairan Nusantara. Meskipun sebagai kerajaan, Gowa tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu Pelabuhan Makassar. Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kabupaten Gowa tetap berfungsi sebagai pemasok barang-barang kebutuhan bagi Kota Makassar. Sehingga Makassar memiliki ketergantungan pula dengan Kabupaten Gowa.

Pada bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa kota hirarki II yang dapat dijadikan pusat pertumbuhan. Kabupaten Luwu Utara dapat menjadi pusat pertumbuhan untuk bagian utara Provinsi dan Kota Palopo dapat dijadikan pusat pertumbuhan pada kawasan tengah.

Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan. Walaupun hanya ditempatkan sebagai PKL dalam RTRW, namun Luwu Timur memiliki potensi jika dilihat dari sisi ekonomi. Investor menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Timur tanpa mempertimbangkan posisi Luwu Timur dari sistem perkotaannya. Investor menanamkan modalnya di Kabupaten Luwu Timur lebih pada sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur. Namun penempatan investasi yang tinggi di Kabupaten Luwu Timur tidak akan memiliki dampak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut jika investasi yang dilakukan tidak memiliki "*trickling down effect*" bagi masyarakat di sekitar lokasi investasi. Investasi yang dilakukan di Luwu Timur tidak akan memiliki arti banyak bila kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Luwu Timur tidak melibatkan masyarakat setempat.

Kabupaten Luwu Timur yang lokasinya paling jauh dari ibukota provinsi dan memiliki hirarki II tidak berarti bahwa Kabupaten Luwu Timur bukan merupakan bagian dari sistem perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur dengan Kota Malili sebagai ibukotanya masih memiliki orientasi ke Kota Makassar sehingga masih merupakan bagian dari sistem perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan. Terlihat dari pola masyarakat dalam pemenuhan sarana yang lebih tinggi (kesehatan, pendidikan, perdagangan) yang masih berorientasi ke Kota Makassar.

Penggunaan pendekatan sistem perkotaan dalam suatu penyusunan rencana tata ruang perlu dilakukan dengan benar dan bijaksana. Hal ini terkait dengan penyusunan indikasi program yang selalu bertumpu pada sistem perkotaan dengan menempatkan program-program yang lebih berpihak pada kota-kota dengan hirarki yang lebih tinggi. Kota-kota kecil justru sangat membutuhkan program-program yang dapat menjadi stimulan bagi pengembangan kotanya. Penggunaan pendekatan sistem perkotaan yang tidak bijak dan benar akan mengakibatkan perbedaan antara kota besar dan kota kecil menjadi semakin lebar.

6.1.3. Keterkaitan *System of Cities* dan Fenomena Kota Besar dan Kota Kecil di Provinsi Sulawesi Selatan

Hasil pengukuran dan penilaian dengan menggunakan koefisien korelasi tunggal menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang mantap antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil. Selain itu, sistem perkotaan di Indonesia, khususnya seperti yang tercantum dalam suatu rencana tata ruang wilayah diikuti dengan penetapan indikasi program utama yang mengikutinya. Umumnya program utama lima tahunan yang disusun ditempatkan pada kota-kota yang terdapat dalam sistem perkotaan tersebut sehingga menyebabkan *primacy* kota yang semakin tinggi dan perbedaan antara kota besar – kota kecil semakin lebar. Akibatnya, yang menjadi permasalahan adalah terjadi kecenderungan bahwa sektor-sektor utama bagi pengembangan wilayah bukannya menyebar, tetapi mengerucut, membentuk kutub. Kota-kota besar semakin membesar dan menguat (*primacy*), perbedaan antar wilayah terus melebar, dan urbanisasi di kota-kota besar tak dapat dibendung.

Hirarki dan sistem kota sebagai fenomena jelas ada, bahkan dalam skala global pun (*global/world cities*) terdapat hirarki. Namun penggunaan sistem perkotaan dalam konteks rencana sulit untuk diterapkan karena banyak faktor lainnya yang mempengaruhi, seperti globalisasi, iklim investasi, kecenderungan konsentrasi infrastruktur, keuntungan geografi, kemajuan sistem informasi dan transportasi, dan lain-lain.

6.2. Implikasi Penelitian

Terdapat beberapa implikasi yang muncul dari penelitian ini, yaitu:

- a. Implikasi terhadap kajian pengembangan perkotaan.
 - Dengan adanya penelitian ini, merupakan langkah awal untuk penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial yang ditimbulkan akibat *primacy* yang juga terjadi pada kota dalam skala regional. *Primacy* tidak akan menjadi masalah jika tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Namun, aglomerasi yang terlampaui tinggi pada suatu wilayah tentunya akan mengakibatkan dampak turunan yang akan terakumulasi jika *primacy* sebuah kota melampaui daya dukungnya. Dampak negatif *primacy* yang dapat dirasakan misalnya terkait

dengan kemacetan lalu lintas, sulitnya lahan permukiman, polusi udara, dan permasalahan lingkungan lainnya.

- Penelitian dilakukan dengan mengkaji sistem perkotaan Provinsi Sulawesi Selatan. Ternyata terdapat indikasi bahwa Kota Makassar memiliki pengaruh yang melampaui batasan wilayah administrasi provinsi. Sehingga diperlukan kajian penelitian lebih lanjut dengan menggunakan lingkup wilayah yang lebih luas, misalnya dengan memasukkan beberapa kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki orientasi ke Kota Makassar.
- Dibutuhkan penelitian lebih lanjut tentang sistem perkotaan dengan mengakomodasi variabel aliran barang antar kota untuk menggambarkan keterkaitan antara satu kota dengan kota lainnya. Atau juga dengan variabel besarnya investasi asing yang masuk.
- Penelitian ini juga tidak secara khusus menyoroti tentang pengaruh globalisasi terhadap indeks *primacy* suatu kota. Belum ada bukti bahwa globalisasi meningkatkan indeks *primacy*.

b. Implikasi terhadap para perencana yang terlibat dalam perencanaan pengembangan wilayah.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat keterkaitan yang mantap antara sistem perkotaan dengan fenomena kota besar dan kota kecil. Penempatan program-program dalam indikasi program utama lima tahunan perlu perencanaan yang bijaksana agar kecenderungan *primacy* yang tidak terkendali dapat dihindari.

c. Implikasi terhadap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Redistribusi hasil-hasil pembangunan yang lebih merata ke seluruh wilayah, terutama pada wilayah yang memiliki hirarki dan karakteristik perkotaan yang lebih rendah namun menunjukkan gejala perkembangan yang relatif cepat perlu dilakukan.

Lampiran I: Data Awal

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
1101	Pasimarannu	Kep. Selayar	Bonerate	0.00	140	176.35	8,923	51	9	10	3
1102	Pasilambena	Kep. Selayar	Latokdok	0.00	193	102.99	7,802	76	3	10	4
1103	Pasimasunggu	Kep. Selayar	Benteng Jampea	0.00	85	114.50	7,008	61	7	10	5
1104	Taka Bonerate	Kep. Selayar	Batang	0.00	75	221.07	12,143	55	4	13	5
1105	Pasimasunggu T	Kep. Selayar	Ujung Jampea	0.00	96	47.93	6,524	136	8	9	1
1106	Bontosikuyu	Kep. Selayar	Pariangan	0.00	18	199.11	14,450	73	15	20	4
1107	Bontoharu	Kep. Selayar	Matalalang	25.00	3	129.75	11,801	91	18	13	5
1108	Benteng	Kep. Selayar	Benteng	100.00	0	7.12	18,860	2,649	14	8	3
1109	Bontamanai	Kep. Selayar	Polebungin	0.00	18	115.56	13,642	118	21	18	5
1110	Bontomatene	Kep. Selayar	Buki	18.18	19	159.92	13,818	86	20	16	6
1111	Buki	Kep. Selayar	Batangmata	0.00	27	82.73	6,778	82	17	10	0
1201	Gantarang	Bulukumba	Ponre	15.00	5	173.51	70,301	405	17	52	17
1202	Ujung Bulu	Bulukumba	Terang-Terang	100.00	1	14.44	43,161	2,989	27	25	11
1203	Ujung Loc	Bulukumba	Dannuang	8.33	11	144.31	37,722	261	15	35	8
1204	Bontobahari	Bulukumba	Tanah Lemo	100.00	27	108.60	23,774	219	13	28	6
1205	Bonto Tiro	Bulukumba	Hila-hila	8.33	35	78.34	25,580	327	26	43	8
1206	Herlang	Bulukumba	Tanuntung	25.00	42	68.79	24,786	360	39	42	10
1207	Kajang	Bulukumba	Kassi	10.53	62	129.06	46,405	360	15	48	11
1208	Bulukumpa	Bulukumba	Tanete	18.75	31	171.33	56,354	329	20	55	8
1209	Rilau Ale	Bulukumba	Palampang	7.69	24	117.53	35,657	303	19	35	11
1210	Kindang	Bulukumba	Borong Rappoa	11.11	33	148.76	31,006	208	16	25	11
1301	Bissapu	Bantaeng	Panaikang	63.64	4	32.84	32,824	1,000	5	22	3
1302	Uluere	Bantaeng	Loka	0.00	23	67.29	6,253	93	0	9	0
1303	Sinoa	Bantaeng	Bonto Maccini	0.00	14	43.00	10,333	240	1	12	1
1304	Bantaeng	Bantaeng	Pallantikang	88.89	0	28.85	44,198	1,532	9	20	3
1305	Eremerasa	Bantaeng	Pullaweng	0.00	5	45.01	20,260	450	1	15	2
1306	Tompobulu	Bantaeng	Banyorang	40.00	21	76.99	19,616	255	7	22	4
1307	Pajukukang	Bantaeng	Pajukukang	0.00	7	48.90	27,301	558	6	18	3

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
1308	Gantarangkeke	Bantaeng	Gantarangkeke	33.33	11	52.95	15,923	301	8	13	2
1401	Bangkala	Jeneponto	Allu	28.57	25	121.82	47,192	387	41	66	13
1402	Bangkala Barat	Jeneponto	Bulu Jaya	12.50	41	152.96	24,027	157	15	31	9
1403	Tamalatea	Jeneponto	Tanetea	50.00	10	57.58	39,320	683	43	33	12
1404	Bontoramba	Jeneponto	Bontoramba	8.33	13	88.30	35,645	404	48	28	11
1405	Binamu	Jeneponto	Bontosunggu	92.31	1	69.49	48,878	703	39	40	10
1406	Turatea	Jeneponto	Paitana	0.00	6	53.76	29,179	543	27	28	12
1407	Batang	Jeneponto	Togo-togo	33.33	11	33.04	19,411	588	12	18	6
1408	Arungkeke	Jeneponto	Arungkeke	0.00	10	29.91	17,811	595	20	14	4
1409	Tarawang	Jeneponto	Tarawang	0.00	16	40.68	21,848	537	14	21	6
1410	Kelara	Jeneponto	Tolo	50.00	13	43.95	27,093	616	20	27	8
1411	Rumbia	Jeneponto	Rumbia	0.00	18	58.30	23,771	408	22	31	7
1501	Mangarabombang	Takalar	Mangadu	8.33	7	100.50	35,237	351	17	35	8
1502	Mappakasunggu	Takalar	Cilallang	16.67	5	45.27	14,562	322	7	23	7
1503	Sanrobone	Takalar	Sanrobone	0.00	7	29.36	12,726	433	6	15	2
1504	Polombangkeng S	Takalar	Bulukunyi	62.50	11	88.07	25,692	292	17	29	6
1505	Pattalassang	Takalar	Pattalassang	100.00	0	25.31	33,177	1,311	16	28	9
1506	Polombangkeng U	Takalar	Palleko	40.00	9	212.25	43,629	206	16	39	14
1507	Galesong Selatan	Takalar	Bonto Kassi	0.00	15	24.71	22,811	923	4	20	6
1508	Galesong	Takalar	Galesong Kota	0.00	19	25.93	35,838	1,382	18	28	4
1509	Galesong Utara	Takalar	Bonto Lebang	12.50	25	15.11	34,302	2,270	19	29	5
1601	Bontonompo	Gowa	Tamallayang	50.00	16	30.39	40,779	1,342	11	32	7
1602	Bontonompo Sel.	Gowa	Pabundukang	50.00	30	29.24	28,237	966	5	29	6
1603	Bajeng	Gowa	Kalebajeng	33.33	12	60.09	59,414	989	14	42	14
1604	Bajeng Barat	Gowa	Borimatangkasa	33.33	16	19.04	22,700	1,192	8	18	2
1605	Pallangga	Gowa	Mangalli	100.00	2	48.24	85,628	1,775	19	43	11
1606	Barombong	Gowa	Kanjilo	80.00	7	20.67	32,990	1,596	7	16	2
1607	Sombopu	Gowa	Sungguminasa	100.00	0	28.09	98,799	3,517	34	48	21
1608	Bontomarannu	Gowa	Borongloe	75.00	9	52.63	28,613	544	7	18	4

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
1609	Pattalassang	Gowa	Pattalassang	50.00	13	84.96	20,154	237	3	18	4
1610	Parangloe	Gowa	Lanna	40.00	27	221.26	16,346	74	7	17	4
1611	Manuju	Gowa	Moncongloe	66.67	20	91.90	14,859	162	3	15	4
1612	Tinggimoncong	Gowa	Malino	40.00	59	142.87	21,012	147	8	33	9
1613	Tombolo Pao	Gowa	Tamaona	25.00	90	251.82	27,978	111	2	33	14
1614	Parigi	Gowa	Majannang	15.00	70	132.76	13,986	105	3	14	5
1615	Bungaya	Gowa	Sapaya	15.00	46	175.53	19,561	111	3	21	10
1616	Bontolempangan	Gowa	Bontoloe	22.67	63	142.46	17,430	122	4	16	5
1617	Tompobulu	Gowa	Malakaji	11.11	125	132.54	32,542	246	3	29	10
1618	Biringbulu	Gowa	Lauwa	11.11	140	218.84	36,289	166	3	23	7
1701	Sinjai Barat	Sinjai	Manjipi	22.22	48	135.53	23,597	174	14	14	27
1702	Sinjai Borong	Sinjai	Pasir Putih	12.50	43	66.97	16,934	253	11	25	2
1703	Sinjai Selatan	Sinjai	Bikeru	9.09	27	131.99	37,485	284	20	36	8
1704	Tellu Limpoe	Sinjai	Mannanti	9.09	38	147.30	32,829	223	15	32	4
1705	Sinjai Timur	Sinjai	M. Mbang	7.69	4	71.88	29,768	414	25	28	5
1706	Sinjai Tengah	Sinjai	Lappadata	9.09	12	129.70	27,038	208	22	31	5
1707	Sinjai Utara	Sinjai	Balangnipa	100.00	0	29.57	37,586	1,271	18	30	9
1708	Bulupoddo	Sinjai	Bulupoddo	0.00	18	99.47	15,418	155	10	24	4
1709	Pulau Sembilan	Sinjai	Kambuno	0.00	13	7.55	7,649	1,013	4	10	3
1801	Mandai	Maros	Tetebatu	33.33	4	49.11	34,973	712	8	18	4
1802	Moncongloe	Maros	Pamanjangan	0.00	22	46.87	16,972	362	4	8	4
1803	Maros Baru	Maros	Baju Bodoa	42.86	2	53.76	22,836	425	5	17	5
1804	Marusu	Maros	Pattene	0.00	8	53.73	23,963	446	5	13	4
1805	Turikale	Maros	Solojirang	100.00	1	29.93	33,235	1,110	11	22	6
1806	Lau	Maros	Barandasi	66.67	4	73.83	24,208	328	5	15	4
1807	Bontoa	Maros	Panjalingan	11.11	6	93.52	27,289	292	3	25	3
1808	Bantimurung	Maros	Pakalu	25.00	7	173.70	27,817	160	7	27	5
1809	Simbang	Maros	Bantimurung	0.00	10	105.31	22,001	209	8	18	3
1810	Tanralili	Maros	Ammarang	12.50	10	89.45	24,375	272	5	20	3

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
1811	Tompobulu	Maros	Pucak	0.00	18	287.66	14,053	49	0	13	4
1812	Camba	Maros	Cempaniga	25.00	47	145.36	12,523	86	13	21	3
1813	Cenrana	Maros	Bengo	0.00	32	180.97	14,504	80	7	19	3
1814	Mallawa	Maros	Ladange	0.00	60	235.92	12,028	51	6	17	3
1901	Liukang Tanaya	Pangkep	Pulau Sapuka	11.11	292	120.00	18,403	153	0	27	2
1902	Liukang Kalmas	Pangkep	P. Kalukalukuang	14.29	209	91.50	12,743	139	7	18	2
1903	L. Tupabbiring	Pangkep	P. Balang Lompo	0.00	43	54.44	17,756	326	1	36	4
1904	L. Tupabbiring Ut.	Pangkep	P. Sabutung	0.00	21	85.56	13,855	162	0	0	0
1905	Pangkajene	Pangkep	Tumampua	100.00	0	47.39	39,866	841	13	30	5
1906	Minasatene	Pangkep	Minasatene	0.00	3	76.48	31,017	406	6	26	5
1907	Balocci	Pangkep	Balleangin	0.00	21	143.48	15,727	110	2	19	3
1908	Tondong Tallasa	Pangkep	Bantimurung	0.00	25	111.20	9,839	88	7	15	3
1909	Bungoro	Pangkep	Bungoro	0.00	2	90.12	42,282	469	6	30	6
1910	Labakkang	Pangkep	Labakkang	0.00	5	98.46	46,983	477	8	30	3
1911	Ma'rang	Pangkep	Bonto-Bonto	0.00	15	75.22	32,888	437	7	29	5
1912	Segeri	Pangkep	Segeri	0.00	22	78.28	19,929	255	1	22	2
1913	Mandalle	Pangkep	Mandalle	0.00	30	40.16	12,735	317	2	17	3
2001	Tanete Riaja	Barru		14.29		174.29	21,562	124	22	32	4
2002	Pujananting	Barru		0.00		314.26	12,565	40	18	25	4
2003	Tanete Rilau	Barru		20.00		79.17	33,108	418	26	37	4
2004	Barru	Barru		50.00	0	199.32	35,477	178	29	36	4
2005	Soppeng Riaja	Barru		28.57		78.90	17,885	227	15	21	5
2006	Balusu	Barru		16.67		112.20	17,534	156	16	22	5
2007	Mallusetasi	Barru		37.50		216.58	24,854	115	18	27	4
2101	Bontocani	Bone	Kahu	9.09	112	463.35	15,326	33	11	25	9
2102	Kahu	Bone	Palattae	5.00	100	189.50	37,042	195	43	37	11
2103	Kajuara	Bone	Bojo	5.56	70	124.13	34,034	274	24	32	8
2104	Salurjekko	Bone	Manera	12.50	62	84.91	14,727	173	12	15	6
2105	Tonra	Bone	Bulu-Bulu	0.00	52	200.32	12,581	63	16	15	5

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
2106	Patimpeng	Bone	Latobang	0.00	77	130.47	15,470	119	11	16	7
2107	Libureng	Bone	Camming	5.00	83	344.25	29,006	84	17	32	7
2108	Mare	Bone	Kadai	5.56	37	263.50	24,692	94	25	29	5
2109	Sibulue	Bone	Pattiro Bajo	5.00	15	155.80	32,236	207	21	34	8
2110	Cina	Bone	Tanete Harapan	8.33	17	147.50	25,213	171	19	28	7
2111	Barebbo	Bone	Apala	0.00	9	114.20	26,108	229	24	32	4
2112	Ponre	Bone	Lonrong	0.00	30	293.00	13,126	45	6	23	6
2113	Lappariaja	Bone	Matango	0.00	51	138.00	22,966	166	8	23	6
2114	Lamuru	Bone	Lalebbata	8.33	62	208.00	24,316	117	6	28	12
2115	Tellu Limpoe	Bone	Tujuje	0.00	74	318.10	13,585	43	1	14	5
2116	Bengo	Bone	Bengo	0.00	44	164.00	25,234	154	13	22	6
2117	Ulaweng	Bone	Tacepi	6.67	17	161.67	24,641	152	15	28	5
2118	Palakka	Bone	Passippo	0.00	12	115.32	21,917	190	11	22	2
2119	Awangpone	Bone	Componge	5.56	8	110.70	28,523	258	17	38	6
2120	Tellu Siattinge	Bone	Tokaseng	11.76	17	159.30	39,891	250	17	43	9
2121	Amali	Bone	Taretta	0.00	36	119.13	20,666	173	16	28	7
2122	Ajangale	Bone	Pompanua	0.00	46	139.00	27,316	197	18	32	5
2123	Dua Boccoe	Bone	Uloe	4.55	30	144.90	29,995	207	17	42	8
2124	Cenrana	Bone	Ujung Tanah	6.25	38	143.60	23,464	163	11	34	8
2125	T. Riattang Barat	Bone	Macanang	100.00	0	53.68	42,354	789	24	17	7
2126	Tanete Riattang	Bone	Salekoe	100.00	3	23.79	47,533	1,998	30	34	3
2127	T. Riattang Timur	Bone	Lonrae	100.00	8	48.88	39,786	814	22	26	5
2201	Marioriwawo	Soppeng	Takkalala	15.38	17	300.00	45,646	152	14	59	12
2202	Lalabata	Soppeng	Watansoppeng	70.00	0	278.00	42,865	154	15	43	10
2203	Liliriaja	Soppeng	Cangadi	37.50	15	96.00	27,074	282	8	34	9
2204	Ganra	Soppeng	Ganra	0.00	8	57.00	11,800	207	3	16	4
2205	Citta	Soppeng	Citta	0.00	35	40.00	9,259	231	3	12	5
2206	Lilirilau	Soppeng	Cabbenge	33.33	12	187.00	40,748	218	10	54	9
2207	Donri-donri	Soppeng	Tajuncu	0.00	13	222.00	24,813	112	8	31	6

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
2208	Marioriawa	Soppeng	Batu-Batu	50.00	29	320.00	28,539	89	3	29	7
2301	Sabbangparu	Wajo	Kota Baru	20.00	11	132.75	25,725	194	13	36	4
2302	Tempe	Wajo	Sengkang	100.00	0	38.27	56,486	1,476	25	39	8
2303	Pammana	Wajo	Maroangng	13.33	12	162.10	31,252	193	11	32	6
2304	Bola	Wajo	Solo	9.09	15	220.13	19,309	88	3	26	4
2305	Takkalalla	Wajo	Peneki	15.38	51	179.76	20,304	113	9	20	6
2306	Sajoangng	Wajo	Jalang	33.33	53	167.01	19,339	116	14	39	4
2307	Penrang	Wajo	Doping	10.00	27	154.90	15,489	100	7	19	5
2308	Majauleng	Wajo	Paria	22.22	24	225.92	31,708	140	15	33	7
2309	Tanasitolo	Wajo	Tancung	21.05	9	154.60	40,201	260	18	35	6
2310	Belawa	Wajo	Menge	33.33	51	172.30	31,235	181	20	19	5
2311	Maniangpajo	Wajo	Anabanua	37.50	22	175.96	15,846	90	9	29	3
2312	Gilireng	Wajo	Gilireng	11.11	38	147.00	11,339	77	7	16	4
2313	Keera	Wajo	Keera	10.00	47	368.36	21,795	59	10	23	4
2314	Pitumpanua	Wajo	Siwa	28.57	78	207.13	42,422	205	20	32	6
2401	Panca Lautang	Sidrap	Bilokka	30.00	18	153.93	17,071	111	5	20	4
2402	Tellu Limpoe	Sidrap	Amparita	66.67	9	103.20	21,511	208	12	17	4
2403	Watang Pulu	Sidrap	Ulu Ale	50.00	7	151.31	25,959	172	13	23	3
2404	Baranti	Sidrap	Baranti	55.56	13	53.89	26,569	493	21	26	6
2405	Panca Rijang	Sidrap	Rappang	50.00	10	34.02	25,258	742	15	24	7
2406	Kulo	Sidrap	Kulo	0.00	21	75.00	10,660	142	5	12	3
2407	Maritenggae	Sidrap	Pangkajene	58.33	0	65.90	40,767	619	18	31	11
2408	W. Sidenreng	Sidrap	Empagae	37.50	7	120.81	15,729	130	8	14	3
2409	Pitu Riawa	Sidrap	Ponrangae	16.67	12	210.43	24,212	115	6	27	6
2410	Dua Pitue	Sidrap	Tanru Tedong	20.00	22	69.99	26,340	376	11	25	6
2411	Pitu Riase	Sidrap	Batu	8.33	39	844.77	18,407	22	3	26	6
2501	Suppa	Pinrang	Majenang	20.00	23	74.20	30,742	414	10	29	5
2502	Mattiro Sompe	Pinrang	Langa	22.22	17	96.99	28,746	296	55	28	4
2503	Lanrisang	Pinrang	Jampue	14.29	20	73.01	17,745	243	11	22	3

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
2504	Mattiro Bulu	Pinrang	Bua	22.22	8	132.49	26,179	198	13	30	4
2505	Watang Sawitto	Pinrang	Sawitto	100.00	0	58.97	44,647	757	24	35	8
2506	Paletang	Pinrang	Laleng Bata	100.00	1	37.29	31,458	844	15	24	4
2507	Tiroang	Pinrang	Tiroang	100.00	9	77.73	19,253	248	9	19	3
2508	Patampanua	Pinrang	Teppo	40.00	12	136.85	31,729	232	12	32	3
2509	Cempa	Pinrang	Cempa	14.29	13	90.30	16,929	187	9	20	4
2510	Duampanua	Pinrang	Lampa	35.71	23	291.86	46,222	158	18	43	7
2511	Batulappa	Pinrang	Bilajeng	20.00	45	158.99	9,518	60	9	17	2
2512	Lembang	Pinrang	Tuppu	14.29	38	733.09	38,950	53	9	48	6
2601	Maiwa	Enrekang	Bangkal	15.00	33	392.87	23,622	60	7	35	11
2602	Bungin	Enrekang	Bungin	0.00	65	236.84	4,440	19	0	10	4
2603	Enrekang	Enrekang	Juppendang	5.00	3	291.19	30,260	104	13	40	12
2604	Cendana	Enrekang	Taulan	0.00	2	91.01	8,804	97	3	16	2
2605	Baraka	Enrekang	Baraka	25.00	10	159.15	21,058	132	32	26	12
2606	Buntu Batu	Enrekang	Pasui	33.33	1	126.65	12,152	96	7	18	4
2607	Anggeraja	Enrekang	Lakawan	33.33	1	125.34	24,032	192	14	25	6
2608	Malua	Enrekang	Malua	37.50	2	40.36	8,711	216	9	12	3
2609	Alla	Enrekang	Kambiolangi	41.00	3	34.66	20,421	589	13	17	7
2610	Curio	Enrekang	Curio	20.00	10	178.51	14,533	81	20	14	9
2611	Masalle	Enrekang	Buntu Sarong	66.67	5	68.35	12,259	179	11	11	1
2612	Baroko	Enrekang	Baroko	66.67	1	41.08	10,284	250	6	10	3
2701	Larompong	Luwu	Larompong	7.09	13	225.25	18,454	82	12	22	7
2702	Larompong Sel.	Luwu	Bonepute	10.00	10	131.00	15,623	119	14	13	5
2703	Suli	Luwu	Suli	7.09	13	81.75	18,420	225	16	20	6
2704	Suli Barat	Luwu	Lindajang	0.00	8	153.50	8,457	55	5	12	6
2705	Belopa	Luwu	Tampumia R.	33.33	9	59.26	14,707	248	7	12	4
2706	Kamanre	Luwu	Cilallang	12.50	8	52.44	11,123	212	12	10	3
2707	Belopa Utara	Luwu	Pammanu	12.50	8	34.73	14,410	415	8	6	2
2708	Bajo	Luwu	Bajo	8.33	12	68.52	13,849	202	7	11	4

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
2709	Bajo Barat	Luwu	Bonelemo	0.00	9	66.30	8,976	135	5	9	6
2710	Bassesangtempe	Luwu	Lissaga	0.00	24	301.00	13,908	46	0	13	3
2711	Latimojong	Luwu	Kadundung	0.00	12	467.75	5,358	11	5	6	3
2712	Bupon	Luwu	Noling	10.00	10	182.67	14,377	79	20	18	8
2713	Ponrang	Luwu	Paddang Sappa	20.00	10	107.09	25,866	242	7	16	5
2714	Ponrang Selatan	Luwu	Pattedong	0.00	13	99.98	23,664	237	11	18	6
2715	Bua	Luwu	Bua	6.67	15	204.01	30,288	148	11	21	6
2716	Walenrang	Luwu	Batusitanduk	11.11	9	94.60	17,283	183	7	12	4
2717	Walenrang Timur	Luwu	Tabah	0.00	8	63.65	15,183	239	5	11	5
2718	Lamasi	Luwu	Lamasi	10.00	10	42.20	19,955	473	9	13	8
2719	Walenrang Utara	Luwu	Bosso	0.00	11	259.77	17,331	67	3	13	6
2720	Walenrang Barat	Luwu	Ilan Batu	0.00	6	247.13	8,834	36	1	6	2
2721	Lamasi Timur	Luwu	Tolemo	0.00	9	57.65	12,114	210	2	8	3
2801	Bongkaradeng	Tana Toraja	Ratte Buttu	16.67	36	206.76	6,517	32	2	10	3
2802	Simbuang	Tana Toraja	Simbuang	16.67	302	194.82	6,479	33	0	11	4
2803	Rano	Tana Toraja	Rano	0.00	42	89.43	6,364	71	2	9	2
2804	Mappak	Tana Toraja	Kondo Dewata	16.67	279	166.02	6,119	37	0	14	0
2805	Mengkendek	Tana Toraja	Pa'tengko	23.53	12	196.74	30,691	156	15	27	10
2806	G. Batu Sillanan	Tana Toraja	B. Ambeso	25.00	26	108.63	19,923	183	10	17	8
2807	Sangalla	Tana Toraja	B. Massabu	40.00	9	36.24	7,246	200	2	6	3
2808	Sangalla Selatan	Tana Toraja	Batuvalu	20.00	23	47.80	8,667	181	5	10	1
2809	Sangalla Utara	Tana Toraja	Satu Allo	33.33	10	27.96	8,512	304	5	9	1
2810	Makale	Tana Toraja	Bombongan	100.00	3	39.75	31,636	796	16	19	5
2811	Makale Selatan	Tana Toraja	Tiromanda	50.00	1	61.70	12,624	205	5	11	1
2812	Makale Utara	Tana Toraja	L. Tondok Iring	100.00	6	26.08	12,470	478	6	8	2
2813	Saluputti	Tana Toraja	Pattan Ulu Satu	11.11	18	87.54	11,322	129	1	9	3
2814	Bituang	Tana Toraja	Bituang	6.67	36	163.27	13,771	84	2	19	4
2815	Rembon	Tana Toraja	Talion	15.38	9	134.47	19,550	145	5	17	3
2816	Masanda	Tana Toraja	Pondingao	0.00	59	134.77	5,828	43	1	8	2

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
2817	M. Balepe	Tana Toraja	Malimbong	16.67	17	211.47	9,775	46	1	9	2
2818	Rantetayo	Tana Toraja	Padang Iring	50.00	9	60.35	11,125	184	12	11	4
2819	Kurra	Tana Toraja	Ratte Kura	16.67	19	60.50	5,915	98	0	8	1
2901	Sabbang	Luwu Utara		5.00	15	525.08	39,017	74	13	25	10
2902	Baebunta	Luwu Utara		4.76	12	295.25	48,253	163	24	33	11
2903	Malangke	Luwu Utara		0.00	38	350.00	30,368	87	12	25	14
2904	Malangke Barat	Luwu Utara		0.00	44	93.75	26,327	281	36	22	9
2905	Sukamaju	Luwu Utara		4.00	21	255.48	45,650	179	16	28	7
2906	Bone-Bone	Luwu Utara		5.26	28	277.33	51,346	185	33	37	11
2907	Masamba	Luwu Utara		2.11	0	1,068.85	34,921	33	16	25	10
2908	Mappedeceng	Luwu Utara		0.00	15	275.50	24,543	89	18	16	3
2909	Rampi	Luwu Utara		0.00	88	1,565.65	3,210	2	19	8	3
2910	Limbong	Luwu Utara		0.00	165	686.50	4,283	6	16	10	2
2911	Seko	Luwu Utara		0.00	198	2,109.19	14,061	7	1	23	6
3001	Burau	Luwu Timur	Burau	0.00	61	256.23	30,696	120	20	18	5
3002	Wotu	Luwu Timur	Bawalipu	0.00	48	130.52	28,405	218	18	22	6
3003	Tomoni	Luwu Timur	Mandiri	0.00	52	230.09	21,773	95	14	12	1
3004	Tomoni Timur	Luwu Timur	Kertoraharjo	0.00	44	43.91	11,934	272	6	12	3
3005	Angkona	Luwu Timur	Solo	0.00	32	147.24	22,377	152	14	16	7
3006	Malili	Luwu Timur	Puncak Indah	0.00	3	921.20	31,775	34	18	22	6
3007	Towuti	Luwu Timur	Langkea Raya	0.00	53	1,820.48	24,970	14	10	16	8
3008	Nuha	Luwu Timur	Magani	0.00	58	808.27	21,005	26	6	10	5
3009	Wasuponda	Luwu Timur	Ledu-Ledu	0.00	35	1,244.00	17,667	14	4	12	3
3010	Mangkutana	Luwu Timur	Wonorejo	0.00	55	1,300.96	20,412	16	14	14	6
3011	Kalaena	Luwu Timur	Kalaena Kiri	0.00	65	41.98	11,039	263	6	8	3
3101	Sopai	Toraja Utara	Nonongan Sel.	12.50	13	47.64	13,526	284	4	8	2
3102	Kesu	Toraja Utara	Ba'tan	28.57	17	26.00	15,291	588	8	10	2
3103	Sanggalangi	Toraja Utara	Buntu La'bo	16.67	19	39.00	11,663	299	2	9	3
3104	Buntao	Toraja Utara	Misa'Ba'bana	33.33	22	49.50	9,385	190	4	10	2

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
3105	Rantebua	Toraja Utara	Buangin	28.57	46	84.84	9,496	112	1	9	2
3106	Nanggala	Toraja Utara	N. Sangpiak	11.11	33	68.00	10,074	148	9	12	4
3107	Tondon	Toraja Utara	Tondon Langi	0.00	22	36.00	9,737	270	4	8	3
3108	Tallunglipu	Toraja Utara	Tallunglipu	85.71	19	9.42	15,761	1,673	6	8	2
3109	Rantepao	Toraja Utara	Singki	81.82	18	10.29	25,805	2,508	7	9	4
3110	Tikala	Toraja Utara	Buntu Barana	28.57	21	23.44	11,024	470	7	9	2
3111	Sesean	Toraja Utara	Pangli	55.56	25	40.05	11,682	292	6	9	2
3112	Balusu	Toraja Utara	Balusu	28.57	30	46.51	7,766	167	1	7	2
3113	Sa'dan	Toraja Utara	S. Malimbong	20.00	25	80.49	14,720	183	7	19	4
3114	Bengkele Kila	Toraja Utara	Tampan Bonga	0.00	37	21.00	5,873	280	0	4	2
3115	Sesean Suloara	Toraja Utara	Suloara	0.00	39	21.68	6,172	285	5	6	2
3116	Kapala Pitu	Toraja Utara	Polo Padang	0.00	34	47.27	6,957	147	6	8	2
3117	D. Pongan Napo	Toraja Utara	Dende	12.50	17	77.49	9,937	128	2	8	2
3118	A. Rante Karua	Toraja Utara	Avan	0.00	76	54.71	4,926	90	0	6	1
3119	Rindingallo	Toraja Utara	Pangala	22.22	60	74.25	8,729	118	6	9	1
3120	Buntu Pepasan	Toraja Utara	Sapan	7.69	46	131.72	13,892	105	4	13	4
3121	Baruppu	Toraja Utara	Baruppu Sel.	25.00	70	162.17	6,674	41	1	7	2
3201	Mariso	Makassar	Mariso	100.00	4	1.82	55,431	30,457	8	19	6
3202	Mamajang	Makassar	Mamajang	100.00	4	2.25	61,294	27,242	13	24	10
3203	Tamalate	Makassar	Tamalate	100.00	5	20.21	154,464	7,643	30	49	13
3204	Rappocini	Makassar	Rappocini	100.00	7	9.23	145,090	15,719	34	48	16
3205	Makassar	Makassar	Makassar	100.00	0	2.52	84,143	33,390	18	38	16
3206	Ujung Pandang	Makassar	Ujung Pandang	100.00	1	2.63	29,064	11,051	18	29	17
3207	Wajo	Makassar	Wajo	100.00	1	1.99	35,533	17,856	8	14	8
3208	Bontoala	Makassar	Bontoala	100.00	1	2.10	62,731	29,872	15	21	10
3209	Ujung Tanah	Makassar	Ujung Tanah	100.00	3	5.94	49,103	8,266	6	21	8
3210	Tallo	Makassar	Tallo	100.00	4	5.83	137,333	23,556	15	44	13
3211	Panakkukang	Makassar	Panakkukang	100.00	7	17.05	136,555	8,009	40	46	15
3212	Manggala	Makassar	Manggala	100.00	9	24.14	100,484	4,163	40	33	13

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Nama Kabupaten (2)	Ibu Kota Kecamatan (4)	% Kelurahan (5)	Jarak Ibukota Kab. (km) (6)	Luas Area (km ²) (7)	Penduduk (Jiwa) (8)	Kepadatan (Jiwa/km ²) (9)	Fasilitas Per		
									TK (10)	SD (11)	SLTP (12)
3213	Biringkanaya	Makassar	Biringkanaya	100.00	12	48.22	130,651	2,709	59	43	18
3214	Tamalanrea	Makassar	Tamalanrea	100.00	10	31.84	90,473	2,841	29	30	8
3301	Bacukiki	Pare-Pare	Lompoe	25.00	3	66.70	13,857	208	3	11	5
3302	Bacukiki Barat	Pare-Pare	Cappalagung	100.00	1	13.00	36,482	2,806	13	29	4
3303	Ujung	Pare-Pare	Mallusetasi	100.00	4	11.30	29,150	2,580	14	23	5
3304	Soreang	Pare-Pare	Bukit Indah	100.00	6	8.33	37,574	4,511	14	35	7
3401	Wara Selatan	Palopo	Songka	25.00	3	10.66	10,034	941	1	3	1
3402	Sendana	Palopo	Sendana	0.00	5	37.09	5,685	153	3	5	1
3403	Wara	Palopo	Dangerakko	100.00	1	11.49	30,747	2,676	9	14	1
3404	Wara Timur	Palopo	Malatunrung	100.00	1	12.08	30,749	2,545	11	11	4
3405	Mungkajang	Palopo	Mungkajang	100.00	3	53.80	6,924	129	2	5	2
3406	Wara Utara	Palopo	Salobulo	100.00	2	10.58	18,844	1,781	10	8	6
3407	Bara	Palopo	Temmalebba	100.00	5	23.35	22,562	966	11	11	4
3408	Tellu Wanua	Palopo	Maroangin	0.00	12	34.34	11,608	338	2	10	4
3409	Wara Barat	Palopo	Tomarundung	20.00	2	54.13	6,329	117	1	10	2

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Lampiran I: Data Awal

Kode	Nama Kecamatan	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan		Perdagangan			PDRB		
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
(1)	(3)										
1101	Pasimarannu	1	0	0	1	5	1	6	115,175	0.96	0.95
1102	Pasilambena	0	0	0	1	8	0	6	115,175	0.96	0.95
1103	Pasimasunggu	1	0	0	1	0	1	7	115,175	0.96	0.95
1104	Taka Bonerate	1	0	0	1	7	1	8	115,175	0.96	0.95
1105	Pasimasunggu T	1	0	0	1	3	0	6	115,175	0.96	0.95
1106	Bontosikuyu	1	0	0	2	11	3	12	115,175	0.96	0.95
1107	Bontoharu	2	0	0	1	7	0	10	115,175	0.96	0.95
1108	Benteng	6	0	0	1	0	1	70	115,175	0.96	0.95
1109	Bontamanai	1	0	0	1	8	2	11	115,175	0.96	0.95
1110	Bontomatene	1	0	0	2	7	3	15	115,175	0.96	0.95
1111	Buki	0	0	0	1	4	1	6	115,175	0.96	0.95
1201	Gantarang	4	0	0	1	7	6	37	661,198	3.37	3.39
1202	Ujung Bulu	14	2	1	1	2	1	93	661,198	3.37	3.39
1203	Ujung Loe	2	0	0	1	6	2	21	661,198	3.37	3.39
1204	Bontobahari	2	0	0	1	3	2	11	661,198	3.37	3.39
1205	Bonto Tiro	2	0	0	2	9	1	10	661,198	3.37	3.39
1206	Herlang	3	0	0	2	6	1	14	661,198	3.37	3.39
1207	Kajang	3	0	0	1	10	1	14	661,198	3.37	3.39
1208	Bulukumpa	4	0	0	1	9	3	19	661,198	3.37	3.39
1209	Rilau Ale	3	1	0	1	8	2	16	661,198	3.37	3.39
1210	Kindang	5	0	0	1	5	0	10	661,198	3.37	3.39
1301	Bissapu	3	0	0	1	5	2	15	290,012	1.51	1.60
1302	Uluere	1	0	0	0	4	1	14	290,012	1.51	1.60
1303	Sinoa	0	0	0	0	4	1	12	290,012	1.51	1.60
1304	Bantaeng	2	0	2	2	8	3	13	290,012	1.51	1.60
1305	Erenerasa	0	0	0	1	6	2	12	290,012	1.51	1.60
1306	Tompebula	2	0	0	1	1	1	13	290,012	1.51	1.60
1307	Pajukulang	3	0	0	0	4	1	4	290,012	1.51	1.60

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
1308	Gantarangkeke	0	0	0	1	5	2	19	290,012	1.51	1.60
1401	Bangkala	8	1	0	2	4	1	21	404,391	1.98	1.95
1402	Bangkala Barat	5	1	0	2	5	1	18	404,391	1.98	1.95
1403	Tamalatea	9	1	0	1	6	3	23	404,391	1.98	1.95
1404	Bontoramba	7	0	0	1	8	2	9	404,391	1.98	1.95
1405	Binamu	12	2	0	3	2	2	70	404,391	1.98	1.95
1406	Turatea	3	0	0	2	7	2	14	404,391	1.98	1.95
1407	Batang	2	0	0	1	3	1	7	404,391	1.98	1.95
1408	Arungkeke	1	0	0	1	2	1	13	404,391	1.98	1.95
1409	Tarowang	0	0	0	2	1	2	13	404,391	1.98	1.95
1410	Kelara	4	1	0	1	5	1	9	404,391	1.98	1.95
1411	Rumbia	2	0	0	2	6	1	11	404,391	1.98	1.95
1501	Mangarabombang	1	0	0	2	7	3	29	530,622	1.87	1.91
1502	Mappakasunggu	2	0	0	1	2	1	12	530,622	1.87	1.91
1503	Sanrobone	1	0	0	1	3	1	10	530,622	1.87	1.91
1504	Polombangkeng S	2	0	0	2	5	3	17	530,622	1.87	1.91
1505	Pattalassang	9	1	1	1	3	1	107	530,622	1.87	1.91
1506	Polombangkeng U	5	1	0	3	8	4	34	530,622	1.87	1.91
1507	Galesong Selatan	3	0	0	1	5	1	20	530,622	1.87	1.91
1508	Galesong	2	0	0	1	6	2	26	530,622	1.87	1.91
1509	Galesong Utara	2	0	0	2	6	3	23	530,622	1.87	1.91
1601	Bontonompo	4	0	0	1	11	5	30	1,243,823	4.11	4.49
1602	Bontonompo Sel.	3	0	0	1	8	0	0	1,243,823	4.11	4.49
1603	Bajeng	7	1	0	2	7	5	42	1,243,823	4.11	4.49
1604	Bajeng Barat	0	0	0	1	8	0	0	1,243,823	4.11	4.49
1605	Pallangga	4	1	0	2	12	2	45	1,243,823	4.11	4.49
1606	Barombong	0	0	0	2	6	2	8	1,243,823	4.11	4.49
1607	Sombaopu	25	2	1	2	4	1	145	1,243,823	4.11	4.49
1608	Bontomarannu	1	0	0	1	4	1	15	1,243,823	4.11	4.49

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Indidikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
1609	Pattalassang	4	0	0	1	3	1	0	1,243,823	4.11	4.49
1610	Parangloe	3	0	0	1	6	2	16	1,243,823	4.11	4.49
1611	Manuju	0	0	0	1	5	0	0	1,243,823	4.11	4.49
1612	Tinggimoncong	4	0	0	1	4	3	20	1,243,823	4.11	4.49
1613	Tombolo Pao	4	0	0	1	8	1	11	1,243,823	4.11	4.49
1614	Parigi	1	0	0	1	4	0	0	1,243,823	4.11	4.49
1615	Bungaya	4	0	0	1	7	2	10	1,243,823	4.11	4.49
1616	Bontolempangan	3	0	0	1	9	0	0	1,243,823	4.11	4.49
1617	Tompobulu	3	0	0	1	7	2	24	1,243,823	4.11	4.49
1618	Biringbulu	3	0	0	2	10	0	10	1,243,823	4.11	4.49
1701	Sinjai Barat	1	1	0	2	7	2	7	482,944	2.33	2.54
1702	Sinjai Borong	1	0	0	1	7	1	1	482,944	2.33	2.54
1703	Sinjai Selatan	1	0	0	2	9	2	9	482,944	2.33	2.54
1704	Tellu Limpoe	1	0	0	2	9	1	4	482,944	2.33	2.54
1705	Sinjai Timur	2	1	0	3	8	2	11	482,944	2.33	2.54
1706	Sinjai Tengah	1	0	0	2	9	2	4	482,944	2.33	2.54
1707	Sinjai Utara	8	2	1	1	4	2	55	482,944	2.33	2.54
1708	Bulupoddo	1	0	0	1	6	1	6	482,944	2.33	2.54
1709	Pulau Sembilan	0	0	0	1	3	0	0	482,944	2.33	2.54
1801	Mandai	2	0	1	1	7	1	7	665,192	2.30	2.24
1802	Moncongloe	2	1	0	1	7	2	7	665,192	2.30	2.24
1803	Maros Baru	2	1	0	1	4	1	4	665,192	2.30	2.24
1804	Marusu	2	1	0	1	6	1	6	665,192	2.30	2.24
1805	Turikale	4	3	0	1	7	1	7	665,192	2.30	2.24
1806	Lau	2	1	0	1	11	2	11	665,192	2.30	2.24
1807	Bontoa	1	0	0	1	15	2	15	665,192	2.30	2.24
1808	Bantimurung	2	0	0	1	19	3	19	665,192	2.30	2.24
1809	Simbang	1	0	0	1	11	2	11	665,192	2.30	2.24
1810	Tanralili	2	0	0	1	15	2	15	665,192	2.30	2.24

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode	Nama Kecamatan	Didikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA	Univ.	RS	Puskesmas	P. Pembt.	KUD	Non KUD	Nilai MKM (jt)	2005	2009
(1)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1811	Tompobulu	1	0	0	1	11	2	11	665,192	2.30	2.24
1812	Camba	2	1	0	1	8	1	8	665,192	2.30	2.24
1813	Cenrana	1	0	0	1	9	1	9	665,192	2.30	2.24
1814	Mallawa	1	0	0	1	12	2	12	665,192	2.30	2.24
1901	Liukang Tanaya	1	0	0	1	5	2	22	499,638	4.61	4.68
1902	Liukang Kalmas	1	0	0	1	6	1	8	499,638	4.61	4.68
1903	L. Tupabbiring	1	0	0	2	13	1	26	499,638	4.61	4.68
1904	L. Tupabbiring Ut.	0	0	0	0	0	0	0	499,638	4.61	4.68
1905	Pangkajene	5	2	2	4	4	2	73	499,638	4.61	4.68
1906	Minasatene	3	1	0	3	3	0	22	499,638	4.61	4.68
1907	Balocci	2	0	0	4	4	1	11	499,638	4.61	4.68
1908	Tondong Tallasa	1	0	0	4	4	1	7	499,638	4.61	4.68
1909	Bungoro	4	2	0	4	4	2	29	499,638	4.61	4.68
1910	Labakkang	1	0	0	6	6	2	20	499,638	4.61	4.68
1911	Marang	1	0	0	6	6	2	23	499,638	4.61	4.68
1912	Segeri	2	0	0	5	5	1	10	499,638	4.61	4.68
1913	Mandalle	1	0	0	3	3	0	10	499,638	4.61	4.68
2001	Tanete Riaja	1	0	0	2	9	2	8	345,185	1.54	1.50
2002	Pujananting	0	0	0	1	6	1	6	345,185	1.54	1.50
2003	Tanete Rilau	1	2	0	2	6	2	7	345,185	1.54	1.50
2004	Barru	1	2	2	2	7	2	7	345,185	1.54	1.50
2005	Soppeng Riaja	2	1	0	1	6	1	5	345,185	1.54	1.50
2006	Balusu	1	1	0	1	4	1	3	345,185	1.54	1.50
2007	Mallusetasi	1	0	0	1	7	1	7	345,185	1.54	1.50
2101	Bontocani	1	0	0	1	3	1	9	1,052,448	6.44	6.68
2102	Kahu	5	1	0	2	6	2	13	1,052,448	6.44	6.68
2103	Kajuara	2	0	0	1	4	2	9	1,052,448	6.44	6.68
2104	Salomekko	2	0	0	1	1	1	8	1,052,448	6.44	6.68
2105	Tonra	1	0	0	1	3	1	9	1,052,448	6.44	6.68

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
2106	Patimpeng	2	0	0	1	2	1	6	1,052,448	6,44	6,68
2107	Libureng	2	0	0	2	3	1	5	1,052,448	6,44	6,68
2108	Mare	1	0	0	1	2	1	5	1,052,448	6,44	6,68
2109	Sibulue	2	0	0	1	4	2	7	1,052,448	6,44	6,68
2110	Cina	1	0	0	1	1	1	8	1,052,448	6,44	6,68
2111	Barebbo	0	0	0	2	1	1	7	1,052,448	6,44	6,68
2112	Ponre	0	0	0	2	1	1	6	1,052,448	6,44	6,68
2113	Lappariaja	2	0	0	1	2	1	8	1,052,448	6,44	6,68
2114	Lamuru	3	1	0	1	3	1	8	1,052,448	6,44	6,68
2115	Tellu Limpoe	0	0	0	1	1	1	2	1,052,448	6,44	6,68
2116	Bengo	1	0	0	1	1	1	6	1,052,448	6,44	6,68
2117	Ulaweng	2	0	0	1	2	1	5	1,052,448	6,44	6,68
2118	Palakka	0	0	0	2	3	1	4	1,052,448	6,44	6,68
2119	Awangpone	3	1	0	2	3	1	7	1,052,448	6,44	6,68
2120	Tellu Siattinge	3	1	0	2	4	2	9	1,052,448	6,44	6,68
2121	Amali	2	0	0	1	4	1	7	1,052,448	6,44	6,68
2122	Ajangale	2	0	0	2	3	1	6	1,052,448	6,44	6,68
2123	Dua Boccoe	3	0	0	2	4	1	5	1,052,448	6,44	6,68
2124	Cenrana	1	0	0	1	1	1	3	1,052,448	6,44	6,68
2125	T. Riattang Barat	5	2	0	1	1	1	15	1,052,448	6,44	6,68
2126	Tanete Riattang	5	2	0	1	0	1	24	1,052,448	6,44	6,68
2127	T. Riattang Timur	2	2	0	1	2	1	23	1,052,448	6,44	6,68
2201	Marioriwawo	2	1	0	3	9	1	10	453,124	2,39	2,41
2202	Lalabata	9	3	1	3	7	1	15	453,124	2,39	2,41
2203	Liliriaja	4	2	0	2	4	1	6	453,124	2,39	2,41
2204	Ganra	1	0	0	1	3	1	4	453,124	2,39	2,41
2205	Citra	1	0	0	1	1	0	2	453,124	2,39	2,41
2206	Aliriaja	2	1	0	3	9	1	9	453,124	2,39	2,41
2207	Donri-conri	1	0	0	2	7	1	8	453,124	2,39	2,41

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode	Nama Kecamatan	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan		Perdagangan			PDRB		
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
(1)	(3)										
2208	Marioriawa	2	0	0	2	5	1	7	453,124	2.39	2.41
2301	Sabbangparu	1	0	0	2	5	1	6	785,905	4.84	4.86
2302	Tempe	4	6	2	2	1	1	19	785,905	4.84	4.86
2303	Pamma	1	2	0	2	5	1	8	785,905	4.84	4.86
2304	Bola	1	0	0	1	5	0	7	785,905	4.84	4.86
2305	Takkalalla	1	0	0	2	2	1	6	785,905	4.84	4.86
2306	Sajoanging	1	0	0	2	3	1	9	785,905	4.84	4.86
2307	Penrang	1	0	0	1	3	1	9	785,905	4.84	4.86
2308	Majauleng	1	0	0	2	7	2	12	785,905	4.84	4.86
2309	Tanasitolo	0	0	0	2	4	1	7	785,905	4.84	4.86
2310	Belawa	1	0	0	2	5	1	8	785,905	4.84	4.86
2311	Maniangpajo	1	0	0	1	2	1	8	785,905	4.84	4.86
2312	Gilireng	0	0	0	0	4	1	5	785,905	4.84	4.86
2313	Keera	1	0	0	1	3	1	7	785,905	4.84	4.86
2314	Pitumpanua	2	0	0	1	5	2	49	785,905	4.84	4.86
2401	Panca Lautang	2	0	0	1	4	1	12	574,568	2.91	3.06
2402	Tellu Limpoe	2	0	0	1	3	1	19	574,568	2.91	3.06
2403	Watang Pulu	4	0	0	1	5	1	31	574,568	2.91	3.06
2404	Baranti	3	0	0	2	4	1	21	574,568	2.91	3.06
2405	Panca Rijang	5	1	1	1	3	1	35	574,568	2.91	3.06
2406	Kulo	1	0	0	1	3	1	4	574,568	2.91	3.06
2407	Maritenggae	8	2	1	1	4	2	118	574,568	2.91	3.06
2408	W. Sidenreng	1	0	0	1	1	2	6	574,568	2.91	3.06
2409	Pitu Riawa	2	0	0	2	4	2	13	574,568	2.91	3.06
2410	Dua Pitue	2	0	0	1	6	2	20	574,568	2.91	3.06
2411	Pitu Riase	0	0	0	2	4	1	27	574,568	2.91	3.06
2501	Suppa	1	0	0	2	1	1	8	764,059	4.75	4.68
2502	Mattiro Sompe	1	0	0	1	4	2	9	764,059	4.75	4.68
2503	Lanrisang	1	0	0	1	1	1	4	764,059	4.75	4.68

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
2504	Mattiro Bulu	2	1	0	1	5	2	9	764,059	4.75	4.68
2505	Watang Sawitto	7	3	3	1	1	1	16	764,059	4.75	4.68
2506	Paletiang	6	2	0	1	2	1	15	764,059	4.75	4.68
2507	Tiroang	1	0	0	1	2	1	6	764,059	4.75	4.68
2508	Patampanua	2	0	0	1	4	2	6	764,059	4.75	4.68
2509	Cempa	1	0	0	2	2	1	5	764,059	4.75	4.68
2510	Duampanua	2	0	0	2	7	2	5	764,059	4.75	4.68
2511	Batulappa	0	0	0	1	2	0	6	764,059	4.75	4.68
2512	Lembang	1	0	0	1	4	1	7	764,059	4.75	4.68
2601	Maiwa	6	1	0	1	13	1	11	275,749	1.63	1.68
2602	Bungin	1	0	0	1	3	0	0	275,749	1.63	1.68
2603	Enrekang	10	3	1	1	11	1	60	275,749	1.63	1.68
2604	Cendana	3	0	0	1	6	1	5	275,749	1.63	1.68
2605	Baraka	5	1	0	1	9	2	11	275,749	1.63	1.68
2606	Buntu Batu	1	0	0	1	7	0	2	275,749	1.63	1.68
2607	Anggeraja	4	0	1	1	8	2	17	275,749	1.63	1.68
2608	Malua	3	0	0	2	3	1	2	275,749	1.63	1.68
2609	Alla	6	2	0	1	1	1	11	275,749	1.63	1.68
2610	Curto	3	0	0	1	3	1	7	275,749	1.63	1.68
2611	Masalle	0	0	0	1	4	0	0	275,749	1.63	1.68
2612	Baroko	0	0	0	1	3	0	2	275,749	1.63	1.68
2701	Larompong	3	0	0	1	9	3	13	639,634	3.39	3.33
2702	Larompong Sel.	2	0	0	1	6	1	15	639,634	3.39	3.33
2703	Suli	2	0	0	1	4	2	19	639,634	3.39	3.33
2704	Suli Barat	2	0	0	1	3	0	6	639,634	3.39	3.33
2705	Belopa	4	0	0	1	3	1	55	639,634	3.39	3.33
2706	Kamanre	1	0	0	1	5	1	25	639,634	3.39	3.33
2707	Belopa Utara	3	1	1	1	5	1	21	639,634	3.39	3.33
2708	Bajo	2	0	0	1	3	1	12	639,634	3.39	3.33

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode	Nama Kecamatan	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan		Perdagangan			PDRB		
		SLTA	Univ.	RS	Puskesmas	P. Pembt.	KUD	Non KUD	Nilai MKM (jt)	2005	2009
(1)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2709	Bajo Barat	1	0	0	1	4	1	9	639,634	3.39	3.33
2710	Bassesangtempe	1	0	0	1	6	1	8	639,634	3.39	3.33
2711	Latimojong	1	0	0	1	8	0	3	639,634	3.39	3.33
2712	Bupon	4	0	0	1	5	2	15	639,634	3.39	3.33
2713	Ponrang	4	0	0	1	5	1	34	639,634	3.39	3.33
2714	Ponrang Selatan	1	0	0	1	6	2	23	639,634	3.39	3.33
2715	Bua	1	0	0	1	7	3	24	639,634	3.39	3.33
2716	Walentrang	3	0	0	1	4	2	24	639,634	3.39	3.33
2717	Walentrang Timur	1	0	0	1	6	2	17	639,634	3.39	3.33
2718	Lamasi	2	0	0	1	1	1	15	639,634	3.39	3.33
2719	Walentrang Utara	1	0	0	1	7	2	6	639,634	3.39	3.33
2720	Walentrang Barat	0	0	0	1	4	0	0	639,634	3.39	3.33
2721	Lamasi Timur	1	0	0	1	3	0	5	639,634	3.39	3.33
2801	Bongkakaradeng	1	0	0	1	4	1	25	456,132	2.71	1.31
2802	Simbuang	1	0	0	1	2	1	21	456,132	2.71	1.31
2803	Rano	0	0	0	0	0	0	12	456,132	2.71	1.31
2804	Mappak	0	0	0	0	0	0	9	456,132	2.71	1.31
2805	Mengkendek	7	0	0	1	1	1	8	456,132	2.71	1.31
2806	G. Batu Sillanan	1	0	0	1	1	1	3	456,132	2.71	1.31
2807	Sanggalla	3	0	0	1	1	1	15	456,132	2.71	1.31
2808	Sanggalla Selatan	0	0	0	1	1	1	23	456,132	2.71	1.31
2809	Sanggalla Utara	0	0	0	1	1	1	15	456,132	2.71	1.31
2810	Makale	11	4	1	1	1	1	24	456,132	2.71	1.31
2811	Makale Selatan	1	0	0	1	1	1	21	456,132	2.71	1.31
2812	Makale Utara	4	0	1	1	1	1	17	456,132	2.71	1.31
2813	Saluputti	2	0	0	1	1	1	15	456,132	2.71	1.31
2814	Bituang	0	0	0	1	1	1	6	456,132	2.71	1.31
2815	Rembon	0	0	0	1	1	1	0	456,132	2.71	1.31
2816	Masanda	1	0	0	1	1	1	15	456,132	2.71	1.31

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan		Perdagangan			PDRB		
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
2817	M. Balepe	0	0	0	0	1	0	14	456,132	2.71	1.31
2818	Rantetayo	2	0	0	1	1	1	13	456,132	2.71	1.31
2819	Kurra	0	0	0	1	1	1	13	456,132	2.71	1.31
2901	Sabbang	2	0	0	1	9	1	17	645,768	2.70	2.80
2902	Baebunta	5	0	0	2	7	5	27	645,768	2.70	2.80
2903	Malangke	4	0	0	1	6	2	12	645,768	2.70	2.80
2904	Malangke Barat	2	0	0	1	5	1	13	645,768	2.70	2.80
2905	Sukamaju	2	0	0	1	6	7	19	645,768	2.70	2.80
2906	Bone-Bone	4	0	0	1	9	6	37	645,768	2.70	2.80
2907	Masamba	5	1	1	1	8	1	40	645,768	2.70	2.80
2908	Mappedeceng	2	0	0	1	4	2	15	645,768	2.70	2.80
2909	Rampi	1	0	0	1	3	0	1	645,768	2.70	2.80
2910	Limbong	1	0	0	1	2	1	3	645,768	2.70	2.80
2911	Seko	1	0	0	1	5	0	5	645,768	2.70	2.80
3001	Burau	3	0	0	1	11	1	21	986,374	9.97	6.68
3002	Wotu	3	0	1	1	8	3	23	986,374	9.97	6.68
3003	Tomoni	2	0	0	1	4	0	27	986,374	9.97	6.68
3004	Tomoni Timur	1	0	0	1	2	1	7	986,374	9.97	6.68
3005	Angkona	3	0	0	1	7	5	13	986,374	9.97	6.68
3006	Malili	4	0	0	1	10	2	32	986,374	9.97	6.68
3007	Towuti	3	0	0	1	8	1	13	986,374	9.97	6.68
3008	Nuha	4	0	1	1	2	1	7	986,374	9.97	6.68
3009	Wasuponda	1	0	0	1	5	0	10	986,374	9.97	6.68
3010	Mangkutana	4	0	0	1	5	2	23	986,374	9.97	6.68
3011	Kalaena	1	0	0	1	0	1	11	986,374	9.97	6.68
3101	Sopai	1	0	0	1	2	1	6	563,725	0.00	1.32
3102	Kesu	5	0	0	0	1	1	5	563,725	0.00	1.32
3103	Sanggalangi	0	0	0	1	8	1	3	563,725	0.00	1.32
3104	Buntao	0	0	0	1	3	1	3	563,725	0.00	1.32

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode	Nama Kecamatan	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA	Univ.	RS	Puskesmas	P. Pembt.	KUD	Non KUD	Nilai MKM (jt)	2005	2009
(1)	(3)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3105	Rantebua	0	0	0	1	3	0	0	563,725	0.00	1.32
3106	Nanggala	0	0	0	1	5	1	2	563,725	0.00	1.32
3107	Tondon	1	0	0	1	2	0	3	563,725	0.00	1.32
3108	Tallunglipu	5	2	0	1	2	1	14	563,725	0.00	1.32
3109	Rantepao	14	3	1	2	0	1	34	563,725	0.00	1.32
3110	Tikala	1	0	0	1	6	0	3	563,725	0.00	1.32
3111	Sesean	1	0	0	1	4	1	5	563,725	0.00	1.32
3112	Balusu	0	0	0	1	2	0	2	563,725	0.00	1.32
3113	Sa'dan	1	0	0	1	4	0	2	563,725	0.00	1.32
3114	Bengkele Kila	0	0	0	1	3	0	1	563,725	0.00	1.32
3115	Sesean Suloaara	0	0	0	1	4	0	1	563,725	0.00	1.32
3116	Kapala Pitu	0	0	0	1	1	0	2	563,725	0.00	1.32
3117	D. Piongan Napo	0	0	0	1	5	0	0	563,725	0.00	1.32
3118	A. Rante Karua	0	0	0	0	0	0	2	563,725	0.00	1.32
3119	Rindingallo	2	0	0	1	5	1	0	563,725	0.00	1.32
3120	Buntu Pepasan	1	0	0	1	2	1	3	563,725	0.00	1.32
3121	Baruppu	0	0	0	1	0	0	1	563,725	0.00	1.32
3201	Mariso	5	3	1	2	2	0	84	13,699,295	30.45	32.55
3202	Mamajang	12	4	1	3	4	0	71	13,699,295	30.45	32.55
3203	Tamalate	11	4	1	3	4	1	143	13,699,295	30.45	32.55
3204	Rappocini	11	4	2	3	4	0	170	13,699,295	30.45	32.55
3205	Makassar	11	4	2	3	4	0	81	13,699,295	30.45	32.55
3206	Ujung Pandang	10	4	2	4	4	0	95	13,699,295	30.45	32.55
3207	Wajo	5	3	1	2	3	0	48	13,699,295	30.45	32.55
3208	Bontoala	5	4	1	2	3	0	51	13,699,295	30.45	32.55
3209	Ujung Tanah	2	3	1	1	2	1	30	13,699,295	30.45	32.55
3210	Tallo	4	4	1	2	3	0	62	13,699,295	30.45	32.55
3211	Panakkukang	10	4	2	3	4	2	191	13,699,295	30.45	32.55
3212	Manggala	10	4	1	3	4	0	75	13,699,295	30.45	32.55

Keterkaitan pendekatan..., Deliana, Pascasarjana UI, 2010

Kode (1)	Nama Kecamatan (3)	Pendidikan		Fasilitas Kesehatan			Perdagangan			PDRB	
		SLTA (13)	Univ. (14)	RS (15)	Puskesmas (16)	P. Pembt. (17)	KUD (18)	Non KUD (19)	Nilai MKM (jt) (20)	2005 (21)	2009 (22)
3213	Biringkanaya	10	4	2	4	4	1	120	13,699,295	30.45	32.55
3214	Tamalanrea	6	3	1	2	2	0	78	13,699,295	30.45	32.55
3301	Bacukiki	0	1	0	0	0	3	61	1,062,841	1.52	1.58
3302	Bacukiki Barat	5	3	1	2	2	4	0	1,062,841	1.52	1.58
3303	Ujung	6	3	0	2	2	4	2	1,062,841	1.52	1.58
3304	Soreang	8	3	0	2	2	6	1	1,062,841	1.52	1.58
3401	Wara Selatan	1	2	0	2	2	5	2	1,724,805	1.73	1.71
3402	Sendana	0	0	0	1	1	6	0	1,724,805	1.73	1.71
3403	Wara	4	2	2	1	1	2	85	1,724,805	1.73	1.71
3404	Wara Timur	0	1	2	2	2	3	39	1,724,805	1.73	1.71
3405	Mungkajang	0	0	0	1	1	2	10	1,724,805	1.73	1.71
3406	Wara Utara	4	3	1	0	0	5	2	1,724,805	1.73	1.71
3407	Bara	5	2	0	2	2	1	2	1,724,805	1.73	1.71
3408	Teluh Wanua	1	0	0	1	1	5	0	1,724,805	1.73	1.71
3409	Wara Barat	2	0	0	1	1	3	0	1,724,805	1.73	1.71

LAMPIRAN 2:

Tabel Lampiran 2

Scoring Masing-masing Varibel Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1101	Kep. Selayar	0.20	0.20	0.33	0.20	0.20	1.13	III	III
1102	Kep. Selayar	0.20	0.20	0.47	0.20	0.20	1.27	III	
1103	Kep. Selayar	0.20	0.28	0.20	0.20	0.20	1.08	III	
1104	Kep. Selayar	0.20	0.28	0.33	0.20	0.20	1.21	III	
1105	Kep. Selayar	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	
1106	Kep. Selayar	0.20	0.36	0.60	0.60	0.20	1.96	III	
1107	Kep. Selayar	0.33	0.36	0.33	0.33	0.20	1.56	III	
1108	Kep. Selayar	0.73	0.44	0.20	0.47	0.20	2.04	II	
1109	Kep. Selayar	0.20	0.44	0.47	0.47	0.20	1.77	III	
1110	Kep. Selayar	0.20	0.44	0.47	0.60	0.20	1.91	III	
1111	Kep. Selayar	0.20	0.28	0.20	0.20	0.20	1.08	III	
1201	Bulukumba	0.60	0.68	0.33	0.60	0.60	2.81	II	II
1202	Bulukumba	0.87	0.92	0.33	0.47	0.60	3.19	II	
1203	Bulukumba	0.33	0.44	0.33	0.47	0.60	2.17	II	
1204	Bulukumba	0.47	0.44	0.20	0.47	0.60	2.17	II	
1205	Bulukumba	0.47	0.60	0.60	0.33	0.60	2.60	II	
1206	Bulukumba	0.47	0.76	0.47	0.33	0.60	2.63	II	
1207	Bulukumba	0.47	0.68	0.47	0.33	0.60	2.55	II	
1208	Bulukumba	0.60	0.68	0.47	0.60	0.60	2.95	II	
1209	Bulukumba	0.47	0.68	0.47	0.47	0.60	2.68	II	
1210	Bulukumba	0.33	0.60	0.33	0.33	0.60	2.20	II	
1301	Bantaeng	0.73	0.36	0.33	0.47	0.20	2.09	II	III
1302	Bantaeng	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
1303	Bantaeng	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
1304	Bantaeng	0.87	0.28	0.87	0.60	0.20	2.81	II	
1305	Bantaeng	0.33	0.20	0.33	0.47	0.20	1.53	III	
1306	Bantaeng	0.33	0.28	0.20	0.33	0.20	1.35	III	
1307	Bantaeng	0.47	0.28	0.20	0.20	0.20	1.35	III	
1308	Bantaeng	0.47	0.20	0.33	0.47	0.20	1.67	III	
1401	Jeneponto	0.60	0.92	0.33	0.33	0.20	2.39	II	II
1402	Jeneponto	0.20	0.60	0.47	0.33	0.20	1.80	III	
1403	Jeneponto	0.73	0.84	0.33	0.60	0.20	2.71	II	
1404	Jeneponto	0.47	0.76	0.47	0.33	0.20	2.23	II	
1405	Jeneponto	0.73	1.00	0.47	0.60	0.20	3.00	II	
1406	Jeneponto	0.47	0.68	0.47	0.47	0.20	2.28	II	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1407	Jeneponto	0.47	0.36	0.20	0.20	0.20	1.43	III	
1408	Jeneponto	0.33	0.36	0.20	0.33	0.20	1.43	III	
1409	Jeneponto	0.33	0.44	0.33	0.47	0.20	1.77	III	
1410	Jeneponto	0.73	0.68	0.33	0.20	0.20	2.15	II	
1411	Jeneponto	0.33	0.52	0.47	0.33	0.20	1.85	III	
1501	Takalar	0.47	0.44	0.47	0.60	0.20	2.17	II	II
1502	Takalar	0.33	0.36	0.20	0.33	0.20	1.43	III	
1503	Takalar	0.33	0.20	0.20	0.33	0.20	1.27	III	
1504	Takalar	0.60	0.44	0.47	0.60	0.20	2.31	II	
1505	Takalar	0.87	0.68	0.33	0.47	0.20	2.55	II	
1506	Takalar	0.47	0.68	0.73	0.60	0.20	2.68	II	
1507	Takalar	0.33	0.44	0.33	0.33	0.20	1.64	III	
1508	Takalar	0.60	0.36	0.33	0.47	0.20	1.96	III	
1509	Takalar	0.60	0.44	0.47	0.60	0.20	2.31	II	
1601	Gowa	0.87	0.52	0.47	0.73	0.60	3.19	II	II
1602	Gowa	0.73	0.44	0.47	0.33	0.60	2.57	II	
1603	Gowa	0.73	0.84	0.47	0.87	0.60	3.51	II	
1604	Gowa	0.60	0.20	0.47	0.33	0.60	2.20	II	
1605	Gowa	1.00	0.76	0.60	0.73	0.60	3.69	II	
1606	Gowa	0.87	0.20	0.47	0.47	0.60	2.60	II	
1607	Gowa	1.00	1.00	0.47	0.60	0.60	3.67	II	
1608	Gowa	0.73	0.20	0.20	0.47	0.60	2.20	II	
1609	Gowa	0.47	0.28	0.20	0.33	0.60	1.88	III	
1610	Gowa	0.33	0.28	0.33	0.60	0.60	2.15	II	
1611	Gowa	0.47	0.20	0.33	0.33	0.60	1.93	III	
1612	Gowa	0.33	0.44	0.20	0.73	0.60	2.31	II	
1613	Gowa	0.47	0.52	0.47	0.47	0.60	2.52	II	
1614	Gowa	0.20	0.28	0.20	0.33	0.60	1.61	III	
1615	Gowa	0.20	0.52	0.33	0.60	0.60	2.25	II	
1616	Gowa	0.20	0.36	0.47	0.33	0.60	1.96	III	
1617	Gowa	0.33	0.52	0.33	0.60	0.60	2.39	II	
1618	Gowa	0.33	0.44	0.60	0.47	0.60	2.44	II	
1701	Sinjai	0.20	0.52	0.47	0.33	0.20	1.72	III	III
1702	Sinjai	0.20	0.36	0.33	0.20	0.20	1.29	III	
1703	Sinjai	0.33	0.52	0.60	0.33	0.20	1.99	III	
1704	Sinjai	0.33	0.36	0.60	0.20	0.20	1.69	III	
1705	Sinjai	0.47	0.60	0.73	0.47	0.20	2.47	II	
1706	Sinjai	0.33	0.52	0.60	0.33	0.20	1.99	III	
1707	Sinjai	0.87	0.76	0.33	0.60	0.20	2.76	II	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1708	Sinjai	0.20	0.36	0.33	0.20	0.20	1.29	III	III
1709	Sinjai	0.47	0.20	0.20	0.20	0.20	1.27	III	
1801	Maros	0.60	0.20	0.47	0.20	0.20	1.67	III	
1802	Maros	0.33	0.28	0.33	0.33	0.20	1.48	III	
1803	Maros	0.47	0.36	0.20	0.20	0.20	1.43	III	
1804	Maros	0.33	0.28	0.33	0.20	0.20	1.35	III	
1805	Maros	0.87	0.68	0.33	0.20	0.20	2.28	II	
1806	Maros	0.60	0.28	0.47	0.47	0.20	2.01	II	
1807	Maros	0.33	0.28	0.47	0.47	0.20	1.75	III	
1808	Maros	0.47	0.36	0.47	0.60	0.20	2.09	II	
1809	Maros	0.20	0.20	0.47	0.47	0.20	1.53	III	
1810	Maros	0.20	0.28	0.47	0.47	0.20	1.61	III	
1811	Maros	0.20	0.20	0.47	0.47	0.20	1.53	III	
1812	Maros	0.33	0.44	0.47	0.20	0.20	1.64	III	
1813	Maros	0.20	0.20	0.47	0.20	0.20	1.27	III	
1814	Maros	0.20	0.20	0.47	0.47	0.20	1.53	III	
1901	Pangkep	0.20	0.28	0.33	0.47	0.60	1.88	III	II
1902	Pangkep	0.20	0.20	0.33	0.20	0.60	1.53	III	
1903	Pangkep	0.33	0.28	0.60	0.33	0.60	2.15	II	
1904	Pangkep	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	1.40	III	
1905	Pangkep	0.73	0.68	0.73	0.60	0.60	3.35	II	
1906	Pangkep	0.47	0.52	0.47	0.33	0.60	2.39	II	
1907	Pangkep	0.20	0.20	0.47	0.33	0.60	1.80	III	
1908	Pangkep	0.20	0.20	0.47	0.20	0.60	1.67	III	
1909	Pangkep	0.47	0.60	0.47	0.47	0.60	2.60	II	
1910	Pangkep	0.47	0.28	0.60	0.47	0.60	2.41	II	
1911	Pangkep	0.47	0.36	0.60	0.47	0.60	2.49	II	
1912	Pangkep	0.20	0.28	0.60	0.33	0.60	2.01	II	
1913	Pangkep	0.33	0.20	0.47	0.33	0.60	1.93	III	
2001	Barru	0.20	0.44	0.60	0.33	0.20	1.77	III	III
2002	Barru	0.20	0.36	0.33	0.20	0.20	1.29	III	
2003	Barru	0.47	0.60	0.47	0.33	0.20	2.07	II	
2004	Barru	0.60	0.60	0.73	0.33	0.20	2.47	II	
2005	Barru	0.33	0.52	0.33	0.20	0.20	1.59	III	
2006	Barru	0.20	0.52	0.20	0.20	0.20	1.32	III	
2007	Barru	0.33	0.36	0.33	0.20	0.20	1.43	III	
2101	Bone	0.20	0.44	0.20	0.33	1.00	2.17	II	II
2102	Bone	0.33	0.76	0.47	0.60	1.00	3.16	II	
2103	Bone	0.33	0.52	0.20	0.47	1.00	2.52	II	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2104	Bone	0.20	0.36	0.20	0.33	1.00	2.09	II	
2105	Bone	0.20	0.36	0.20	0.33	1.00	2.09	II	
2106	Bone	0.20	0.36	0.20	0.33	1.00	2.09	II	
2107	Bone	0.33	0.44	0.33	0.33	1.00	2.44	II	
2108	Bone	0.20	0.52	0.20	0.33	1.00	2.25	II	
2109	Bone	0.33	0.52	0.20	0.47	1.00	2.52	II	
2110	Bone	0.33	0.44	0.20	0.33	1.00	2.31	II	
2111	Bone	0.33	0.44	0.33	0.33	1.00	2.44	II	
2112	Bone	0.20	0.36	0.33	0.33	1.00	2.23	II	
2113	Bone	0.20	0.36	0.20	0.33	1.00	2.09	II	
2114	Bone	0.20	0.60	0.20	0.33	1.00	2.33	II	
2115	Bone	0.20	0.28	0.20	0.33	1.00	2.01	II	
2116	Bone	0.33	0.44	0.20	0.33	1.00	2.31	II	
2117	Bone	0.20	0.44	0.20	0.33	1.00	2.17	II	
2118	Bone	0.20	0.36	0.33	0.33	1.00	2.23	II	
2119	Bone	0.33	0.60	0.33	0.33	1.00	2.60	II	
2120	Bone	0.33	0.68	0.33	0.47	1.00	2.81	II	
2121	Bone	0.20	0.44	0.20	0.33	1.00	2.17	II	
2122	Bone	0.33	0.44	0.33	0.33	1.00	2.44	II	
2123	Bone	0.33	0.60	0.33	0.33	1.00	2.60	II	
2124	Bone	0.20	0.44	0.20	0.33	1.00	2.17	II	
2125	Bone	0.73	0.68	0.20	0.47	1.00	3.08	II	
2126	Bone	0.87	0.68	0.20	0.47	1.00	3.21	II	
2127	Bone	0.73	0.68	0.20	0.47	1.00	3.08	II	
2201	Soppeng	0.33	0.68	0.73	0.33	0.20	2.28	II	
2202	Soppeng	0.60	0.92	0.73	0.33	0.20	2.79	II	
2203	Soppeng	0.47	0.60	0.33	0.20	0.20	1.80	III	
2204	Soppeng	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	
2205	Soppeng	0.20	0.28	0.20	0.20	0.20	1.08	III	
2206	Soppeng	0.47	0.60	0.73	0.20	0.20	2.20	II	
2207	Soppeng	0.20	0.36	0.47	0.20	0.20	1.43	III	
2208	Soppeng	0.60	0.36	0.47	0.20	0.20	1.83	III	
2301	Wajo	0.33	0.36	0.47	0.20	0.60	1.96	III	III
2302	Wajo	1.00	0.76	0.60	0.33	0.60	3.29	II	
2303	Wajo	0.33	0.60	0.47	0.20	0.60	2.20	II	
2304	Wajo	0.20	0.28	0.33	0.20	0.60	1.61	III	
2305	Wajo	0.20	0.36	0.33	0.20	0.60	1.69	III	
2306	Wajo	0.33	0.36	0.33	0.20	0.60	1.83	III	
2307	Wajo	0.20	0.28	0.20	0.20	0.60	1.48	III	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2308	Wajo	0.33	0.44	0.47	0.47	0.60	2.31	II	
2309	Wajo	0.33	0.44	0.33	0.20	0.60	1.91	III	
2310	Wajo	0.47	0.44	0.47	0.20	0.60	2.17	II	
2311	Wajo	0.33	0.28	0.20	0.20	0.60	1.61	III	
2312	Wajo	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	1.40	III	
2313	Wajo	0.20	0.36	0.20	0.20	0.60	1.56	III	
2314	Wajo	0.47	0.52	0.33	0.60	0.60	2.52	II	
2401	Sidrap	0.33	0.28	0.20	0.33	0.40	1.55	III	III
2402	Sidrap	0.47	0.28	0.20	0.33	0.40	1.68	III	
2403	Sidrap	0.60	0.44	0.33	0.33	0.40	2.11	II	
2404	Sidrap	0.73	0.60	0.33	0.33	0.40	2.40	II	
2405	Sidrap	0.73	0.60	0.33	0.33	0.40	2.40	II	
2406	Sidrap	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	1.20	III	
2407	Sidrap	0.73	0.84	0.33	0.60	0.40	2.91	II	
2408	Sidrap	0.33	0.20	0.20	0.33	0.40	1.47	III	
2409	Sidrap	0.20	0.36	0.33	0.47	0.40	1.76	III	
2410	Sidrap	0.47	0.44	0.33	0.47	0.40	2.11	II	
2411	Sidrap	0.20	0.36	0.33	0.33	0.40	1.63	III	
2501	Pinrang	0.47	0.44	0.33	0.20	0.60	2.04	II	III
2502	Pinrang	0.33	0.44	0.20	0.33	0.60	1.91	III	
2503	Pinrang	0.20	0.36	0.20	0.20	0.60	1.56	III	
2504	Pinrang	0.33	0.44	0.33	0.33	0.60	2.04	II	
2505	Pinrang	0.73	0.84	0.47	0.33	0.60	2.97	II	
2506	Pinrang	0.73	0.68	0.20	0.33	0.60	2.55	II	
2507	Pinrang	0.47	0.20	0.20	0.20	0.60	1.67	III	
2508	Pinrang	0.47	0.36	0.20	0.33	0.60	1.96	III	
2509	Pinrang	0.20	0.28	0.33	0.20	0.60	1.61	III	
2510	Pinrang	0.47	0.52	0.47	0.33	0.60	2.39	II	
2511	Pinrang	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	1.40	III	
2512	Pinrang	0.33	0.44	0.20	0.20	0.60	1.77	III	
2601	Enrekang	0.20	0.68	0.47	0.33	0.20	1.88	III	III
2602	Enrekang	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	
2603	Enrekang	0.33	0.92	0.60	0.47	0.20	2.52	II	
2604	Enrekang	0.20	0.28	0.33	0.20	0.20	1.21	III	
2605	Enrekang	0.33	0.76	0.47	0.47	0.20	2.23	II	
2606	Enrekang	0.33	0.20	0.33	0.20	0.20	1.27	III	
2607	Enrekang	0.33	0.52	0.60	0.47	0.20	2.12	II	
2608	Enrekang	0.33	0.28	0.33	0.20	0.20	1.35	III	
2609	Enrekang	0.47	0.68	0.20	0.33	0.20	1.88	III	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2610	Enrekang	0.20	0.52	0.20	0.20	0.20	1.32	III	
2611	Enrekang	0.47	0.28	0.20	0.20	0.20	1.35	III	
2612	Enrekang	0.47	0.20	0.20	0.20	0.20	1.27	III	
2701	Luwu	0.20	0.52	0.47	0.60	0.60	2.39	II	
2702	Luwu	0.20	0.36	0.33	0.33	0.60	1.83	III	
2703	Luwu	0.20	0.44	0.20	0.47	0.60	1.91	III	
2704	Luwu	0.20	0.28	0.20	0.20	0.60	1.48	III	
2705	Luwu	0.33	0.28	0.20	0.47	0.60	1.88	III	
2706	Luwu	0.20	0.28	0.33	0.33	0.60	1.75	III	
2707	Luwu	0.33	0.36	0.47	0.33	0.60	2.09	II	
2708	Luwu	0.20	0.20	0.20	0.33	0.60	1.53	III	
2709	Luwu	0.20	0.28	0.20	0.20	0.60	1.48	III	
2710	Luwu	0.20	0.20	0.33	0.20	0.60	1.53	III	
2711	Luwu	0.20	0.20	0.47	0.20	0.60	1.67	III	III
2712	Luwu	0.20	0.52	0.33	0.47	0.60	2.12	II	
2713	Luwu	0.33	0.36	0.33	0.33	0.60	1.96	III	
2714	Luwu	0.20	0.36	0.33	0.47	0.60	1.96	III	
2715	Luwu	0.33	0.44	0.33	0.60	0.60	2.31	II	
2716	Luwu	0.20	0.28	0.20	0.47	0.60	1.75	III	
2717	Luwu	0.20	0.28	0.33	0.47	0.60	1.88	III	
2718	Luwu	0.33	0.28	0.20	0.33	0.60	1.75	III	
2719	Luwu	0.20	0.28	0.33	0.33	0.60	1.75	III	
2720	Luwu	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	1.40	III	
2721	Luwu	0.20	0.20	0.20	0.20	0.60	1.40	III	
2801	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2802	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2803	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2804	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	
2805	Tana Toraja	0.33	0.68	0.20	0.20	0.20	1.61	III	
2806	Tana Toraja	0.33	0.36	0.20	0.20	0.20	1.29	III	
2807	Tana Toraja	0.33	0.28	0.20	0.33	0.20	1.35	III	
2808	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	III
2809	Tana Toraja	0.47	0.20	0.20	0.33	0.20	1.40	III	
2810	Tana Toraja	0.73	0.68	0.33	0.33	0.20	2.28	II	
2811	Tana Toraja	0.47	0.20	0.20	0.33	0.20	1.40	III	
2812	Tana Toraja	0.60	0.28	0.33	0.33	0.20	1.75	III	
2813	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2814	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	
2815	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2816	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2817	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2818	Tana Toraja	0.47	0.28	0.20	0.33	0.20	1.48	III	
2819	Tana Toraja	0.20	0.20	0.20	0.33	0.20	1.13	III	
2901	Luwu Utara	0.33	0.52	0.47	0.33	0.20	1.85	III	III
2902	Luwu Utara	0.33	0.68	0.47	0.60	0.20	2.28	II	
2903	Luwu Utara	0.33	0.60	0.33	0.47	0.20	1.93	III	
2904	Luwu Utara	0.33	0.52	0.33	0.33	0.20	1.72	III	
2905	Luwu Utara	0.33	0.44	0.33	0.60	0.20	1.91	III	
2906	Luwu Utara	0.47	0.68	0.47	0.60	0.20	2.41	II	
2907	Luwu Utara	0.33	0.68	0.60	0.47	0.20	2.28	II	
2908	Luwu Utara	0.20	0.28	0.20	0.47	0.20	1.35	III	
2909	Luwu Utara	0.20	0.28	0.20	0.20	0.20	1.08	III	
2910	Luwu Utara	0.20	0.28	0.20	0.20	0.20	1.08	III	
2911	Luwu Utara	0.20	0.36	0.33	0.20	0.20	1.29	III	
3001	Luwu Timur	0.33	0.52	0.47	0.33	1.00	2.65	II	II
3002	Luwu Timur	0.33	0.52	0.60	0.60	1.00	3.05	II	
3003	Luwu Timur	0.20	0.28	0.20	0.33	1.00	2.01	II	
3004	Luwu Timur	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	1.80	III	
3005	Luwu Timur	0.20	0.44	0.33	0.60	1.00	2.57	II	
3006	Luwu Timur	0.33	0.52	0.47	0.47	1.00	2.79	II	
3007	Luwu Timur	0.20	0.44	0.47	0.33	1.00	2.44	II	
3008	Luwu Timur	0.20	0.36	0.33	0.20	1.00	2.09	II	
3009	Luwu Timur	0.20	0.20	0.33	0.33	1.00	2.07	II	
3010	Luwu Timur	0.20	0.44	0.33	0.47	1.00	2.44	II	
3011	Luwu Timur	0.20	0.20	0.20	0.33	1.00	1.93	III	
3101	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	III
3102	Toraja Utara	0.47	0.28	0.20	0.20	0.20	1.35	III	
3103	Toraja Utara	0.20	0.20	0.47	0.20	0.20	1.27	III	
3104	Toraja Utara	0.33	0.20	0.20	0.20	0.20	1.13	III	
3105	Toraja Utara	0.33	0.20	0.20	0.20	0.20	1.13	III	
3106	Toraja Utara	0.20	0.20	0.33	0.20	0.20	1.13	III	
3107	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	
3108	Toraja Utara	0.73	0.44	0.20	0.33	0.20	1.91	III	
3109	Toraja Utara	0.87	0.52	0.47	0.33	0.20	2.39	II	
3110	Toraja Utara	0.47	0.20	0.33	0.20	0.20	1.40	III	
3111	Toraja Utara	0.47	0.20	0.20	0.20	0.20	1.27	III	
3112	Toraja Utara	0.33	0.20	0.20	0.20	0.20	1.13	III	
3113	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III	

Kode	Nama Kabupaten	Score Penduduk	Score Pendidikan	Score Kesehatan	Score Perdagangan	Score PDRB	Score Total	Hasil Akhir Kec.	Hirarki Perkotaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3114	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III		
3115	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III		
3116	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III		
3117	Toraja Utara	0.20	0.20	0.33	0.20	0.20	1.13	III		
3118	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III		
3119	Toraja Utara	0.20	0.20	0.33	0.20	0.20	1.13	III		
3120	Toraja Utara	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	III		
3121	Toraja Utara	0.33	0.20	0.20	0.20	0.20	1.13	III		
3201	Makassar	1.00	0.52	0.47	0.73	1.00	3.72	II		I
3202	Makassar	1.00	0.84	0.60	0.73	1.00	4.17	I		
3203	Makassar	1.00	1.00	0.60	0.73	1.00	4.33	I		
3204	Makassar	1.00	1.00	0.73	0.73	1.00	4.47	I		
3205	Makassar	1.00	0.84	0.73	0.73	1.00	4.31	I		
3206	Makassar	0.87	0.84	0.73	0.73	1.00	4.17	I		
3207	Makassar	0.87	0.52	0.47	0.73	1.00	3.59	II		
3208	Makassar	1.00	0.76	0.47	0.73	1.00	3.96	II		
3209	Makassar	0.87	0.52	0.33	0.60	1.00	3.32	II		
3210	Makassar	1.00	0.84	0.47	0.73	1.00	4.04	I		
3211	Makassar	1.00	1.00	0.73	0.87	1.00	4.60	I		
3212	Makassar	1.00	0.92	0.60	0.73	1.00	4.25	I		
3213	Makassar	1.00	1.00	0.73	0.73	1.00	4.47	I		
3214	Makassar	1.00	0.84	0.47	0.73	1.00	4.04	I		
3301	Pare-Pare	0.33	0.36	0.20	0.60	0.20	1.69	III	II	
3302	Pare-Pare	0.87	0.60	0.47	0.33	0.20	2.47	II		
3303	Pare-Pare	0.87	0.76	0.33	0.73	0.20	2.89	II		
3304	Pare-Pare	0.87	0.76	0.47	0.47	0.20	2.76	II	II	
3401	Palopo	0.47	0.36	0.47	0.60	0.20	2.09	II		
3402	Palopo	0.20	0.20	0.33	0.33	0.20	1.27	III		
3403	Palopo	0.87	0.44	0.47	0.73	0.20	2.71	II		
3404	Palopo	0.87	0.36	0.60	0.73	0.20	2.76	II		
3405	Palopo	0.47	0.20	0.20	0.47	0.20	1.53	III		
3406	Palopo	0.73	0.60	0.47	0.60	0.20	2.60	II		
3407	Palopo	0.60	0.52	0.33	0.60	0.20	2.25	II		
3408	Palopo	0.33	0.20	0.33	0.47	0.20	1.53	III		
3409	Palopo	0.20	0.20	0.20	0.47	0.20	1.27	III		

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

- Adisasmita, H. Rahardjo. (2005). *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, H. Rahardjo. (2008). *Pengembangan Wilayah: Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Anas, Alex, & Abdel-Rahman, Hesham M. (2003). *Theories of Systems of Cities*, New Orleans: University of New Orleans.
- Berg, Bruce L. (2009). *Qualitative Research Methods for the Social Sciences* (7th ed.), Boston.
- Bourne, L.S. (1978). *System of Cities : Reading on Structure, growth and Policy*. New York: Oxford University Press.
- Bretagnolle, Anne, & Daude, Eric. (2003). *From Theory to Modelling: Urban Systems as Complex Systems*. Italy: Lucca2003.
- Budihardjo, Eko. (1995). *Pendekatan Sistem dalam Tata Ruang Pembangunan Daerah Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: UGM Press.
- Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chadwick, George. (1971). *A Systems View of Planning: Towards A Theory of The Urban and Regional Planning Process*. New York: Pergamon Press.
- Creswell, John W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Second Edition*. California: Sage Publications.
- Daryanto, Arief, & Hafizrianda, Yundy. (2010). *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.

- Doxiadis, Constantinos A. (1968). *Ekistics : An Introduction to the Science of Human Settlement*. London: Anchor Press.
- Evers, Hans-Dieter, & Korff, Rudiger. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara*. (Zulfahmi, penerjemah.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fainstein, Susan S, & Campbell, Scott. (1996). *Reading in Urban Theory*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Fujita, Masahisa, & Krugman, Paul, & Venables, Anthony. (1999). *The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade*. Massachusetts: The MIT Press.
- Harimudin, Jamal. (2008). *Kota, Sistem Kota-kota, Kota dan Wilayah Belakangnya*. Jakarta.
- Galiani, Sebastian & Kim, Sukkoo. (2008). *The Law of the Primate City in the Americas*. Los Angeles: UCLA.
- Krugman, Paul. (2008). *Trade and Geography: Economies of Scale, Differentiated Products and Transport Costs*, Sweden: The Royal Swedish Academy of Sciences.
- Nas, d. P. J. M. (1979). *Kota di Dunia Ketiga: Pengantar Sosiologi Kota*, Jilid 1. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- NUDS. (1985). *Laporan Akhir NUDS: Laporan Utama*. Jakarta: Dept of Public Work, UNDP, UNCHS.
- O'Sullivan, Arthur, *Urban Economics*, Sixth Edition, McGraw-Hill International Edition, New York, 2007.
- Pacione, Michael. (2001). *Urban Geography : A Global Perspective*. New York: Routledge.
- Lynch, Kevin. (1981). *Good City Form*, London: The MIT Press.
- Parker, Simon. (2004). *Urban Theory and The Urban Experience: Encountering The City*. New York: Routledge.

- Rutz, Werner. (1987). *Cities and Towns in Indonesia : Their Development, Current Positions and Functions with Regard to Administration and Regional Economy*. Berlin: Gebruder Borntraeger.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati S., & Kusbiantoro, B.S. (ed). (1997). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati Sugijanto. (2005). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku 1*. Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI.
- Soegijoko, Budhy Tjahjati Sugijanto. (2005). *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Pengalaman Pembangunan Perkotaan di Indonesia, Buku 2*. Jakarta: Yayasan Sugijanto Soegijoko dan URDI.
- Somantri, Gumilar Rusliwā. (2005). *Memahami Metode Kualitatif*, Jakarta: Makara, Sosial Humaniora, Volume 9 Nomor 2.
- Soo, Kwok Tong. (2002). *Zipf's Law for Cities: A Cross Country Investigation*. London: London School of Economics.
- Sriwinarti, Asih. (2005). *Beberapa Karakteristik Umum Pertumbuhan Enam Kota Besar di Indonesia Tahun 1980-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Sedang Berkembang. Yogyakarta: FE UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Tampubolon, Muslim, & Silaban, Pasaman. (2004). *Penerapan dan Pendekatan Teori Sistem: Studi Kasus Universitas HKBP Nomensen*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- The World Bank. (2009). *Laporan Pembangunan Dunia 2009: Menata Ulang Geografi Ekonomi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Winardi. (1980). *Pengantar Teori Sistem dan Analisa Sistem*. Jakarta: Karya Nusantara.
- Winarso, Haryo. (1999). *Sejarah Penataan Ruang di Indonesia, Teori dan Praktek Penataan Ruang*. Bandung.

Wyly, Elvin. (2010). *Theories of Urban System Development: Geography 350, Introduction to Urban Geography*. Canada.

Zaris, Roslan. (1987). *Developing A National Urban Policy Formulation Capabality in Indonesia*. London: *Paper on International Conference on Urban Shelter in Developing Countries*.

Zaris, Roslan. (2003). *Sejarah Penataan Ruang Indonesia*. Jakarta.

----- (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

----- (2001). Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

----- (2009). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2009). *Sulawesi Selatan Dalam Angka 2009*. BPS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2008). *Statistik Sosial Sulawesi Selatan Tahun 2008*. BPS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2008). *Statistik Ekonomi Sulawesi Selatan 2008*. BPS. Jakarta.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2010). *Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*. BPS. Jakarta

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. (2010). *Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Angka 2010*. BPS. Selayar.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba. (2010). *Statistik Kabupaten Bulukumba 2010*. BPS. Bulukumba.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2010). *Kabupaten Bantaeng dalam Angka 2010*. BPS. Bantaeng.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Jeneponto. (2010). *Kabupaten Jeneponto dalam Angka 2010*. BPS. Jeneponto.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar. (2010). *Kabupaten Takalar dalam Angka 2010*. BPS. Takalar.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2010). *Gowa dalam Angka 2010*. BPS. Gowa.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. (2010). *Kabupaten Sinjai dalam Angka 2010*. BPS. Sinjai.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. (2010). *Maros dalam Angka 2010*. BPS. Maros.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep. (2010). *Kabupaten Pangkep dalam Angka 2010*. BPS. Pangkajene.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru. (2010). *Kabupaten Barru dalam Angka 2010*. BPS. Barru.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. (2010). *Kabupaten Bone dalam Angka 2010*. BPS. Bone.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. (2010). *Kabupaten Soppeng dalam Angka 2010*. BPS. Soppeng.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo. (2010). *Kabupaten Wajo dalam Angka 2010*. BPS. Wajo.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang. (2010). *Sidenreng Rappang dalam Angka 2010*. BPS. Rappang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. (2010). *Kabupaten Pinrang dalam Angka 2010*. BPS. Pinrang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang. (2010). *Kabupaten Enrekang dalam Angka 2010*. BPS. Enrekang.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu. (2010). *Kabupaten Luwu dalam Angka 2010*. BPS. Luwu.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara. (2010). *Luwu Utara dalam Angka 2010*. BPS. Luwu Utara.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur. (2010). *Kabupaten Luwu Timur dalam Angka 2010*. BPS. Luwu Timur.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. (2010). *Kabupaten Tana Toraja dalam Angka 2010*. BPS. Rantepao.

Badan Pusat Statistik Kota Pare-pare. (2010). *Pare-Pare dalam Angka 2010*. BPS. Pare-Pare.

Badan Pusat Statistik Makassar. (2010). *Makassar dalam Angka 2010*. BPS. Makassar.

Badan Pusat Statistik Kota Palopo. (2010). *Palopo dalam Angka 2010*. BPS. Palopo.

3. Publikasi Elektronik:

Sejarah Kota Makassar. (2009). <http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php/sejarah-kota-makassar>, tanggal akses 9 Nopember 2010.

Keping-Keping Sejarah Selayar. (2009). <http://www.selayaronline.com/?m=bWVudT1jb250ZW50JmdpZD0xMjA1NDE0MjE2JmFpZD0xMjM5MDg3NTk5JnBhZ2U9MQ==>, tanggal akses 9 Nopember 2010.

Sejarah kota Bantaeng. (2010). http://www.bantaeng.go.id/detail.php?judul=Sekilas%20Bantaeng&file=sekilas_bantaeng . tanggal akses 9 Nopember 2010.

Profil Kabupaten Takalar. (2010). <http://www.takalarkab.go.id/?pilih=hal&id=15> . tanggal akses 9 Nopember 2010.

- Sejarah Kabupaten Gowa.(2010). <http://www.gowakab.go.id/>. tanggal akses 9 Nopember 2010.
- Sejarah Sinjai. (2010). http://www.sinjai.go.id/sinjai/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=29 . tanggal akses 9 Nopember 2010.
- Maros Post. (2010). <http://www.marospost.co.cc/toddo-limayya.html> tanggal akses 9 Nopember 2010.
- Profil Kabupaten Pangkep. (2007). http://daerah1.ampl.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=100, tanggal akses 12 Nopember 2010.
- Profil Kabupaten Barru. (2008). http://daerah1.ampl.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=53&Itemid=100, tanggal akses 12 Nopember 2010.
- Sejarah Kabupaten Bone. (2010). <http://www.bone.go.id/sejarah.php>, tanggal akses 12 Nopember 2010.
- Sejarah Singkat Kabupaten Soppeng. (2009). <http://soppengkab.go.id/content/view/12/28/>, tanggal akses 13 Nopember 2010.
- Sejarah Kabupaten Wajo. (2010). http://www.wajokab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=32 .tanggal akses 13 Nopember 2010.
- Sejarah Kabupaten Sidrap. (2010). <http://suarakomunitas.net/baca/9517/sejarah--kabupaten--sidrap.html>. tanggal akses 13 Nopember2010.
- Kilas Sejarah Pinrang. (2007). http://pinrangkab.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=10. tanggal akses 13 Nopember 2010.
- Sejarah Kabupaten Enrekang. (2009). <http://www.enrekangkab.go.id/>, tanggal akses 13 Nopember 2010.
- Sejarah Kabupaten Tana Toraja. (2009). http://www.torajakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=1. Tanggal akses 13 Nopember 2010.

Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Luwu Utara. (2008). http://www.luwuutara.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=234&Itemid=132, Tanggal akses 14 Nopember 2010.

Selayang Pandang Kabupaten Luwu Timur. (2009). http://www.luwutimurkab.go.id/lutim2/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=174. Tanggal akses 14 Nopember 2010.

Sejarah Kota Parepare. (2010). http://www.pareparekota.go.id/index.php?view=article&catid=89:parepareku&id=212:sejarah-kota-parepare&option=com_content&Itemid=271. Tanggal Akses 14 Nopember 2010.

